

**PANDANGAN ALI JUM'AH TENTANG *HUDUD* DAN
IMPLIKASINYA BAGI NEGARA INDONESIA (STUDI ANALISIS
KITAB *AL- BAYAN LIMA YASYGHALU AL-ADZHAN*)**

TESIS

OLEH:

NAJIB AMRULLAH

NIM: 19750008



**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PANDANGAN ALI JUM'AH TENTANG *HUDUD* DAN
IMPLIKASINYA BAGI NEGARA INDONESIA (STUDI ANALISIS
KITAB *AL- BAYAN LIMA YASYGHALU AL-ADZHAN*)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Studi Ilmu Agama Islam

OLEH:
NAJIB AMRULLAH
NIM: 19750008

**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul *Pandangan Ali Jum'ah Tentang Hudud dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia (Studi Analisis Kitab al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan)*, telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 14/07/2021

Pembimbing I



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

Malang, 14/07/2021

Pembimbing II



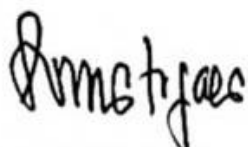
Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I

NIP. 196907202000031001

Malang, 14/07/2021

Mengetahui,

Ketua Program Magister Studi Ilmu Agama Islam



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.

NIP.197307102000031002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul Pandangan Ali Jum'ah Tentang *Hudud* dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia (Studi Analisis Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 18 Agustus 2021

Dewan Penguji,

Dr. Nasrullah, M.Th.I

Ketua

NIP. 198112232011011002

Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag.

Penguji Utama

NIP. 196608251994031002

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Pembimbing I

NIP. 196512311992031046

Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I

Pembimbing II

NIP. 196907202000031001



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak.

NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Najib Amrullah

NIM : 19750008

Program Studi : Magister Studi Ilmu Agama Islam

Judul Tesis : Pandangan Ali Jum'ah Tentang *Hudud* dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia (Studi Analisis Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penulisan saya ini tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 14 Juli, 2021

Hormat saya,



Najib Amrullah

19750008

MOTTO

قال الحافظ الخاطب البغدادي: من تعلم من الأوراق يقال له صحفية ليس بعالم

Berkata al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi: Barangsiapa yang belajar dari buku saja, dia ini berarti hanya tukang buka buku dan bukan orang alim

Seorang penuntut ilmu agama jika hanya belajar melalui buku saja, tidak diimbangi dengan petunjuk guru, maka dia hanya seorang kutu buku dan bukanlah seorang ahli ilmu. Karena ilmunya orang alim ada pada dirinya sedangkan buku hanya sebagiannya

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda A.Rofik dan ibunda Nur Rofiah yang telah mencurahkan daya dan upayanya demi pendidikan anak tersayangnya.
2. Istri tercinta, Nur Faizah yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat selama proses penulisan dan penyelesaian tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Magister Studi Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan inspirasinya selama penulis menempuh studi.
4. Dosen pembimbing, Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. dan Dr. H. Helmi Syaifuddin. yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

ABSTRAK

Najib Amrullah, 2021. *Pandangan Ali Jum'ah Tentang Hudud dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia (Studi Analisis Kitab al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan)*. Tesis, Jurusan Studi Ilmu Agama Islam Pendidikan Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. 2) Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I.

Kata Kunci: Ali Jum'ah, Hudud, Kitab al-Bayan

Perdebatan pro-kontra terhadap konsep dan penerapan *hudud* menuai perbedaan internal kaum muslimin yang cukup kuat. Satu pandangan menganggap *hudud* merupakan syariat yang wajib diterapkan di sebuah negara bagaimanapun kondisinya dan menganggap bentuk hukuman yang ada pada *hudud* seperti potong tangan, rajam, dan cambuk sudah final karena dalilnya sudah jelas tidak menerima penafsiran lain. Satu pandangan lain menganggap konsep *hudud* perlu direinterpretasi ulang agar sesuai dengan konteks saat ini sehingga bentuk hukuman yang ada pada *hudud* masih membuka ruang untuk diubah jenis hukumannya karena hal itu dianggap tidak manusiawi. Pandangan lain lagi datang dari ulama Mesir yaitu Ali Jum'ah ia mempunyai pendapat yang berbeda dari dua pandangan sebelumnya tentang konsep *hudud* dan penerapannya. Pandangannya menengahi kedua pendapat di atas karena ia mampu menyelaraskan antara teks dan konteks.

Penelitian ini membahas pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dan implikasi pandangannya dengan konteks negara Indonesia dengan sub fokus mencakup: (1) bagaimana pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud*, (2) apa argumenasi yang melandasi pandangannya tentang *hudud*, (3) bagaimana implikasi pandangan Ali Jum'ah dengan konteks negara Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hermeneutik dan termasuk jenis penelitian library research dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data dari penelitian ini diambil dari kitab Ali Jum'ah yaitu *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* sebagai data primernya. Sedangkan data sekundernya diambil dari kitab-kitab karangan ulama lain, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, dan youtube atau media internet. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menganalisis data, dan menyajikan data.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ali Jum'ah memandang *hudud* sebagai pencegahan terjadinya tindak kriminal. Menurut Ali Jum'ah *hudud* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti adanya saksi yang adil. Ia mengatakan bahwa penerapan *hudud* pada zaman sekarang tidak bisa diterapkan karena tidak adanya saksi yang adil. Bahkan menurut Ali Jum'ah, syariat tidak lebih menginginkan penerapan *hudud* itu dijalankan melebihi daripada memaafkan dan menutup aib pelaku. Dan mencari-cari bukti agar menyegerakan seseorang ditegakkannya *hudud* bukanlah termasuk manhaj syariat yang benar. 2) argumentasi Ali Jum'ah yang mendasari pandangannya tentang *hudud* bahwa pada zaman Qadhi Abu as-Saib 'Utbah bin 'Ubaidillah bin Musa ia mengatakan sebuah negeri tidak akan bisa berdalih dengan sepuluh saksi yang adil sedangkan penduduknya berjumlah sepuluh ribu orang. Pada zaman dulu saksi adil mudah didapatkan oleh seorang hakim tetapi zaman sekarang sulit menemukan saksi yang adil. Kasus tentang Ma'iz, riwayat dari Abu Bakrah as-Saqafi, sikap Abu Bakr, Umar, dan Abu Darda' terhadap pencuri sebagai dalil bahwa syariat tidak bernaflu untuk menegakkan *hudud*. 3) implikasi dari pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* secara tidak langsung melegitimasi dan mendukung hukum pidana di Indonesia berdasarkan KUHP dan pandangannya dapat dijadikan dalil syar'i untuk memberhentikan atau mengganti penerapan *hudud* di bagian wilayah Indonesia dengan hukum pidana sesuai dengan KUHP.

ABSTRACT

Najib Amrullah, 2021. *Ali Jum'ah's View on Hudud and Its Implications for the Indonesian State (Analysis Study of the Kitab al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan)*. Thesis, Department of Islamic Studies, Postgraduate Education, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. 2) Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I

Key words: Ali Jum'ah, Hudud, al-Bayan Book

The debate about the pros and cons of the concept and application of hudud reaps strong internal differences among Muslims. One view considers that hudud is a shari'a that must be applied in a country regardless of the conditions and considers the forms of punishment that exist in hudud such as cutting hands, stoning, and flogging are final because the arguments clearly do not accept other opinions. Another view considers that the concept of hudud needs to be reinterpreted to fit the current context so that the forms of punishment that exist in hudud still open space to change the type of punishment because it is considered inhumane. Another view came from the Egyptian cleric, Ali Jum'ah, he had a different opinion from the previous view on the concept of hudud and its application. His views are intermediate between the two opinions above because he is able to harmonize the text and context.

This study discusses Ali Jum'ah about hudud and his views with the context of the Indonesian state with sub-covers: (1) how is Ali Jum'ah's view on hudud, (2) what are the arguments that underlie his views on hudud, (3) how are his views on hudud? Ali Jum'ah with the context of the Indonesian state.

This study uses a hermeneutic philosophy approach and includes a type of library research with a qualitative descriptive nature of research. The data from this study were taken from the book of Ali Jum'ah, namely al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan as the primary data. While the secondary data is taken from books written by other scholars, journals, articles related to this research, and youtube or internet media. Researchers used triangulation data collection techniques. While the data analysis method is done by reducing the data, analyzing the data, and presenting the data.

The results of this study are: 1) Ali Jum'ah views hudud as a prevention of crime. According to Ali Jum'ah hudud has conditions that must be met such as being fair. He said that today's implementation of hudud cannot be applied because there are no fair

witnesses. Even according to Ali Jum'ah, the Shari'a does not want the application of hudud to be more than forgiving and covering the perpetrator's disgrace. And looking for evidence so that hudud can be enforced, whether it's the correct Shari'a manhaj. 2) Ali Jum'ah's argument which is his view on hudud that at the time of Qadi Abu as-Saib 'Utbah bin' Ubaidillah bin Musa he said a country would not be able to argue with ten fair witnesses whose population was ten thousand people. In ancient times a fair witness was found by a judge but nowadays it is difficult to find a fair witness. The case of Ma'iz, the narration of Abu Bakrah as-Saqafi, the attitude of Abu Bakr, Umar, and Abu Darda' towards thieves as evidence that the Shari'a has no desire to ensure hudud. 3) Ali Jum'ah's view on hudud indirectly legitimizes and supports Indonesia criminal law based on the criminal code of law and his views can be used as syar'i argument to stop or replace the application of hudud in parts of Indonesia with criminal law in accordance with the criminal code.

مستخلص البحث

نجيب أمر الله، ٢٠٢١. وجهة نظر علي جمعة حول الحدود وانعكاساتها على الدولة الإندونيسية (دراسة تحليلية لكتاب البيان لما يشغل الأذحان). الرسالة الماجستير، قسم الدراسات الإسلامية، الدراسات العليا، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. (المشرف: ١) د. فاضل الماجستير (٢) د. حسن حلمي سيف الدين الماجستير

الكلمات المفتاحية: علي جمعة، الحدود، كتاب البيان

يحصّد الجدّل حول إيجابيات وسلبيات مفهوم الحدود وتطبيقه خلافاً داخلية قوية بين المسلمين. يعتبر أحد الآراء أن الحدود هي الشريعة التي يجب تطبيقها في بلد ما بغض النظر عن الشروط وتعتبر أن أشكال العقوبة الموجودة في الحدود مثل قطع الأيدي والرجم والجلد نهائية لأن الحجج من الواضح أنها لا تقبل غيرها. الآراء. هناك رأي آخر يرى أن مفهوم الحدود يحتاج إلى إعادة تفسير ليناسب السياق الحالي بحيث لا تزال أشكال العقوبة الموجودة في الحدود تفتح مساحة لتغيير نوع العقوبة لأنها تعتبر غير إنسانية. وجاء رأي آخر عن رجل الدين المصري علي جمعة، كان له رأي مختلف عن الرأي السابق في مفهوم الحدود وتطبيقه. وجهة نظره وسيطة بين الرأيين أعلاه لأنه قادر على تنسيق النص والسياق.

تناقش هذه الرسالة علي جمعة حول الحدود وآرائه مع سياق الدولة الإندونيسية بأغلفة فرعية: (١) كيف رأي علي جمعة في الحدود ، (٢) ما هي الحجج التي تقوم عليها آرائه حول الحدود؟ (٣) ما هي آرائه عن الحدود علي جمعة في سياق الدولة الإندونيسية.

تستخدم هذه الرسالة نهج الفلسفة التأويلية وتتضمن نوعاً من الأبحاث المكتبية ذات الطبيعة الوصفية النوعية للبحث. البيانات من هذه الدراسة مأخوذة من كتاب علي جمعة ، البيان ليما ياسغيل الأدجان كمعلومات أولية. في حين أن البيانات الثانوية مأخوذة من كتب كتبها باحثون آخرون ، ومجلات ، ومقالات متعلقة بهذا البحث ، ويوتيوب أو وسائل الإنترنت. استخدم الباحثون تقنيات جمع بيانات التثليث. بينما يتم إجراء طريقة تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات وتحليل البيانات وتقديم البيانات.

ونتائج هذه الرسالة هي: (١) يرى علي جمعة أن الحد منع جريمة. ووفقاً لعلي جمعة فإن للحدود شروطاً يجب توافرها مثل العدل. قال إن تطبيق الحدود اليوم لا يمكن تطبيقه لعدم وجود شهود عادل. حتى وفقاً لعلي جمعة ، فإن الشريعة لا تريد أن يكون تطبيق الحدود أكثر من التسامح والتستر على عار الجاني. والبحث عن الأدلة لفرض الحدود سواء كانت منهج الشرع الصحيح. (٢) حجة علي جمعة وهي مذهبه في الحدود أنه في عهد القاضي أبو الصائب عتبة بن عبيد الله بن موسى قال لا يمكن لدولة أن تجادل عشرة شهود عادل عدد سكانها عشرة آلاف نسمة. . في العصور القديمة ، تم العثور على شاهد عادل من قبل القاضي ولكن في الوقت الحاضر من الصعب العثور على شاهد عادل. وقضية مأعز ورواية أبي بكر السقفي وموقف أبي بكر وعمر وأبو الدرداء

من اللصوص دليلاً على عدم رغبة الشرع في الحد. ٣) وجهة نظر علي جمعة بشأن الحدود تضيف الشرعية بشكل غير مباشر على القانون الجنائي الإندونيسي وتدعمه على أساس القانون الجنائي ويمكن استخدام آرائه كحجج الشرعي لوقف أو استبدال تطبيق الحدود في أجزاء من إندونيسيا بالقانون الجنائي في وفق للقانون الجنائي.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu panjatkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan nikmat ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam selalu tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita semua ke jalan yang diberkati Allah SWT.

Tentunya banyak sekali pihak yang telah rela membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini . Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Magister Ilmu Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. dan Sekprodi Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi. yang telah selalu memotivasi penulis dan memberikan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen pembimbing I, Dr. Fadil Sj, M.Ag. atas segala kemudahan dalam layanan komunikasi dan pembimbingan selama proses penulisan tesis.
5. Dosen pembimbing II Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I atas segala kesabaran dalam mengoreksi, memberikan saran, masukan, dan kritik dalam penulisan tesis .
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan inspirasi, kepada penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua Staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan berbagai kemudahan dari administrasi sampai layanan akademik selama penulis menyelesaikan studi
8. Kedua orang tua Kusnardi dan Nur Rafi'ah yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a kepada penulis
9. Istri tercinta Nurul Faizah yang selalu memberikan perhatian dan pengertian selama penulis menempuh studi
10. Semua keluarga di Madura dan Tuban yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani hidup

11. Semua teman dan sahabat dekat saya yang selalu mengajari dan juga memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis secara tepat waktu

Penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar dan selalu endoakan mereka agar kebaikan-kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Malang, 14 Juli 2021

Penulis,

Najib Amrullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 1543/b/LI/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

أ = A	ز = Z	ق = Q
ب = B	س = S	ك = K
ت = T	ش = Sy	ل = L
ث = Ts	ص = Sh	م = M
ج = j	ض = DI	ن = N
ح = <u>h</u>	ط = Th	و = W
خ = Kh	ظ = Zh	ه = H
د = D	ع = ‘	ء = ‘
ذ = Dz	غ = Gh	ي = Y
ر = R	ف = F	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang = â

Vokal (i) Panjang = î

Vokal (u) Panjang = û

C. Vokal Dipotong

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

اَوْ = u

أَيَّ = i

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Definisi Istilah.....	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 23
A. Pengertian Hudud secara Etimologi dan Terminologi	23
B. Pembahasan Hudud dalam al-Qur'an	24
C. Pembahasan Hudud dalam al-Hadits	29
D. Macam-macam Tindak Kejahatan yang Dikenai Hukum Pidana <i>Had</i>	37
a) Madzhab Syafi'i.....	37
b) Madzhab Hanafi.....	37

c) Madzhab Maliki	37
E. Tindak Pidana Pelaku Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	37
F. Tindak Pidana Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif....	40
G. Dialektika Sarjana Muslim tentang Konsep Hudud.....	43
a. Pandangan Para Ulama Tentang Syariat <i>Hudud</i> Yang Sudah Final:.....	44
b. Pandangan Para Sarjana Muslim Tentang Perlunya Dekonstruksi Dan Reinterpretasi Konsep <i>Hudud</i> :	46
c. Pandangan Ulama Tentang <i>Hudud</i> Pada Hakikatnya Untuk Ditinggalkan	48
H. Penerapan Hudud di Beberapa Negara Islam	50
I. Teori Hermeneutik Hans Georg Gadamer.....	51
J. Kerangka Konseptual Penelitian	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Sumber Data.....	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	60
A. Paparan Data:	60
1. Biografi Ali Jum'ah (1952 M)	60
2. Kitab <i>al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan</i>	78
B. Hasil Penelitian:.....	84
BAB V PEMBAHASAN.....	98
A. Pandangan Ali Jum'ah Tentang <i>Hudud</i> Dalam Kitab <i>al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan</i>	98
B. Dasar Argumentasi Pandangan Ali Jum'ah Tentang <i>Hudud</i> Dalam Kitab <i>al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan</i>	105
C. Implikasi Pandangan Ali Jum'ah Tentang <i>Hudud</i> Dalam Konteks Negara Indonesia.....	112
BAB VI PENUTUP	117

A. Kesimpulan	117
B. Implikasi.....	119
C. Saran-saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
Tabel 2 Kata Hudud dalam al-Qur'an	30
Tabel 3 Guru-guru Ali Jum'ah	69
Tabel 4 Karya-karya Buku Ali Jum'ah	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menjaga hak asasi manusia. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menghindari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada terjadinya pertumpahan darah dan bentuk kezhaliman lainnya. Untuk menjamin itu semua, Islam mempunyai sebuah sistem dengan syari'at *hudud*¹ yang wajib diterapkan agar kemaslahatan manusia dapat terwujud dengan baik.

Pembahasan terkait penerapan *hudud* di era modern ini menjadi perbincangan yang menarik perhatian para ulama, tokoh, dan para aktualisasi hukum Islam. Bagi sebagian kalangan, terealisasinya hukum pidana Islam di suatu negara dianggap telah melaksanakan syariat Islam secara paripurna. Sebaliknya, ketiadaan penerapan *hudud* di sebuah negara menjadikan klaim negara tersebut belum bisa dikatakan negara Islam.

Pada realitanya, penerapan syari'at *hudud* ini tidak mudah dijalankan. Penerapan *hudud* di era modern seperti sekarang ini banyak dianggap sebagai hukuman yang melanggar hak asasi manusia, kejam, dan tidak manusiawi. Di dalam internal kaum muslimin terjadi perdebatan pro dan kontra terkait dengan ketentuan kriteria tindak pidana dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan. Sejauh penelusuran penulis terdapat dua kelompok besar satu sisi ekstrim kanan dan satu sisi ekstrim kiri. Kelompok pertama mengatakan bahwa *hudud* ini merupakan hak Allah yang wajib dilaksanakan tanpa adanya toleransi, pengurangan jumlah kadar hukumannya, atau bahkan mengubah bentuk dan jenis hukumannya. Maka jenis hukuman seperti potong tangan, rajam, dan cambuk, merupakan bentuk hukuman yang sudah

¹ Sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam (syariah) yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Lihat pada link berikut ini: <https://id.wikipedia.org/wiki/Hudud>

final dan tidak boleh diubah dengan model hukuman lain. Serta dalil dari al-Qur'an atau Hadits yang menyinggung tentang pensyariaan *hudud* dan bentuk hukumannya merupakan dalil yang sudah *qath'i*² secara makna dan harus diterima apa adanya.

Kelompok pertama ini diantaranya dipelopori oleh Imam al-Syaukani, Taqi al-Din Abu Bakr. Keduanya mengatakan bahwa hukum pidana Islam ini bersifat wajib dan harus dijalankan. Hukuman yang identik dengan fisik ini sudah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah sehingga tidak memberikan ruang untuk ditambah dan dikurangi. Itulah sebabnya disebut dengan *hudud* yang memberikan maksud batasan dan pencegahan manusia agar tidak jatuh pada perbuatan keji.³ Khatib al-Syarbini menambahkan bahwa *hudud* merupakan hak Allah yang wajib dilaksanakan sedangkan hak manusia adalah terangkum pada hukuman-hukuman diluar *hudud*.⁴ Sehingga dalam permasalahan *hudud* ini, manusia tidak ada hak untuk mengubahnya atau tidak menjalankannya karena ini murni hak Allah yang sudah final. Abdul Qadir 'Awdah juga mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permasalahan *hudud* dengan berbagai sanksinya dan karakteristik yang dimilikinya berbeda dengan hukum pidana lainnya. Karakteristik tersebut adalah 1) Bentuk dan kadarnya *hudud* tidak memberikan ruang adanya penambahan dan pengurangan, 2) Jika perbuatan keji itu sampai kepada hakim, maka tidak berlaku pemaafan baik dari korban atau dari pejabat yang berwenang. Kecuali kasus tersebut tidak sampai kepada hakim maka berlaku pemaafan dan hanya berlaku jenis pidana tertentu. 3) *Hudud* merupakan hak

² *Qath'i* adalah sesuatu yang pasti atau definitive. Muhammad Hashim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Noorhaidi dengan judul "*Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*" (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 26

³ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syawkanî, *Nayl al-Authâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr*, Juz VII, (Damaskus: Idarah al-Thiba'ah alMuniriyyah, 1966), h. 146. Taqî al-Dîn Abû Bakr Ibn Muhammad al-Husaynî al-Hashna al-Dimasqî al-Syâfi'i, *Kifâyah al-Akhyâr fî Hill Ghâyah al-Ikhtishâr*, Juz II, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 178.

⁴ Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Alfāz al-Minhāj*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 155

Allah.⁵ Tiga karakteristik yang disebutkan oleh 'Awdah mengindikasikan bahwa ketetapan *hudud* merupakan sesuatu yang sudah final.

Kelompok kedua dipelopori oleh Fazlur Rahman dengan teori *double movement* nya. Ia menyebutkan bahwa bentuk hukuman fisik pidana Islam seperti hukuman potong tangan, melempar batu sampai mati (rajam), dan cambuk merupakan hukuman yang diadopsi oleh Islam dari suku-suku sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam konteks saat ini, hukuman tersebut tidaklah relevan untuk diterapkan.⁶ Begitu juga Abdullah Ahmad an-Na'im dengan teori *dekontruksi* nya mengatakan hukum pidana Islam yang paling baik adalah bukan berdasarkan atas ketentuan Tuhan, melainkan adanya relevansi dengan realitas yang konkrit sehingga dapat menyelesaikan masalah sesuai zamannya dan tepat sasaran. Karena menurut an-Na'im sesuatu disebut sempurna jika melakukan pengembangan dan perubahan sesuai dengan konteks kekinian. Dari sini perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat dan hadits yang berbicara tentang *hudud*.⁷ Muhammad Syahrur ad-Dayyub dengan teori batasnya berpandangan bahwa di dalam syariat Islam mempunyai ketentuan yang disebut dengan batas minimal dan batas maksimal (*al-hadd al-adna wa al-had al-a'la*). Dari teori tersebut menghasilkan hukum pidana yang melebihi atau kurang dari batas-batas yang telah ditentukan maka tidak sah dan harus menjatuhkan hukuman sesuai proporsinya. Ia mencontohkan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan hukuman batas maksimal yang tidak boleh lebih tetapi boleh menghukum kurang dari itu.⁸ Artinya pandangan Syahrur ini masih membolehkan hukuman selain potong tangan

⁵ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri al-Jina'i Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl'i*, Juz I, (Beirut: Dar al-Risalah al-Mu'assasah, 1996), h. 88. Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'uqubah fi Fiqh al-Islam* (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1973), 90.

⁶ Fazlur Rahman, "The Concept of Hadd in Islamic Law" dalam *Islamic Studies Journal*, Vol. IV, No. 3 September 1965, h. 237

⁷ Junaidi Abdillah, *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia* dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* ", vol. 10 No. 1, 2017. h. 7

⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Alqur'an; Qira'ah Mu'asharah* (Damaskus: al-Ahali, 1990) h. 580. Lihat juga Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul al-Fiqh Madzhab Sunni) terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 366-369.

bagi pencuri. Ibrahim Hossen dengan teori *zawajir* nya (pencegahan) berpendapat bahwa hukum potong tangan, rajam, cambuk dan lain sebagainya yang ada pada *hudud* merupakan sarana bukan sebuah tujuan. Sedangkan tujuan dari pada *hudud* itu adalah membuat pelaku kejahatan menjadi jera sehingga menjadikan orang lain takut untuk melakukannya. Ketika hukuman-hukuman itu tidak memberikan efek jera, maka harus memberlakukan hukuman lain⁹ Artinya menurut kelompok ini *hudud* itu masih sangat relatif menyesuaikan tempat dan waktu serta bisa diubah dan dikontekstualisasikan.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pandangan yang cukup kuat dalam penerapan *hudud*. Satu sisi ekstrim kanan sangat literal terhadap teks al-Qur'an dan hadits sehingga menolak adanya perubahan jenis hukuman selain yang dicantumkan pada keduanya. Karena dalil yang berbicara tentang *hudud* sudah sangat jelas dan *qath'i* tidak menerima penafsiran atau interpretasi baru. Sedangkan kelompok ekstrim kiri, teks-teks yang menyangkut permasalahan *hudud* harus reinterpretasi kembali dengan makna yang sesuai pada kondisi saat ini agar al-Qur'an dan hadits bisa menghadapi tantangan perubahan di setiap zamannya. Meskipun hal ini menurut penulis sangat bertentangan dengan kaidah usul fikih yang dimana dalil yang sifatnya *qath'i* secara makna, ulama sepakat tidak menerima penafsiran lain karena makna yang terkandung di dalamnya sudah cukup jelas.

Sepanjang penelusuran penulis, terdapat pandangan lain yang lebih sesuai pada situasi dan kondisi saat ini untuk dijadikan rujukan dalam permasalahan penerapan *hudud*. Pendapat ini menurut penulis mampu menengahi kedua pandangan di atas yang dimana pendapat ini dipelopori oleh Syekh Ali Jum'ah seorang mufti di lembaga Darul Ifta' Mesir periode 2003-2013. Beliau merupakan ulama yang sangat berpedoman dengan teks al-Qur'an dan hadits sebagai dalil utamanya tetapi ia tidak bersikap tekstualis

⁹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 86-87. Lihat juga dalam karya Ibrahim Hosen, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990) h. 126-128.

dan sangat mampu untuk menyelaraskan antara teks dengan konteks serta tidak menyalahi apa yang menjadi kesepakatan para ulama pada dalil yang sifatnya *qath'i* secara makna, hal itu tidak menerima penafsiran lain. Jika di dalam ayat tertulis seperti potong tangan, maka tidak bisa ditafsiri menjadi makna yang lain karena bunyi ayatnya sangat jelas dan tegas.

Dari sinilah peneliti memetakan tiga rumusan masalah yaitu bagaimanakah pandangan Syekh Ali Jum'ah tentang *hudud* dalam kitab *al-Bayan Lima yasyghalu al-Adzhan*?. Apakah pelaksanaan *hudud* ini bisa diterapkan atau tidak dan apa saja dalil-dalil yang beliau gunakan?. Bagaimanakah implikasi pandangan beliau tentang *hudud* bagi negara Indonesia?. Karena dalam konteks negara Indonesia sebagian kalangan dari kaum muslimin menilai negara Indonesia bukan negara Islam disebabkan tidak menerapkan *hudud* pada hukum pidananya. Disisi lain di sebagian wilayah Indonesia menerapkan *hudud* sebagai hukum pidananya. Pada poin terakhir ini peneliti akan mencari relevansi pandangannya Ali Jum'ah dengan konteks negara Indonesia.

Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk menganalisis pandangan beliau terhadap *hudud* dan penerapannya dalam kitabnya yang berjudul *al-Bayan Lima Yasyghaluhu al-Adzhan* serta implikasi dari pandangannya bagi negara Indonesia.

Penulis memilih Syekh Ali Jum'ah karena ia merupakan satu di antara puluhan atau ratusan ulama dan tokoh yang mempunyai pengaruh besar baik di dunia Islam maupun di luar Islam. Ali Jum'ah merupakan ulama yang berpegang teguh dengan kitab-kitab klasik warisan dari para ulama salaf namun ia tetap bersikap moderat dalam menghadapi persoalan dan problematika umat yang bersifat kekinian sehingga hasil dari ijtihadnya banyak dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu, cendekiawan, dan intelektual muslim dunia. Ali Jum'ah merupakan ulama yang sangat unik dan jarang bandingnya pada saat ini. Ia termasuk mujtahid zaman ini dan fatwa-fatwanya dapat menuntaskan persoalan umat Islam. Meskipun dari fatwa dan pandangan Ali Jum'ah banyak yang berbeda dengan pendapat jumur ulama. Tetapi bagi penulis tidak menutup kemungkinan bahwa pendapat

yang minoritas itu terkadang lebih sesuai untuk diterapkan pada suatu kondisi tertentu dibanding pendapat jumhur ulama. Se jauh penulis mengenal beliau dengan melalui seringnya mengikuti kajian-kajian baik secara langsung atau youtube, mengkaji kitab-kitabnya, membuat penulis mengerti dan mengenal betul bagaimana cara berfikirnya serta kepeduliannya yang begitu besar terhadap umat Islam dan seluruh umat manusia.

Lalu mengapa kitab *al-bayan Lima Yasyghaluhu al-Adzhan*? karena kitab ini merupakan kumpulan jawaban atas ratusan pertanyaan kontemporer yang menyibukkan pikiran umat manusia pada abad 14 Hijriyah. Jawaban yang beliau kemukakan sangat sesuai dengan tuntutan zaman dan disertai dalil-dalil yang sangat kuat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah digambarkan, rumusan masalah yang ingin penulis identifikasi dan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*
2. Apa argumentasi yang mendasari pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*?
3. Bagaimana implikasi pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dalam konteks negara Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian:

- a. Untuk memendeskripsikan pandangan Ali Jum'ah tentang pengertian *hudud*, hakikat dan implementasinya dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*
- b. Untuk mendeskripsikan argumentasi yang mendasari pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*.
- c. Untuk mengetahui implikasi pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dalam konteks negara Indonesia

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi penulis pribadi dan umat Islam pada umumnya dalam mengembangkan khazanah keilmuan seputar konsep *hudud* dan penerapannya. Selain itu penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pendukung teori tentang hukum pidana Islam kontemporer di beberapa *nation state*.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan baru bagi para peneliti setelahnya yang fokus pada bidang hukum pidana Islam, sebagai rujukan oleh lembaga fatwa seperti MUI dalam mengeluarkan fatwa terkait problematika penerapan *hudud* yang tak kunjung usai, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah suatu negara atau pemerintah daerah khusus dalam menerapkan hukum pidana Islam.

D. Definisi Istilah

Penulis akan membatasi beberapa istilah dalam penelitian ini untuk menghindari perluasan makna dan terjadinya salah pengertian. Adapun istilah-istilah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Hudud*

Merujuk pada al-Qur'an kata *hudud* sebenarnya memiliki makna yang sangat luas. Ia tidak hanya terbatas pada hukuman yang bersifat fisik dengan menindak pidana para pelaku kejahatan beserta sanksi yang akan dikenainya melainkan *hudud* juga mencakup pada pelanggaran yang bersifat syariat dan ibadah. Seperti pelanggaran terhadap pelaksanaan shalat, puasa, waris, dan perkawinan. Singkatnya, bahwa wilayah *hudud* tidak terbatas hanya persoalan hukuman fisik bagi pelaku kejahatan tetapi juga mencakup ranah ibadah, perkawinan, dan pewarisan. Tetapi yang dimaksud *hudud* dalam penelitian disini adalah *hudud* yang bermakna sanksi atau bentuk hukuman fisik seperti

(kejahatan terhadap jiwa, pembangkangan, murtad, zina, *qadzaf*, pencurian, pembuat kekacauan, dan peminum *khamr*) yang kadarnya sudah ditentukan oleh syariat dan wajib dijalankan oleh kaum muslimin dan para penegak hukum negara. Namun dari banyaknya macam-macam tindak kejahatan yang dikenai *hudud*, peneliti membatasinya hanya dua saja yaitu zina dan pencurian.

2. Ali Jum'ah

Ali Jum'ah merupakan ulama yang disebut dengan *ahlu at-tajdid* yaitu seorang ulama yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran baru dalam Islam. Ia juga melakukan banyak ijtihad yang tiada taranya. Ketika dilihat dari wajahnya terpancar keilmuan yang luas dan ketakwaannya. Dengan kecerdasan dan keilmuannya yang tinggi, ia menjadi seorang mufti di lembaga Dar al-Ifta' Mesir selama 10 tahun dari tahun 2003-2013.¹⁰

Ali Jum'ah memiliki karakteristik yang berbeda dengan para ulama lainnya dalam beberapa aspek. *Pertama*, ia disebut dengan *maushu'iyah* yaitu segala bidang ilmu terkumpul dalam diri Ali Jum'ah. Ketika ditanya tentang ilmu tauhid, tafsir, hadits, sejarah, siroh, usul fikih, fikih, dan ilmu yang lainnya, ia pakar dan menguasai di semua bidang. Dengan penguasaan ilmu yang dimilikinya, ia disebut dengan Imam Syafi'i zaman sekarang. Ketika Imam Syafi'i dulu menjadi imam dan ulama di Mesir bahkan di dunia, maka begitulah Ali Jum'ah sekarang. Julukan *maushu'iyah* yang diperuntukkan pada Ali Jum'ah untuk meraihnya bukanlah perkara yang mudah karena sebutan tersebut hanya untuk ulama-ulama dahulu saja yang mempunyai segala bidang keilmuan. Namun seiring berkembangnya zaman, keilmuan menjadi terkotak-kotak dan hanya mempelajari sebagiannya saja. Sehingga ada ulama yang pakar dibidang Bahasa Arab tetapi tidak mampu untuk memahami kitab tauhid. Begitu juga ada yang pakar di

¹⁰ https://www.youtube.com/watch?v=iC4_XQtmapg&list=PLQkKG9j7K7A7QTYNxd_ha6UTUhKn6bvm0

bidang fikih, tetapi lemah di keilmuan lainnya. Dari sisi inilah yaitu *maushu'iyah* yang menjadikan Ali Jum'ah berbeda dengan para ulama lainnya. *Kedua*, pembacaannya terhadap sesuatu sangat detail dan mendalam. Begitu juga ketika melihat sebuah realita dan kejadian pembacaannya sangat cermat sehingga ia memahami betul bahwa kehidupan itu selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal inilah yang harus dimiliki oleh seorang pembaharu dalam Islam yaitu memahami teks, mencermati realita kehidupan dan kondisi umat, serta mampu untuk memadukan antara teks dan konteks. Ketiga keahlian itu disebut dengan *mutsallats at-tajdid*. Barang siapa yang ada pada dalam dirinya terdapat *mutsallats at-tajdid* maka ia seorang pembaharu (*mujaddid*). Karena kebanyakan ulama-ulama lain hanya menguasai pemahaman teks (*fahmu an-nash*) atau memahami realitas (*fahmu al-waqi'*) tapi tidak memiliki kepiawaian bagaimana menggabungkan keduanya (*fahmu kaifiyati tanzili an-nash 'ala al-waqi'*). *Ketiga*, *al-basathah* yaitu kemudahan. Maksudnya adalah beliau orang yang terbuka, mudah untuk dikunjungi dan diajak bicara tanpa ada batasan. Ketika ada yang ingin berkunjung ke rumah beliau, ia sangat mudah untuk ditemui. Semua ini didasarkan atas kecintaan beliau terhadap kaum muslimin sehingga orang-orang mudah untuk bertanya dan mengungkapkan permasalahannya tidak takut dan segan melihatnya karena sikap *basathahnya*. *Keempat* *Bassamah* yaitu mudah tersenyum dan tertawa. Beliau bukan orang yang kaku tetapi ia mudah bergaul dan tersenyum. Hal ini merupakan warisan Nabi SAW. yang memerintahkan untuk selalu tersenyum kepada kaum muslimin lainnya. Syekh mutawalli al-Sya'rawi berpesan agar jangan mengambil ilmu dari orang yang *mutajahhim* yaitu wajahnya yang selalu cemberut karena hal itu menggambarkan pemikirannya yang kaku. Jangan pula mengambil ilmu

dari orang yang mudah marah karena hal itu juga menggambarkan cara bagaimana ia berfikir.¹¹

3. Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*

Kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa Ali Jum'ah yang menjawab seputar permasalahan dan persoalan yang bersifat kekinian, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kegelisahan kaum muslimin di abad 14 Hijriah. Ia menjawab semua pertanyaan tersebut dengan jawaban yang memberikan sebuah kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat disertai dalil-dalil yang kuat sehingga tidak sedikit pemikiran beliau yang tertuang dalam kitab tersebut menjadi rujukan para ulama dan kaum muslimin. Kitab ini terdiri dari 2 jilid yang semuanya membahas secara tuntas *syubhat-syubhat* seputar akidah, fikih, tasawwuf, dan adat.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan upaya penelusuran dan pelacakan yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang similar dengan penelitian yang akan dilakukan. Meski demikian, penelitian ini tergolong memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di antara penelitian yang berhasil peneliti identifikasi adalah:

1. Tesis dengan judul "*Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Konsep Hudud dalam Perspektif Teori Masalah*", karya Soni Zakaria mahasiswa program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018. Tesis ini menjelaskan tentang pandangan Muhammad Syahrur dalam merekonstruksi paradigma konsepsi *hudud* menurut para ulama tradisional. Ia menggambarkan pemikirannya dengan menyuguhkan teori barunya yang disebut *nazhariyat al-hudud*. Pada dasarnya ayat dan hadits yang menyinggung permasalahan *hudud* mempunyai kandungan hukum maksimal dan minimal. Yang dimana bentuk hukuman yang sudah ditetapkan jenis dan kadarnya tidak harus diterapkan sama persis di zaman sekarang dengan zaman dulu. Karena

¹¹ https://www.youtube.com/watch?v=iC4_XQtmapg&list=PLQkKG9j7K7A7QTYNxd_ha6UTUhKn6bvm0

inti dari pensyariaan *hudud* adalah menetapkan batasan hukum maksimal dan minimalnya. Dan hal itu terangkum dalam enam kondisi diantaranya hukuman maksimal bagi pencuri adalah dipotong tangannya dan tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan mengambil hukuman minimalnya boleh dengan menghukum lebih rendah daripada potong tangan.¹²

2. Tesis dengan judul “*Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)*”, karya Nasukha, S.H.I program magister ilmu hukum pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. Tesis ini mencoba untuk menganalisa hukuman yang ideal untuk diterapkan terhadap pelaku korupsi yang selama ini belum menemukan hukuman yang bisa membuat pelakunya jera. Solusi dari itu adalah hukuman yang berupa potong tangan bahkan hukuman mati yang sepadan dengan beratnya tindak pidana tersebut. Selain itu diberikan sanksi berupa sosial dan moral dengan diasingkannya dari masyarakat, dicabut hak-haknya dan ketika meninggal jenazahnya tidak perlu dishalati.¹³
3. Tesis dengan judul “*Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan yang Maha Esa*”, karya Khairil Akbar mahasiswa program magister ilmu hukum pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017. Tesis ini menjelaskan prinsip pemidanaan Islam dalam Qanun Jinayah Aceh dan relevansi prinsip pemidanaan Islam dalam Qanun Jinayah Aceh terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. penelitian ini menemukan adanya relevansi khususnya prinsip legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan prinsip pembelajaran pada masyarakat terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hanya saja, prinsip-prinsip dalam Qanun Jinayah Aceh itu masih sangat terbatas sehingga membutuhkan pengembangan atau

¹² Soni Zakaria, “*Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Konsep Hudud dalam Perspektif Teori Masalah*”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (2003)

¹³ Nasukha, S.H.I, “*Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018)

tafsiran lebih lanjut. Adapun prinsip yang tidak relevan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa ialah prinsip keislaman berdasarkan tafsir otentik qanun tersebut. Prinsip ini membedakan perlakuan hukum berdasarkan agamanya. Berdasarkan prinsip ini pula, diadakan jarimah dan ‘uqubat hudud yang dinalar sebagai ibadah. Hal ini bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menginginkan terlindunginya kebebasan beragama, beribadah, serta kebebasan meyakini sesuatu berdasarkan hati nurani. Terakhir, ketidaksesuaian prinsip keislaman tersebut juga terlihat dari penjelasannya yang menafikan sumber agama dan kepercayaan lain selain dari sumber Islam (al-Quran dan Sunnah).¹⁴

4. Tesis dengan judul “*eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*”, karya Dede Hendra MR mahasiswa fakultas hukum program pascasarjana sistem peradilan pidana Jakarta tahun 2012. Tesis ini menerangkan peraturan tentang hukum pidana Islam yang diberlakukan di Propinsi Aceh. Dalam penelitian ini dijelaskan telah diterbitkan sebanyak lima *qanun* yang mencangkup *qanun* akidah, ibadah, minuman memabukkan, perbuatan zina dan zakat. Meskipun demikian dalam penerapannya terdapat kendala yang menyebabkan pelaksanaan hukuman tersebut tidak bisa dijalankan. Seperti adanya yang melarikan diri Ketika akan dilaksanakan hukuman tersebut dan kendala-kendala lainnya.¹⁵
5. Tesis dengan judul “*Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyyah* ”, karya Ulya Hikmah Sitorus Pane mahasiswi program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2016. Tesis ini membahas tentang fatwa Ali Jum’ah tentang nikah ‘*Urfi*. Tesis ini menerangkan pandangan Ali Jum’ah tentang nikah ‘urfi pada zaman sekarang. Apakah pernikahan tersebut sah dalam pandangan syariat

¹⁴ Khairil Akbar, “*Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan yang Maha Esa*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017)

¹⁵ Dede Hendra MR, “*eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*”, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Pascasarjana Sistem Peradilan pidana Universitas Islam Indonesia Jakarta (2012)

meskipun tidak tercatat di pengadilan agama. Serta dijelaskan factor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan nikah *'urfi*. Tesis ini memberikan kesimpulan sahnyanya pernikahan meskipun tidak tercatat di negara selama rukun dan syaratnya terpenuhi hanya saja meskipun sah, pernikahan tersebut tidak dianjurkan karena tidak mempunyai hukum yang kuat. Penelitian ini hanya membahas tentang fikih nikah dan sama sekali tidak menyinggung tentang hukum pidana Islam.¹⁶

6. Tesis dengan judul "*Ijtihad Ali Jum'ah dalam Masalah-masalah Kontemporer dalam Bukunya al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*", karya Muhammad Zakir mahasiswa pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2014. Penelitian ini hanya menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah Ali Jum'ah dalam mengeluarkan fatwa untuk diterapkan dalam permasalahan ibadah dan nikah. Tesis ini sama sekali tidak membahas atau menyinggung tentang penerapan *hudud* atau permasalahan transaksi jual beli.¹⁷
7. Tesis dengan judul "*Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Mu'amalat Maliyah Mu'ashirah*", karya Fajar, S.H.I. magister hukum Islam fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2019. Tesis ini membahas tentang bagaimana metode yang digunakan Ali Jum'ah dalam berijtihad seputar permasalahan transaksi jual beli kredit, pandangan beliau terhadap bunga di bank konvensional, dan halalnya transaksi jual beli haram di negeri non muslim. Tesis ini juga memaparkan metode yang seperti apa yang dominan beliau gunakan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa seputar transaksi jual beli atau *muamalat Maliyah*. Dan sebagai akhirnya, fatwa-fatwa yang beliau keluarkan memberikan kemanfaatan bagi umat dan sangat relevan untuk digunakan pada zaman sekarang ini.¹⁸

¹⁶ Ulya Hikmah Sitorus Pane, "*Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*", Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Sistem Peradilan Pidana Jakarta (2012)

¹⁷ Muhammad Zakir, "*Ijtihad Ali Jum'ah dalam Masalah-masalah Kontemporer dalam Bukunya al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*", Tesis Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang (2014).

¹⁸ Fajar, S.H.I, "*Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Mu'amalat Maliyah Mu'ashirah*", Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2019)

8. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) 2017 dengan judul “*Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia*”, karya Junaidi Abdillah dosen fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung.¹⁹ Artikel ini menjelaskan beberapa teoritis Islam yang berpandangan bahwa hukum pidana Islam sangat dinamis dalam merespon persoalan yang bersifat kekinian. Memperbaharui teori-teori hukum pidana Islam merupakan sebuah solusi untuk menyelaraskan hukum pidana Islam dengan hukum kontemporer. Melalui pendekatan *maqashid syariah* maka hukum pidana Islam dapat disatukan dengan hukum pidana nasional.
9. Jurnal al-Hikam Vol.13 No.2 Desember 2018 dengan judul “*Diskursus Hudud dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud)*”, karya Junaidi Abdillah dosen UIN Walisongo Semarang. Artikel ini membahas tentang bagaimana konsepsi *hudud* pada masa awal disyariatkannya dan disertai pandangan ulama yang mendukung bahwa pensyariaan *hudud* beserta jenis hukumannya merupakan syariat yang bersifat *taufiqi* atau final tanpa mengalami perubahan dan pergeseran makna. Namun pandangan lain membantah bahwa paradigma *hudud* mengalami perubahan secara konsepsi. Dan bentuk hukuman *hudud* yang identik dengan fisik yang kadarnya sudah ditentukan, merupakan hasil interpretasi ulama terdahulu. Pada kesimpulannya bahwa perbincangan tentang syariat *hudud* masih mengalami ruang kritik yang luas dan tidak bersifat final mengenai jenis dan bentuk hukumannya.²⁰
10. Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 1, No. 1, 2018 dengan judul “*Reformulasi Nalar Hudud di Indonesia Menuju Terbentuknya Hukum Pidana Nasional*”, karya Junaidi Abdillah dosen UIN Walisongo Semarang. Artikel ini membahas perlunya membumikan apa yang disebut dengan *fiqih jinayat* di Indonesia. Karena selama ini pemahaman

¹⁹ Junaidi Abdillah, “*Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) 2017.

²⁰ Junaidi Abdillah, “*Diskursus Hudud dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud)*”, Jurnal al-Hikam Vol.13 No.2 Desember 2018

yang diserap dari teks yang berbicara tentang *hudud* atau hukum pidana Islam, masih melalui pemahaman dari ulama tradisional. Yang dimana penerapan hukum pidana Islam harus sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Jika pemahaman ini diterapkan di Indonesia maka akan menimbulkan ketidak selarasan antara perintah syariah dengan kondisi masyarakat saat ini. Solusi untuk bisa menerapkan hukum pidana Islam harus dipahami sesuai dengan kondisi dan kultur masyarakat Indonesia. Sedangkan nalar dari cara berfikir kaum tradisional dalam memahami hukum pidana Islam harus dialihkan pada pemahaman baru *fiqih jinayat* ke-Indonesian agar mampu berkontribusi dengan hukum pidana nasional.²¹

11. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol. 1, No. 2, 2016 dengan judul “*Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqih Kontemporer)*”, karya Nairazi AZ, SHI, MA, dosen fakultas syariah prodi hukum pidana Islam IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Artikel ini menjelaskan tentang tidak relevannya penerapan *hudud* dikarenakan bertentangan dengan HAM internasional yang menyerukan untuk menghentikan hukuman yang tidak manusiawi dan kejam. Setiap negara berhak untuk menentukan jenis hukumannya sendiri selama tidak melanggar HAM. Namun hal ini juga dibantah bahwa hukum pidana Islam tidak melanggar HAM, justru menciptakan perdamaian dan menegakkan keadilan²²
12. Jurnal Madania Vol. 18, No. 2, 2014 dengan judul “*Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*”, Karya Toha Andiko mahasiswa fakultas Syariah dan ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan Ibrahim Hosen yang seorang pakar dibidang Fikih dan Usul fikih. Ia mengatakan perlunya memahami substansi dari

²¹ Junaidi Abdillah , “*Reformulasi Nalar Hudud di Indonesia Menuju Terbentuknya Hukum Pidana Nasional*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 1, No. 1, 2018

²² Nairazi AZ, “*Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqih Kontemporer)*” Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 2, 2016

hukum pidana Islam baik dari teks-teks yang berbicara tentang *hudud* sampai pada bentuk dan jenis hukumannya. Berpegang dengan literal dari sebuah teks tanpa memperhatikan konteks maka syariat itu terlihat kaku dan ketika diterapkan akan terjadi benturan dengan masyarakat. Karena itu Ibrahim Hosen menyerukan untuk reinterpretasi pada teks-teks tentang *hudud* sehingga mampu untuk mendapatkan tujuan daripada pensyariaan *hudud* itudan lebih mengedepankan fungsi *zawajir*-nya.²³

Untuk memudahkan dalam memetakan perbedaannya antara penelitian yang telah dikaji dengan penelitian ini, berikut bagan perbedaan antara penelitian yang telah dikaji dengan penelitian kami.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti, Judul, dan tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Soni Zakaria, <i>Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Konsep Hudud dalam Perspektif Teori Maslahah</i> , Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i>	Objek kajian, yaitu tentang konsep <i>hudud</i> menurut Muhammad Syahrur. Sedangkan penelitian penulis membahas konsep <i>hudud</i> menurut Ali Jum'ah
2.	Nasukha, <i>Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap ap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)</i> , pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i>	Objek kajian, yaitu penelitian ini hanya membahas <i>hudud</i> potong tangan terhadap pelaku korupsi. Sedangkan penelitian

²³ Toha Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)", Jurnal Madania, Vol. 18, No. 2, 2014

			penulis membahas konsep <i>hudud</i> secara umum menurut Ali Jum'ah, penerapannya, dan implikasinya bagi negara Indonesia
3	Khairil Akbar, <i>Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan yang Maha Esa</i> , pascasarjana fakultas hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i> dan relevansinya	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas relevansi hukum pidana Islam dengan sila ketuhanan Maha Esa di Aceh. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang implikasi <i>hudud</i> bagi negara Indonesia menurut Ali Jum'ah
4	Dede Hendra MR, <i>eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh</i> , pascasarjana sistem peradilan pidana Jakarta tahun 2012	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i>	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini hanya membahas pelaksanaan <i>hudud</i> di daerah Aceh saja disertai kendala-kendala penerapannya. Sedangkan penelitian penulis, membahas tentang apakah bisa <i>hudud</i> ini diterapkan di negara Indonesia

5	<p>Ulya Hikmah Sitorus Pane, <i>Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah</i>, pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2016.</p>	<p>Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang pemikiran Ali Jum'ah</p>	<p>Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang nikah 'Urfi dalam kitab <i>al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah</i>. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang <i>hudud</i> dalam kitab <i>al-Bayan Lim Yasyghalu al-Adzhan</i>.</p>
6	<p>Muhammad Zakir, <i>Ijtihad Ali Jum'ah dalam Masalah-masalah Kontemporer dalam Bukunya al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah</i>, pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2014.</p>	<p>Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang pemikiran Ali Jum'ah</p>	<p>Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang metode Ali Jum'ah dalam mengeluarkan fatwa pada masalah-masalah kontemporer seperti hukum Wanita pergi haji tanpa bersamanya seorang <i>mahrom</i>, sunat wanita, hukum keluarga berencana dan lain-lain dalam kitab <i>al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah</i>. Penelitian ini sama sekali tidak membahas tentang <i>hudud</i>. Sedangkan</p>

			penelitian penulis membahas tentang konsep <i>hudud</i> , dasar argumentasi Ali Jum'ah tentang penerapan <i>hudud</i> , dan implikasinya bagi negara Indonesia
7	Fajar, S.H.I., <i>Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Mu'amalat Maliyah Mu'ashirah</i> , magister hukum Islam fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2019	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang pemikiran Ali Jum'ah	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang metode ijtihad Ali Jum'ah pada permasalahan transaksi jual beli. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang konsep <i>hudud</i> dan dasar argumentasi Ali Jum'ah dalam kitab <i>al-Bayan Lim Yasyghaluhu al-Adzhan</i> serta implikasi fatwa beliau bagi negara Indonesia.
8	Junaidi Abdillah, <i>Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia</i> , Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (1) 2017.	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i>	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang reaktualisasi konsep <i>hudud</i> dalam Islam menurut Fazlur Rahman, an-

			Na'im, Muhammad Syahrur, dan Ibrahim Hossen. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang konsep <i>hudud</i> menurut Ali Jum'ah
9	Junaidi Abdillah, <i>Diskursus Hudud dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud</i> , Jurnal al-Hikam Vol.13 No.2 Desember 2018.	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i>	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang evolusi konsep <i>hudud</i> dari masa awal disyariatkannya sampai saat ini. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang konsep <i>hudud</i> yang sifatnya tetap dan tidak berubah menurut Ali Jum'ah
10	Junaidi Abdillah, <i>Reformulasi Nalar Hudud di Indonesia Menuju Terbentuknya Hukum Pidana Nasional</i> , Jurnal Hukum Islam Nusantara V ol. 1, No. 1, 2018	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i>	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang reformulasi nalar <i>hudud</i> sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang konsep <i>hudud</i> yang sifatnya tetap dan

			tidak berubah menurut Ali Jum'ah
11	Nairazi AZ, SHI, MA, <i>Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqih Kontemporer,</i>	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang relevansi dan implementasi <i>hudud</i>	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang relevansi <i>hudud</i> dan HAM Internasional. dalam penerapannya di era modern. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang konsep <i>hudud</i> menurut Ali Jum'ah dalam kitab <i>al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan</i> . dan implikasinya bagi negara Indonesia
12	Toha Andiko, <i>Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML.,</i> fakultas Syariah dan ekonomi Islam IAIN Bengkulu tahun 2014.	Objek kajian, yaitu sama-sama meneliti tentang <i>hudud</i>	Objek pembahasan, yaitu penelitian ini membahas tentang reinterpretasi konsep <i>hudud</i> menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang konsep <i>hudud</i> menurut Ali Jum'ah. Studi analisis

			<p>pemikiran beliau dalam kitab <i>al-</i> <i>Bayan Lima</i> <i>Yasyghalu al-</i> <i>Adzhan</i></p>
--	--	--	---

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Hudud secara Etimologi dan Terminologi

Secara etimologi kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang memiliki dua makna yaitu “batas dari sebuah tepi” dan bermakna sebuah “larangan”. *Had* juga bisa bermakna “mengasah” jika disandingkan dengan kata pedang atau pisau (*had al-Saif* atau *had as-Sikkin*) maksudnya adalah mengasah mata pedang atau pisau. Secara terminologi *hudud* itu adalah undang-undang yang terkandung di dalamnya aturan-aturan dan pembatasan terhadap sesuatu atau seseorang.²⁴

Menurut Ibrahim Anas dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Wasith* ia mendefinisikan *hudud* secara etimologi dengan larangan atau pencegahan. Sedangkan secara terminologi *hudud* itu ialah sebuah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kriminal yang bentuk dan kadar hukumannya sudah ditentukan oleh syariat dan wajib dilaksanakan.²⁵

Butrus al-Busthani dalam kitabnya *Muhith al-Muhith* hampir sama dengan Ibrahim Anas dalam mendefinisikan *hudud* yaitu sebuah bentuk hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh syariat terhadap pelaku tindak kejahatan dan wajib untuk diterapkan.²⁶

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* mendefinisikan *hudud* secara etimologi yaitu berasal dari kata *had* yang bermakna mencegah dan menghalangi. Seorang *bawwab* juga bisa disebut dengan *haddah* karena tugasnya adalah menjaga pintu karena ia berkuasa untuk menghalangi dan mencegah seseorang untuk masuk. Sedangkan secara terminologi *hudud* menurut jumhur ulama selain madzhab Hanafiyah merupakan sebuah hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah ditentukan

²⁴ Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid II, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1399 H. /1979 M.), h. 3. Lihat pula Ibrahim Mushthafa, *Mu'jam al-Wasith*, Jilid I, (Teheran: Maktabah al-Ilmiyah: t.th.), h. 7

²⁵ Ibrahim Anas, *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), h. 314

²⁶ Butrus al-Bustânî, *Muhith al-Muhith; Qamus Mutawwal li al-'Arabiyyah* (Lebanon: Maktabah Lubnah, 1983), h. 154

oleh syariat baik hukuman tersebut termasuk hak Allah (hak publik) maupun hak hamba (hak individu).²⁷

Di dalam hudud terdapat hak Allah dan hamba. Maksud daripada hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut dilaksanakan untuk menjaga keselamatan jiwa, akal, agama, kehormatan, harta benda, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu ketentraman publik.²⁸ Meskipun ada juga hukuman di dalam *hudud* yang menjadi murni hak Allah seperti pelaku zina dan minum khamr. Sedangkan *qadzaf* yaitu menuduh orang lain berzina hukumannya menjadi sekaligus hak Allah dan hak hamba.²⁹

Dari definisi *hudud* yang telah para ulama jelaskan di atas baik secara etimologi dan terminologi, dapat disimpulkan bahwa *hudud* merupakan sebuah sistem yang dimiliki oleh Islam untuk mengatur dan membatasi manusia dari perbuatan keji atau bentuk kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang melakukan kejahatan dan perbuatan keji yang telah dikategorikan oleh syariat seperti berzina, mencuri, khamr, dan lain sebagainya, maka akan dikenai hukuman *hudud*. Jenis atau bentuk hukuman *hudud* dan kadarnya ini sudah ditentukan oleh syariat sehingga tidak boleh ditambah maupun dikurangi serta wajib untuk ditegakkan bagi para pelaku kejahatan selama syarat-syaratnya sudah terpenuhi.

B. Pembahasan Hudud dalam al-Qur'an

Kata *hudud* di dalam al-Qur'an tidak hanya digunakan pada sesuatu yang berkaitan dengan hukuman atas sanksi tindak kriminal atau dalam bahasa fikihnya adalah *al-fiqh al-jinayat*. Akan tetapi juga mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalat, pernikahan, dan waris. Jika dirincikan maka akan ditemukan bahwa *hudud* terkadang dimaksudkan untuk membatasi seorang suami dan istri agar berperilaku baik dan benar

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 12

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islam...*, h. 12

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubat fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araib, 1998), h. 64

ketika mentalak dan menjalani masa ‘*iddah*’.³⁰ Seperti dalam firman Allah SWT. dalam surat at-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
 مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
 لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S at-Thalaq: 1).

Terma *hudud* juga terkadang dimaksudkan untuk sebuah pujian Allah kepada hambanya yang telah melakukan ketaatan atas perintah-perintahNya dalam hal ini adalah *hudud*.³¹ Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 13-14 yang berbunyi:

³⁰ Lihat Q.S at-Thalaq: 1

³¹ Lihat Q.S an-Nisa’: 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (Q.S. an-Nisa' ayat 13-14)

Jika dilihat pada dua ayat di atas secara lebih dalam, maka akan dipahami bahwa *hudud* dalam al-Qur'an cakupannya sangat luas. Ia tidak hanya berbicara tentang persoalan hukuman atas tindak pidana terhadap pelaku kejahatan saja. Akan tetapi *hudud* juga mencangkup persoalan-persoalan dalam bidang perceraian, waris, ibadah, kafarat, dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya, penulis akan memaparkan kata *hudud* dalam al-Qur'an beserta maknanya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1. Kata *Hudud* dalam al-Qur'an

No.	Surat dan Ayat	Disebut	Bentuk Redaksi	Keterangan
1.	al-Baqarah 2:187	1 kali	حدود الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut satu kali. Ayat ini menerangkan tentang bolehnya seorang suami untuk mencampuri istrinya di malam Ramadhan, makan dan minum pada malam itu sampai terbitnya fajar. Dan Allah melarang untuk mencampuri istri mereka ketika suami sedang beri'tikaf di masjid. Itulah ketentuan dan larangan Allah
2.	al-Baqarah 2:229	4 kali	حدود الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut empat kali. Ayat ini menerangkan tentang aturan dan batasan suami ketika mentalak istrinya yaitu sebanyak dua kali talak. Lebih dari itu, maka suami boleh untuk menahan atau melepaskan istrinya. Suami juga tidak boleh meminta kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya. Sedangkan istri boleh membayarnya untuk menebus dirinya ketika meminta untuk ditalak kepada suaminya.
3.	al-Baqarah 2:230	2 kali	حدود الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut dua kali. Ayat ini menerangkan ketidakhalalan istrinya bagi suami yang

				mentalaknya sebanyak tiga kali dan ia tidak bisa Kembali lagi kepada istrinya kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian jika suami barunya itu mentalaknya, maka ia boleh untuk kembali kepada suami sebelumnya.
4.	al-Nisa' 4:13	1 kali	حدود الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut satu kali. Ayat ini menerangkan tentang janji Allah kepada hambaNya yang mentaati hukum-hukumnya dalam hal ini adalah pembagian waris secara Islam
5.	al-Nisa' 4:14	1 kali	حدوده	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut satu kali. Ayat ini menerangkan tentang ancaman Allah terhadap siapa saja yang melanggar atau mengingkari aturannya yaitu pembagian waris secara Islami, maka ia akan dimasukkan ke dalam Neraka
6.	al-Taubah 97	1 kali	حدود ما انزل الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut satu kali. Ayat ini menerangkan tentang minimnya pengetahuan orang-orang Arab Badui terhadap hukum atau syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
7.	al-Taubah 9:112	1 kali	حدود الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut satu kali. Ayat ini menerangkan

				tentang sifak orang-orang mukmin yang selalu menjaga dan memelihara hukum-hukum Allah
8.	al-Mujadalah 58:4	1 kali	حدود الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut satu kali. Ayat ini menerangkan tentang hukum-hukum Allah yaitu kafarat suami yang menzhihar istrinya
9.	al-Thalaq 65:1	2 kali	حدود الله	Kata <i>hudud</i> dalam ayat ini disebut dua kali. Ayat ini menerangkan aturan dan hukum Allah tentang cara yang baik ketika suami akan menceraikan istrinya.

C. Pembahasan Hudud dalam al-Hadits

Jika dilihat pembahasan *hudud* di dalam al-Qur'an maka tidak ditemukan *hudud* yang bermakna hukuman yang jenis dan kadarnya sudah ditentukan serta wajib diterapkan kepada para pelaku tindak kriminal seperti mencuri, berzina, meminum khamr dan lain sebagainya. Namun *hudud* yang bermakna demikian akan ditemukan di dalam hadits-hadits Nabi SAW. Seperti yang akan peneliti sebutkan berikut ini.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا

سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَائِمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا³².

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah bahwa orang-orang Quraisy disibukkan oleh perkara wanita Makhzum yang mencuri, kemudian mereka berkata, "Siapakah yang akan berbicara kepada Rasulullah SAW.?" Orang-orang berkata, "Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasulullah SAW." Kemudian Usamah berbicara kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau akan memberikan pertolongan dalam perkara had di antara had-had Allah?" kemudian beliau berdiri lalu berkhotbah, beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila terdapat orang mulia di antara mereka yang mencuri maka mereka membiarkannya sedang apabila terdapat orang yang lemah di antara mereka mencuri maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah apabila Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya saya potong tangannya." (HR. Muslim)

Pada hadits di atas terdapat dua ungkapan Nabi SAW. yang mengindikasikan bahwa kata *hudud* bermakna hukuman yang bentuk dan kadarnya (*al-'uqubat al-muqaddara*) sudah ditentukan oleh syariat dan wajib diterapkan kepada pelaku kejahatan. Dua ungkapan Nabi SAW. pada hadits tersebut adalah "*atasyfa'u fi haddin min hududillah*" dan "*waimullah lau anna Fatimah binti muhammadin saraqat laqatha 'tu yadaha*".

Ungkapan pertama "*atasyfa'u fi haddin min hududillah*" yaitu Apakah engkau akan memberikan pertolongan dalam perkara *had* di antara *had-had* Allah?. Pertanyaan ini merupakan sebuah kemarahan beliau mendengar Usamah yang meminta keringanan hukuman atas wanita al-Makhzumiyyah yang bernama Fatimah binti al-Aswad bin 'Abdi al-Asad setelah melakukan

³² Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, tahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Juz III (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), h. 1311

pencurian. Kemudian Nabi SAW. berdiri menyampaikan khutbahnya yang menjelaskan akan bahaya perbuatan apa yang dimohonkan Usamah kepada Nabi SAW. Karena banyak orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israil yang binasa akibat dari penegakan hukum yang tidak adil. Mereka tegakkan hukum terhadap orang-orang lemah dan membiarkannya ketika yang melakukan adalah orang-orang yang mulia. Hal inilah yang tidak diinginkan Nabi SAW. terjadinya ketimpangan dalam penegakan hukum syariat Allah. Mendengar kemarahan Nabi SAW., Usamah langsung meminta maaf atas apa yang dilakukannya seraya berkata “mohon ampunilah aku wahai Rasulullah” maksudnya adalah agar kesalahannya tersebut dimaafkan dan Allah SWT. mengampuni dosanya. Kemudian Nabi SAW. memerintahkan untuk dipotong tangan wanita tersebut.³³

Ungkapan kedua “*waimullah lau anna Fatimah binta muhammadin saraqat laqatha'tu yadaha*” yaitu Demi Allah apabila Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya. Sumpah Rasulullah SAW. ini mengisyaratkan akan wajibnya dipotong tangan bagi seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Pada hadits tersebut juga bermakna bolehnya bersumpah tetapi bukan untuk niat bersumpah hanya saja untuk mengungkapkan bahwa sesuatu itu merupakan perkara yang besar.³⁴

Dari uraian di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum-hukum Allah haruslah diterapkan secara adil. Tidak memandang siapa yang menjadi pelaku kejahatan apakah ia seorang yang lemah ataupun yang mempunyai kedudukan mulia ditengah-tengah masyarakat. Dan ketika suatu perkara kejahatan sampai kepada hakim, maka hal itu tidak bisa dibatalkan hukumannya atau diberikan syafaat untuk diringankan. Maka *hudud* dalam hal ini wajib dilaksanakan kepada pelaku tindak kriminal dan bentuk hukuman serta kadarnya sudah ditentukan oleh Allah SWT yang tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Jika perkara belum sampai kepada hakim, maka boleh memberi syafaat jika pelaku tidak

³³ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 5, hal. 5

³⁴ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...* Juz 5, hal. 6

mempunyai riwayat kejahatan sebelumnya dan dapat dipastikan ia tidak akan mengulangnya lagi.³⁵

Hadits lain yang membahas tentang *hudud* seperti yang diriwayatkan oleh Abu Burdah al-Anshari ia menceritakan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.³⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah.". (HR. Muslim).

Hadits di atas menjadi dalil tentang makna *hudud* yang identik dengan hukuman pidana seperti pada lafazh *jild* dan *hudud*. Jika dilihat, keduanya disandingkan secara bersamaan dan mempunyai keterkaitan yang kuat. Dimana hukuman bagi para pelaku kejahatan di luar kategori *hudud* haruslah berada dibawah sepuluh kali deraan. Tetapi jika kejahatannya termasuk dalam kategori *hudud*, maka cambukan itu haruslah di atas sepuluh kali deraan. Al-

³⁵ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...* Juz 5, hal. 6

³⁶ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Musnad asShahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi), Juz 3, hal. 1332

Bassam mengomentari hadits tersebut bahwa terjadi perbedaan di antara ulama pada lafazh “*illa fi haddin min hududillah*”. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *hudud* pada hadits tersebut adalah hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah ditetapkan oleh syariat seperti mencuri, meminum khamr, berzina, menuduh wanita baik-baik berzina, dan lain sebagainya. Maka selain kategori kejahatan tersebut, termasuk hukuman *ta'zir* yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan oleh syariat serta maksimal hukuman cambuknya tidak lebih dari sepuluh deraan. Pendapat ini diwakili oleh madzhab Hanbali dan menjadi pendapat yang paling umum. Walaupun sebagian kelompok menginginkan hukuman *ta'zir* bagi pelaku maksiat sama dengan *hudud* yaitu bentuk dan kadarnya pasti dan tetap.³⁷

Hadits lain yang menjelaskan tentang *hudud* bermakna hukuman fisik yang kadarnya sudah ditentukan (*al-'uqubat al-muqaddarah*) seperti hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ³⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid. Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah *radhiallahu'anha* ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had". (HR. Abu Dawud).

³⁷ Al-Bassam, *Taysir 'ala Allāh min Syarh 'Umdah al-Ahkām*, (Beirut: Mathba'ah li Nasyr wa al-Dakwah, t.th), Juz II, h. 164.

³⁸ Abu Dawud Sulayman Ibn al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abû Dawûd*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th.), Juz IV, h. 232.

Hadits di atas memberikan perintah kepada seorang hakim agar memberikan keringanan hukum pidana atau pemaafan terhadap pelaku maksiat. Namun hal itu tidak berlaku jika kemaksiatan atau perbuatan kejahatannya mengarah kepada hukuman *hudud*.³⁹ Hadits di atas juga memberikan pemahaman bahwa kata *hudud* identic dengan hukuman fisik sebagaimana yang dijelaskan oleh ‘Abdu ar-Rouf al-Manawi bahwa bagi seorang hakim hendaknya memaafkan atau meringankan hukuman terhadap pelaku kejahatan kecuali pada ranah *hudud*. Dan seandainya ada pemberian maaf dari korban pelaku kejahatan, hal itu dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman.⁴⁰

Hadits berikutnya yang menegaskan bahwa *hudud* identik dengan hukuman pidana seperti hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيْعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشَقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَءُوا الْخُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُحْطَى فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْطَى فِي الْعُقُوبَةِ⁴¹.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari 'Urwah dari A'isyah ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, "*Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan*

³⁹ Abû Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhîm Âbâdî, *'Awn al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâwûd*, Tahqiq 'Abd al-Rahman Muhammad 'Utsman (Madinah Munawwarah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968 M/1388 H), Juz 9, h. 1507.

⁴⁰ Abd al-Ra'ûf al-Manâwî, *Faydl al-Qadîr Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*, (Mesir: Makatabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356 H), Juz 2, h. 294.

⁴¹ Muhammad Ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzî al-Silmî, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzî*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dkk (Beirut: Dar Ihya alTurats al-'Arabi, t.th.), Juz 4, h. 33.

keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman."

Hadits di atas diawali dengan kata *idro'u* yaitu hindarilah. Kata ini secara ilmu ushul fikih bermakna perintah yang wajib dilaksanakan. Artinya bagi seorang hakim haruslah berhati-hati dalam menerapkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang dimana kejahatan tersebut tidak bisa dibuktikan secara jelas. Maka dari sini, para *fuqaha* sepakat bahwa pelaksanaan *hudud* tidak bisa diterapkan jika tidak terpenuhinya saksi-saksi yang sudah ditentukan oleh syariat. Untuk syarat-syarat pelaku zina dapat dibuktikan dengan saksi 4 orang saksi laki-laki adil yang dirinya sangat menjaga dari hal-hal kemaksiatan dan melihat secara langsung perbuatan itu. Bagi seorang pencuri dapat dibuktikan dengan 2 orang saksi laki-laki adil, kadar harta yang dicuri, harta tersebut tersimpan di sebuah tempat, harta yang dicuri benar-benar milik orang yang dicuri, dan lain sebagainya. Jika semua syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka *hudud* tidak bisa dilaksanakan dan harus dicari solusi lain yaitu seorang hakim atau pemerintah untuk meninggalkan penerapan *hudud* dan memaafkan seorang yang tersangka. Karena salah dalam memaafkan masih lebih baik daripada salah dalam menghukum para tersangka kejahatan. Pada akhir matan hadits di atas disebutkan kata *al-'uqubat* yaitu hukuman, sedangkan di awal matan hadits disebutkan kata *hudud* hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud kata *hudud* pada hadits tersebut adalah hukuman fisik.⁴²

Hadits lain yang lebih spesifik dalam menjelaskan *hudud* dalam artian pidana dan pembedaan saja adalah seperti yang diriwayatkan oleh Anas *radhiyallahu 'anha*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضْرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ

⁴² Junaidi Abdillah, *Diskursus Hudud dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud)*, Jurnal al-Hikam, Vol. 13, No. 2 Desember 2018, h. 15-16

نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
كَأَخَفِ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ⁴³.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata; *Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas dari Nabi SAW. bahwa beliau didatangi seseorang yang telah meminum khamr, lalu beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, dilakukan juga oleh Abu Bakr. Ketika Umar bermusyawarah dengan orang-orang, maka Abdurrahman bin Auf berkata; Seperti hukuman paling ringan yaitu delapan puluh kali. Maka Umar memerintahkannya.* (HR. at-Tirmidzi)

Secara tekstual hadits di atas memberikan pemahaman bahwa *hudud* identik dengan hukuman pidana yang mengarah kepada fisik. Hal itu dapat dilihat pada lafazh hadits yang sangat tegas *fadharabahu bijaridatain* yaitu Nabi SAW. memukul orang peminum khamr dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Pada akhir matan hadits juga tercantum kata *hudud* hal ini juga menguatkan bahwa term *hudud* merupakan hukuman bagi pelaku kejahatan yang dimana bentuk dan kadarnya sudah ditetapkan oleh syariat sehingga tidak bisa ditambah maupun dikurangi.⁴⁴

Dari pemaparan ayat al-Qur'an dan hadits di atas yang berbicara tentang *hudud*, keduanya mempunyai perbedaan. Pembahasan *hudud* dalam al-Qur'an tidak identik dengan hukuman pidana para pelaku kejahatan tetapi sifatnya umum bisa mencakup permasalahan ibadah, perceraian, waris, kafarat, dan lain sebagainya. Sedangkan pembahasan *hudud* dalam hadits identik dengan hukuman pidana yang ketentuan dan kadarnya sudah ditentukan oleh syariat dan wajib dijalankan.

⁴³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th.), Juz 4, h. 28.

⁴⁴ Junaidi Abdillah, *Diskursus Hudud...* Jurnal al-Hikam, Vol. 13, No. 2 Desember 2018, h. 17

D. Macam-macam Tindak Kejahatan yang Dikenai Hukum Pidana *Had*

Tidak semua bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang dikenai hukum pidana *had*. Dibawah ini akan dijelaskan macam-macam dan perbedaan para ulama mengenai tindak kriminal yang dapat dijatuhkan hukum pidana *had* kepada pelakunya:⁴⁵

a) Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab ini perbuatan jahat yang mengharuskan pelakunyal dikenai hukum pidana *had* ada tujuh yaitu: 1) Luka-luka (*al-jarah*), 2) Pembangkang (*bughat*), 3) Murtad, 4) Zina, 5) Menuduh orang lain berzina (*qadzaf*), 6) Pencurian, 7) Minuman yang diharamkan

b) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab ini yang wajib dikenai *had* adalah tindak kriminal yang ditetapkan oleh al-Qur'an yaitu hanya lima: 1) Zina, 2) Pencurian, 3) Minum *khamr*, 4) Perampok, 5) *Qadzaf*. Sedangkan pada kasus *qishah* dalam madzhab ini tidak menganggap sebagai *had* disebabkan *qishah* itu hubungannya sesama manusia. Begitu juga dengan *ta'zir* mereka tidak menyebutnya sebagai *had* karena bentuk hukumannya tidak ditetapkan secara jelas. Tetapi pada sebagian madzhab ini perbuatan sihir juga masuk pada bagian dari *hudud*.

c) Madzhab Maliki

Dalam madzhab ini mengkategorikan kejahatan yang dikenai *had* ada delapan macam yaitu: 1) Perbuatan kejahatan terhadap jiwa, 2) Pembangkangan, 3) Murtad, 4) Zina, 5) *Qadzaf*, 6) Pencurian, 7) Membuat kerusakan, 8) Minum *khamr*.

E. Tindak Pidana Pelaku Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbuatan zina merupakan tindak kriminal yang sangat keji. Zina sendiri bermakna persetubuhan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang *mukallaf* tanpa adanya paksaan dan *syubhat* yang dimana benar-benar terjadi

⁴⁵ Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...* Juz 5, hal. 12-13

dukhul (masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan) dan keduanya tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah.

Menurut syariat Islam pelaku kejahatan zina terbagi menjadi dua yaitu yang berstatus *muhshan* (pezina yang telah menikah) dan *ghairu muhshan* (pezina yang belum menikah). Keduanya pun berbeda dalam penanganan hukumannya yang dimana bagi seseorang yang berstatus *muhshan* harus dirajam sampai mati sedangkan yang berstatus *ghairu muhshan* dicambuk sebanyak seratus kali. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para imam dan sudah ditetapkan melalui sabda Rasulullah SAW. “*Seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah kemudian melakukan zina, maka rajamlah keduanya sebagai bentuk hukuman dari Allah*”. (HR. Bukhari Muslim).⁴⁶

Definisi *muhshan* itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai kriteria-kriteria yang sudah menjadi kesepakatan para ulama seperti ia sudah merdeka, baligh, berakal, telah menikah dengan akad yang sah, dan terjadinya *dukhul* yang dibolehkan padanya persetubuhan. Sedangkan seseorang yang masih anak-anak, budak, tidak berakal, menikah dengan jalan yang tidak sah, menyetubuhi istrinya tidak pada kemaluannya tetapi pada anusya, maka ia tidak dinyatakan sebagai *muhshan*.⁴⁷

Zina menurut hukum positif memiliki makna yang berbeda dengan makna menurut syariat Islam. Dalam pasal 284 KUHP ayat (1) seseorang difonis telah melakukan zina harus ada unsur kesengajaan dalam melakukannya. Artinya unsur kesengajaan ini harus dibuktikan di depan hakim. Selain itu, antara kelamin laki-laki dan perempuan benar-benar terjadi hubungan yang nyata sehingga jika jenis kelaminnya sama maka hal ini tidak disebut dengan delik perzinaan. Syarat lainnya seseorang yang sudah mempunyai suami/istri dikatakan telah melakukan zina ketika tidak ada persetujuan di antara keduanya. Artinya jika keduanya mempunyai persetujuan seperti suaminya berprofesi sebagai mucikari/germo dan istrinya sebagai pelacur maka keduanya tidak dikatakan telah melakukan delik zina.

⁴⁶ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...*, Juz 5, hal. 57

⁴⁷ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...*, Juz 5, hal. 55

Sedangkan bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang belum menikah kemudian melakukan hubungan seks maka keduanya tidak disebut dengan zina.⁴⁸

Sedangkan tindak pidana pelaku zina terancang dalam KUHP 2015 yang diatur dalam pasal 484 angka (1) sampai (5) yang berbunyi:

- a. Tindak pidana bagi pelaku zina dihukum penjara paling lama 5 tahun. Rinciannya sebagai berikut:
 - 1) Seorang lelaki yang sudah terjalin dalam ikatan perkawinan lalu melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan menjadi istrinya
 - 2) Seorang perempuan yang sudah terjalin dalam ikatan perkawinan lalu melakukan persetubuhan dengan lelaki yang bukan menjadi istrinya
 - 3) Seorang lelaki yang belum menjalin ikatan perkawinan, melakukan perzinaan dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah memiliki ikatan perkawinan
 - 4) Seorang perempuan yang belum menjalin ikatan perkawinan, melakukan perzinaan dengan seorang lelaki yang diketahuinya telah memiliki ikatan perkawinan
 - 5) Seorang lelaki dan perempuan melakukan perzinaan dimana keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah.
- b. Pada kasus tindak pidana ayat (1) yang hanya dapat melakukan penuntutan adalah suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar
- c. Pada hal pengaduan sebagaimana yang tertulis pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang definisi

⁴⁸ Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budhi Wisaksono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan*” Jurnal Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016, hal. 2

atau kategori seseorang dapat dikatakan telah melakukan zina dan hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum Islam tidak membedakan antara seseorang telah menikah atau belum menikah jika sudah melakukan persetubuhan maka ia dikatakan telah berzina. Sedangkan menurut hukum positif hanya bagi yang sudah menikah yang dikatakan berzina jika melakukan persetubuhan. Bentuk hukuman menurut Islam dicambuk dan dirajam sedangkan menurut hukum positif dipenjara paling lama 5 tahun.

F. Tindak Pidana Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Definisi pencurian menurut hukum Islam ialah seseorang yang mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, harta atau barang yang diambil mencapai *nishab*. Pencurian tersebut dilakukan oleh seorang yang sudah sampai baligh, berakal, melakukannya dengan kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan. Jika syarat-syarat tersebut ada pada seorang pencuri maka ia wajib dijatuhkan *had* potong tangan.⁴⁹

Hukuman bagi seorang pencuri dalam hukum Islam adalah dipotong tangannya hal ini sudah ditegaskan dalam surat al-Maidah:38 yang berbunyi: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”*. Hukum potong tangan bagi pencuri tidak hanya ditetapkan oleh al-Qur’an melainkan juga dari hadits dan ijma’ para ulama sehingga ketetapan ini sangatlah kuat.⁵⁰ Namun demikian ia tidak bisa langsung dijatuhkan hukuman potong tangan tanpa melalui sebuah pengakuan dirinya yang sudah baligh dan berakal atau adanya 2 orang saksi laki-laki adil yang menyaksikan perbuatannya.⁵¹

Dalam kasus pencurian ini, Islam memberikan beberapa sifat yang harus diperhatikan agar tidak sembarang dalam menerapkan *had* potong tangan pada seorang pencuri. Sifat-sifat tersebut meliputi syarat/kategori seorang pencuri,

⁴⁹ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...*, Juz 5, hal. 141

⁵⁰ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...*, Juz 5, hal. 138

⁵¹ Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...*, Juz 5, hal. 147

kategori sesuatu yang dicuri, dan pada tempat yang menjadi aksi pencurian. Sebagai rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:⁵²

a) Syarat bagi seorang pencuri:

1. Baligh. Jika yang mencuri seorang anak kecil yang usianya belum sampai baligh maka tidak dikenai *had* karena ia belum *mukallaf*
2. Berakal. Jika yang mencuri seorang yang gila, maka ia tidak dikenai *had* potong tangan
3. Pencuri sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta yang dicuri. Karena itu seorang ayah tidak boleh dipotong tangannya ketika mencuri harta dari anaknya begitupun sebaliknya.
4. Seorang pencuri tidak mempunyai hak perwalian. Apabila yang mencuri adalah seorang budak kepada tuannya atau tuan kepada budaknya, maka keduanya tidak dikenai *had* potong tangan karena dianggap mengambil hartanya sendiri
5. Tidak menjadi seorang prajurit di medan perang karena itu ia boleh mengambil harta rampasan perang dan hendaknya seorang pencuri melakukannya atas kehendaknya sendiri bukan karena dipaksa.

b) Kriteria harta/barang yang dicuri:

1. Harus sampai nisab. Apabila seorang pencuri mengambil harta kurang dari nisab maka ia tidak dikenai *had* potong tangan. Terkait nisab ulama berbeda pendapat. Madzhab Hanafi nisab harta yang dicuri minimal 1 dinar atau setara 10 dirham yang dicetak secara murni atau barang yang dicuri seharga salah satu dari keduanya dan hendaknya barang yang dicuri laku untuk dijual. Madzhab Maliki nisab *had* pencurian senilai 3 dirham yang dicetak secara murni. Madzhab Syafi'i senilai seperempat

⁵² Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jazairi, *al-Fiqihu...*, Juz 5, hal. 139-140

dinar. Sedangkan Madzhab Hanafiyah senilai seperempat dinar atau tiga dirham

2. Barang yang dicuri harus sesuatu yang bernilai dan berharga serta halal untuk diperjual belikan. Apabila yang dicuri sesuatu yang haram seperti babi, khamr, alat musik dan lain sebagainya maka tidak dikenai *had*
 3. Barang yang dicuri tidak menjadi milik si pencuri atau ia mempunyai hak di dalamnya. Apabila seorang pencuri mencuri barang dari harta rampasan atau mencuri dari Baitul Mal maka tidak dipotong tangannya
 4. Hendaklah barang tersebut sah untuk dicuri seperti hamba sahaya yang masih kecil atau dewasa yang tidak mengerti bahasa setempat. Karena jika yang dicuri merupakan seorang hamba sahaya yang fasih dalam berbicara maka tidak dikenai *had*.
- c) Tempat dari barang yang dicuri haruslah tempat yang memang menjadi penyimpanan yang aman dari pencurian. Seperti rumah, toko, punggung hewan, di dalam kapal, tempat domba di pasar hewan dan lain sebagainya.

Sedangkan pencurian dalam hukum positif memiliki arti kejahatan yang dilakukan secara sengaja dengan mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum.⁵³ Larangan perbuatan ini diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab 12 tentang kejahatan terhadap harta dari pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Jika dikelompokkan menjadi beberapa jenis pencurian diantaranya pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam ranah keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Dari berbagai macam jenis pencurian, tindak

⁵³ *Kamus Hukum*, Citra Umbara Bandung, 2008,

hukum pidananya pun beragam melihat dari cara mencurinya, tempat dan waktu dari aksi pencurian.⁵⁴

Adapun bentuk hukuman pidana bagi seorang pencuri diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi hukuman seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵⁵

Dari perbedaan penanganan pada kasus pencurian dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif sangat jelas, dimana Islam memotong tangan pelaku pencurian sedangkan hukum positif memenjarai dan menjatuhkan denda pada pelaku.

G. Dialektika Sarjana Muslim tentang Konsep Hudud

Perdebatan tentang konsep *hudud* kalangan para ulama masih menjadi problematika internal tubuh kaum muslimin. Sebagian ulama berpandangan bahwa konsep *hudud* yang ditetapkan oleh Islam sudah final dan tidak bisa diubah baik dari bentuk hukuman maupun kadarnya. Sedangkan beberapa ulama kontemporer berpandangan bahwa perlunya kontruksi konsep *hudud* pada zaman sekarang ini karena bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadits hanya relevan pada zaman keduanya baru diturunkan. Jika bentuk hukuman *hudud* seperti potong tangan, cambuk, melempar batu sampai meninggal itu diterapkan pada zaman sekarang maka akan menimbulkan gambaran bahwa Islam sangat kejam dan tidak manusiawi. Oleh karena itu agar ayat dan hadits yang berbicara tentang penerpanan *hudud* dapat diamalkan, perlu adanya kontruksi dan penafrisan ulang terhadap teks-teks tersebut menyesuaikan kondisi dan waktu di suatu tempat. Pandangan lain juga ada yang berpendapat bahwa *hudud* pada hakikatnya disyariatkan bukan untuk dijalankan melainkan untuk ditinggalkan karena beberapa alasan yang

⁵⁴ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undangn Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017, hal. 7

⁵⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.2, Sinar Grafik, Jakarta, 207, hal. 22

menghendakinya. Pada sub bab ini penulis akan memaparkan beberapa pandangan ulama tentang *hudud*:

a. Pandangan Para Ulama Tentang Syariat *Hudud* Yang Sudah Final:

- 1) Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Nailu al-Authar* mendefinisikan bahwa *hudud* merupakan hukuman-hukuman fisik yang telah ditetapkan oleh Allah baik secara bentuk maupun kadarnya serta *hudud* merupakan hak Allah. Sedangkan *ta'zir* dan *qishah* adalah bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan yang tidak ditentukan kadarnya dan merupakan hak Adam.⁵⁶
- 2) Taqi ad-Din Abu Bakr dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* menggambarkan bahwa *hudud* pada masa awal Islam datang hanya berbentuk denda-denda uang yang kemudian Islam menghapusnya. Kemudian *hudud* menjadi hukuman fisik dan merupakan batasan-batasan Allah untuk mencegah terjadinya pelaku kejahatan. Karena itu Allah sendiri yang menentukan bentuk hukuman dan kadarnya sehingga tidak boleh untuk ditambah maupun dikurangi.⁵⁷
- 3) Muhammad Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Alfāz al-Minhaj* mengatakan bahwa tindak kejahatan yang masuk dalam kategori *hudud* merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Pada *hudud* terdapat dikotomi antara hak Allah dan Adam sehingga tidak diperbolehkan bagi manusia untuk mengubah atau menambahkan dan mengurangi pada konsep *hudud* yang telah Allah tetapkan.⁵⁸
- 4) Abdu al-Qadir 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyri al-Jina'i Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl'I* menganalisa bahwa *hudud* merupakan ancaman hukuman kepada pelaku kejahatan yang dimana bentuk hukumannya

⁵⁶ Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syawkânî, *Nayl al-Authâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhabâr*, (Damaskus: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, 1966), Juz 7, h. 146.

⁵⁷ Taqî al-Dîn Abû Bakr Ibn Muhammad al-Husaynî al-Hashna al-Dimasqî al-Syâfi'î, *Kifâyah al-Akhyâr fî Hill Ghâyah al-Ikhtishâr*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 2, h. 178.

⁵⁸ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni al-Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4, h. 155.

bersifat tetap dan pasti maka *hudud* tidak memberikan ruang untuk menerima perubahan jenis hukuman. Beliau juga menjelaskan perbedaan karakteristik antara *hudud* dengan hukuman pidana lainnya yaitu:⁵⁹

- a) Jenis hukuman *hudud* dan kadarnya sudah final tidak bisa ditambah dan dikurangi
- b) Pada pelaksanaan *hudud*, seorang hakim maupun korban tidak boleh memberikan maaf kepada pelaku kejahatan jika perkara itu sudah sampai pada hakim. Lain halnya jika perkara itu belum sampai kepada hakim, maka korban boleh untuk memaafkan pelaku kejahatan namun hanya beberapa bentuk kriminal saja.
- c) Pelaksanaan *hudud* merupakan hak daripada Allah yang dimana hak tersebut sifatnya umum untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di antara manusia.

5. Muthi'ullah Dakhilullah Sulaiman as-Shurhaidi al-Luhaibi dalam kitabnya *al-'Uqubat al-Muqaddarah wa Hikmatu Tasyri'iha fi Dlaui al-Kitab wa as-Sunnah* mengatakan hal yang senada bahwa syariat *hudud* merupakan syariat yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah dan para ulama fikih sepakat bahwa jenis hukumannya sudah tetap dan final tidak mengalami perubahan.⁶⁰

Dari pemaparan menurut para ulama di atas dapat mengantarkan kepada sebuah pemahaman bahwa terma *hudud* adalah syariat di antara syariat-syariat Allah yang wajib dilaksanakan dalam aspek hukuman terhadap pelaku kejahatan. Selain dari hukumnya yang bersifat wajib, jenis dan bentuk hukuman *hudud* yang telah ditetapkan merupakan hal yang sudah final dan pasti sehingga tidak boleh ada campur tangan manusia untuk mengubahnya karena *hudud* adalah hak Allah yang akan mengantarkan kepada kemaslahatan umum.

⁵⁹ Abdu al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri al-Jina'i Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl'i*, (Beirut: Dar al-Risalah al-Mu'assasah, 1996), Juz 3, h. 375

⁶⁰ Muthi'ullah Dakhilullah Sulaiman al-Shurhaidi al-Luhaibi, *al-'Uqubat al-Muqaddarah wa Hikmatu Tasyri'iha fi Dlaui al-Kitab wa as-Sunnah* (Jeddah: Tihama, 1983), 44-45.

b. Pandangan Para Sarjana Muslim Tentang Perlunya Dekonstruksi Dan Reinterpretasi Konsep *Hudud*:

- 1) Fazlur Rahman seorang cendekiawan muslim dari Pakistan. Dalam memahami teks-teks al-Qur'an ia terkenal dengan metodenya yang disebut dengan *double movement* yaitu sebuah metode pendekatan kritik sejarah khususnya pada permasalahan *hudud* ini. Metode tersebut mempunyai tiga unsur: *pertama*, pendekatan kritik sejarah untuk menemukan makna yang dimaksud dari ayat-ayat al-Qur'an, *kedua*, mengkontekstualisasikan teks-teks al-Qur'an, *ketiga*, memperhatikan sosiologis masyarakat ketika teks itu diturunkan.⁶¹ Dalam permasalahan *hudud* ini, Fazlur Rahman menekankan untuk menggunakan pendekatan sosiologi sistematis. Seperti misalkan hukum potong tangan bagi pencuri, sebenarnya sudah ada pada suku-suku sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah datangnya Islam, diadopsilah hukuman potong tangan sebagai ketetapan bagi pelaku pencurian. Kondisi sosial saat itu dengan diberlakukannya potong tangan, tidak dianggap sesuatu yang kejam. Namun hal itu berbeda jika diterapkan di zaman modern ini. Karena itu Fazlur Rahman menekankan perubahan hukuman potong tangan bagi pencuri.⁶²
- 2) Abdullah Ahmed an-Na'im yang terkenal dengan teori dekonstruksinya berpandangan bahwa syariat-syariat yang ada di Islam tidak sepenuhnya murni dari Islam melainkan ia hasil daripada representasi para ulama. an-Nai'm sangat menggugat pandangan skaralisasi terhadap teks.⁶³ Pendekatan dekonstruksi

⁶¹ Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives" dalam International Journals of Middle East Studies, Vol. I, tahun 1970, h. 329-330.

⁶² Fazlur Rahman, "The Concept of Hadd in Islamic Law" dalam Islamic Studies Journal, Vol. IV, No. 3 September 1965, h. 237.

⁶³ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1996) h. 14 dan

yang digunakan an-Nai'm ini untuk menyesuaikan teks-teks yang ada di al-Qur'an dan hadits dengan kondisi saat ini. Dalam permasalahan *hudud* atau hukum pidana Islam yang paling baik adalah bukan berdasarkan atas ketentuan Tuhan, melainkan adanya relevansi dengan realitas yang konkrit sehingga dapat menyelesaikan masalah sesuai zamannya dan tepat sasaran. Karena menurut an-Na'im sesuatu disebut sempurna jika melakukan pengembangan dan perubahan sesuai dengan konteks kekinian. Dari sini perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat dan hadits yang berbicara tentang *hudud*.⁶⁴

- 3) Muhammad Syahrur ad-Dayyub dengan teori batasnya berpandangan bahwa di dalam syariat Islam mempunyai ketentuan yang disebut dengan batas minimal dan batas maksimal (*al-hadd al-adna wa al had al-a'la*). Dari teori tersebut menghasilkan hukum pidana yang melebihi atau kurang dari batas-batas yang telah ditentukan maka tidak sah dan harus menjatuhkan hukuman sesuai proporsinya.⁶⁵ Ia mencontohkan bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan hukuman batas maksimal yang tidak boleh lebih tetapi boleh menghukum kurang dari itu.⁶⁶ Artinya pandangan Syahrur ini masih membolehkan hukuman selain potong tangan bagi pencuri.
- 4) Ibrahim Hossen dengan teori *zawajir* nya (pencegahan) berpendapat bahwa hukum potong tangan, rajam, cambuk dan lain sebagainya yang ada pada *hudud* merupakan sarana bukan sebuah tujuan. Sedangkan tujuan dari pada *hudud* itu adalah

Lihat juga Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah*, terj. Sri Murniati (Bandung: Mizan, 1997), h. 27.

⁶⁴ Junaidi Abdillah, *Gagasan Reaktualisasi*...h. 8

⁶⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Alqur'an; Qira'ah Mu'asharah* (Damaskus: al-Ahali, 1990) h. 580.

⁶⁶ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul al-Fiqh Madzhab Sunni) terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 366-369.

membuat pelaku kejahatan menjadi jera sehingga menjadikan orang lain takut untuk melakukannya. Ketika hukuman-hukuman itu tidak memberikan efek jera, maka harus memberlakukan hukuman lain. Artinya *hudud* itu sangat relatif menyesuaikan tempat dan waktu serta bisa diubah dan dikontekstualisasikan.⁶⁷

- c. Pandangan Ulama Tentang *Hudud* Pada Hakikatnya Untuk Ditinggalkan
Pendapat ini diwakili oleh Syekh Ali Jum'ah dan muridnya yaitu Syekh Sayyid Usamah al-Azhari. Syekh Usamah mengatakan bahwa hukum pidana dalam Islam pada hakikatnya mencegah untuk dilaksanakan karena syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam sangat sulit untuk dijalankan.

إن الحدود شرعت لتدراً لا لتطبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إدروا الحدود

بالشبهات. يعني الأصل فيها قيدت بضوابط في الإثبات في غاية العسر والصعوبة

والمشقة. كأن أمرت بها لا يتم إيقاعها في الحقيقة⁶⁸

Sesungguhnya *hudud* disyariatkan untuk ditinggalkan bukan untuk dilaksanakan. Nabi SAW bersabda *tinggalkanlah hudud jika terjadi kesamaran*. Pada hadits ini mengandung pesan bahwa pada dasarnya penerapan *hudud* diikat oleh syarat-syarat yang sangat sulit dan berat untuk dipenuhi. Seakan-akan kita diperintahkan untuk melaksanakan *hudud* tetapi pada hakikatnya kita tidak bisa memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian beliau melanjutkan:

باب العقوبة بأكمله أساسه من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب

التكليف. خطاب الوضع مرتبط بمراعات الأسباب والموانع والشروط والعلل.⁶⁹

⁶⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 86-87. Lihat juga dalam karya Ibrahim Hosen, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Harapan, 1990) h. 126-128.

⁶⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=fz8bZl8Ry9I&t=66s>

⁶⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=fz8bZl8Ry9I&t=66s>

Bab hukum pidana secara keseluruhan pada dasarnya termasuk bab *khitob wadh'i* bukan termasuk dari bab *khitab at-Taklif*. *Khitab wadh'i* itu terikat dengan memperhatikan sebab-sebab, larangan-larangan, dan syarat-syarat. Selain itu ia mengutip pernyataan dari Khalid Muhammad Khan untuk menguatkan pandangannya:

خالد محمد خان لما عمل الكتاب نشرها في أربعينيات يقول: نظام العقوبات في

الإسلام يحمل في ثناياه موانع تنفيذه

Khalid Muhammad Khan ketika menulis kitab "Nasyaru Fii Arba'iinat" mengatakan: aturan hukuman fisik dalam Islam pada hakikatnya mencegah untuk dilaksanakan

Beliau melanjutkan, penerapan *hudud* pada zaman Nabi SAW. hanya untuk menjelaskan cara pelaksanaannya jika memang *hudud* itu harus ditegakkan dan terpenuhi semua syarat-syaratnya. Bahkan ketika seseorang melakukan sebuah kejahatan dan perkaranya sampai kepada hakim kemudian akan ditegakkan *had* atasnya maka terbuka 23 pintu maaf yang bisa mengeluarkannya. Dan juga seandainya seseorang melarikan diri saat pelaksanaan hukuman atasnya maka jangan menangkapnya. Karena ketika ia sudah merasakan sakitnya hukuman tersebut yang menyebabkan ia melarikan diri, *had* sudah dianggap terlaksana. Hal ini disebabkan syariat sendiri pada hakikatnya tidak bernafsu untuk menghukum para tindak kriminal dan menjatuhkannya ke dalam hukuman fisik. Penjelasan ini dapat dilihat sebagai berikut:⁷⁰

الحدود للزواج والجواهر معا يعني تزجر الإنسان عن الوقوع في المعصية فإن تلبس

وجاء إلى إقامة الحد فتح عشرين وثلاثين باب من العذر يخرج منها إذا فر أثناء

إقامة الحد فلا تتبعوه. إذا وصل الإنسان إلى حد من الألم جعله يجري ارتفاع الحد

⁷⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=fz8bZl8Ry9I&t=66s>

خلاص. كأن الشرع الشريف متشوف إلى التشنيع على الناس وإلى إيقاع العقوبة بهم وإلى إيقاع الألم لهم. فالحقيقة ليس كذا لك.

Dari penjelasan Syekh Usamah al-Azhari ini memberikan pemahaman bahwa *hudud* bisa dilaksanakan ketika ada sebab-sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi. Jika sebab itu tidak ada, maka *hudud* tidak bisa dilaksanakan. Seperti shalat subuh disyariatkan ketika datang dan masuk waktu fajar. Namun ketika fajar itu belum datang maka shalat subuh tidak bisa dilaksanakan bahkan tidak boleh. Begitu juga *hudud* dalam pandangan beliau disyariatkan untuk ditinggalkan bukan untuk dilaksanakan.

H. Penerapan Hudud di Beberapa Negara Islam

Terdapat beberapa negara yang sudah menjalankan dan menerapkan *hudud* seperti Pakistan, Afghanistan, Sudan, Iran, Arab Saudi, salah satu wilayah di Nigeria, Malaysia, dan Indonesia. Di antara beberapa negara tersebut ada yang menerapkannya sampai sekarang ada pula yang menanggukkan penerapan *hudud* dan diganti dengan hukuman-hukuman *ta'zir*. Jika dilihat berlangsungnya penerapan *hudud* di negara-negara tersebut, justru banyak sekali terjadi konflik internal. Seperti pada tahun 1983 ketika sistem *hudud* ini diperkenalkan di Sudan Selatan, terjadi puluhan ribu orang meninggal diakibatkan perang saudara antar warga negaranya. Menurut John Esposito kebijakan pemerintah Sudan tentang penerapan *hudud* membuat resah warganya bahkan tingkat internasional. Sehingga dianggap oleh beberapa pihak bahwa kebijakan tersebut lebih kepada memecah belah warga negara Sudan dibanding mempersatukannya. Dua negara seperti Afghanistan dan Pakistan terjadi ledakan bom setiap saat disebabkan pemahaman yang kaku dan dangkal terhadap syariat. Pada tahun 1979 dengan diterapkannya *hudud* ini di Iran, banyak di antara kelompok Syi'ah yang risih dengan sikap para ulama yang munafik dan hanya memandang *hudud* sebagai formalisasi syariat. Di Nigeria Utara juga terjadi konflik internal berdarah antara kelompok Wahabi garis keras yang memaksa pemerintah untuk menerapkan

syariat *hudud*. Menurut data pada tahun 1999-2002 ketika pertama kali diperkenalkan syariat *hudud*, terjadi konflik agama yang mengakibatkan lebih 6000 orang meninggal. Sedangkan di wilayah Kaduna pada tahun 2000 terjadi kerusuhan yang mengakibatkan sebanyak 2000 orang meninggal dunia disebabkan penerapan syariat *hudud* ini.⁷¹

Penerapan Syariat *hudud* di perundang-undangan negara seperti yang telah dipaparkan di atas, membuktikan bahwa sangat sulit untuk menerapkan syariat *hudud* secara baik dan benar di level nasional maupun internasional. Hukuman yang mengarah kepada fisik seperti potong tangan, rajam, dera dan lain sebagainya bagi pelaku kejahatan, memiliki permasalahan yang tidak terselesaikan baik secara prosedural maupun hak asasi manusia. Hukuman-hukuman tersebut dianggap tidak manusiawi, kejam, dan bertentangan dengan kondisi kehidupan yang damai ini. Ditambah lagi jika penegak hukum tersebut tidak memiliki pemahaman yang benar terkait syariat *hudud* maka yang terjadi hanya hawa nafsu untuk mengeksekusi para pelaku kejahatan dan masyarakat hanya dijadikan objek dari penegakan syariat ini sehingga lupa dari tujuan mulia syariat Islam secara umum.

I. Teori Hermeneutik Hans Georg Gadamer

Hans Georg Gadamer merupakan tokoh filosof yang cukup besar di masanya. Ia lahir pada tahun 1900 di Marburg German dan meninggal pada tahun 1998. Guru Gadamer yang banyak memberikan pengaruh pada ilmu filsafatnya adalah Martin Heidegger. Ia juga mempunyai dua guru lainnya seperti Nikolai Hartman dan seorang pakar teolog protestan yaitu Rudolf Bultman.⁷²

Gadamer memiliki karya buku yang sangat fenomenal pada tahun 1960 yang berjudul "*Truth and Method*" yaitu kebenaran dan metode. Buku ini sebagai penyempurna dari pemikiran gurunya yaitu Heidegger yang berjudul "*Being and Time*". Dari karyanya tersebut dapat mempengaruhi di banyak

⁷¹ <https://acehinstitute.org/pojok-publik/agama/syariat-islam-dalam-negara-kontenporer.html>

⁷² E.Sumaryono, *Hermeneutik (Sebuah Metode Filsafat)*, (Yogyakarta:Kasinus,1999), h,67.

ilmu-ilmu kemanusiaan seperti sejarah, teori kesusatran sosiologi, telogi, filsafat ilmu pengetahuan alam, dan hukum.⁷³

Tradisi hermeneutik filosofisnya Gadamer adalah bahwa sebuah penafsiran yang dilakukan terhadap teks tersebut menyesuaikan dengan sebuah situasi dan kondisi si penafsir.⁷⁴ Karena dalam pandangan Gadamer, seorang penafsir pasti mempunyai tradisi sebelumnya yang melatarbelakangi pemahamannya sehingga menghasilkan pemahaman subjektifitas sang penafsir.

Gadamer mempunyai sebuah teori dan metode untuk memperoleh pengetahuan. Dalam teorinya tersebut terdiri dari empat tahapan untuk memahami sebuah teks yaitu:⁷⁵

- 1) Teori *Historically Effected Consciousness* atau Kesadaran oleh Sejarah.

Pada teori ini, seorang penafsir dalam memahami sebuah teks sebenarnya dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya seperti pengalaman hidup, kultur, atau tradisi. Sebab itu kesadaran ini penting dirasakan dan dipahami bagi seorang penafsir. Sadar atau tidak sejarah keterpengaruhan memiliki peran atau andil penting bagi seorang penafsir. Pada teori ini menekankan keniscayaan adanya subjektifitas seorang penafsir dalam memahami makna teks atau pengetahuan.

- 2) Teori *Pre-Understanding* atau Prapemahaman dan Teori Lingkaran Hermeneutik

Pada teori kedua ini menjelaskan tentang bagaimana seorang penafsir mempunyai prapemahaman terhadap suatu teks sebagai modal awal untuk memahaminya secara benar. Tanpa memiliki prapemahaman ini, seorang penafsir tidak akan memahaminya dengan baik. Prapemahaman ini juga harus terbuka untuk menerima kritik, koreksi, dan rehabilitas oleh penafsirnya sendiri ketika ia sadar prapemahamannya tidak sesuai dengan pesan yang ada

⁷³ Abdullah A. Thalib, *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika*, (Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2018), h. 190

⁷⁴ Abdullah A. Thalib, *Filsafat Hermeneutika...*, h. 192

⁷⁵ Abdullah A. Thalib, *Filsafat Hermeneutika...*, h. 196

dalam teks. Hasil daripada koreksi tersebut menghasilkan kesempurnaan pemahaman.

3) Teori *Fusion of Horizons* atau penggabungan Horison

Pada teori ketiga ini menjelaskan tentang seorang penafsir harus senantiasa memperbaharui prapemahamannya. Teori ini dalam prosesnya menggabungkan pengetahuan yang ada di dalam teks dengan pengetahuan yang ada pada sang penafsir. Artinya teks mempunyai horisonnya sendiri dan seorang penafsir mempunyai horisonnya tersendiri yang berbeda dengan horison yang ada dalam teks sehingga kedua horison ini harus dikomunikasikan agar tidak terjadi benturan dan dapat didamaikan. Dari asimilasi horison tersebut akan menghasilkan makna yang baru.

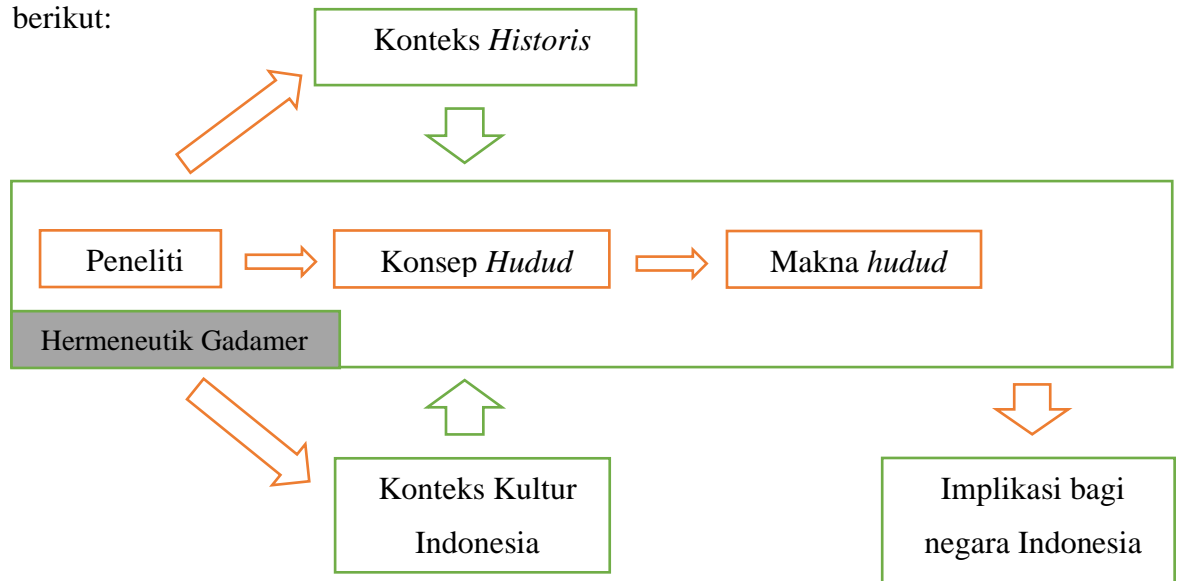
4) Teori *Application* atau Penerapan

Pada teori keempat ini Gadamer menyebutkan bahwa hermeneutik bukan hanya sebuah metode untuk mencari kebenaran tetapi hermeneutik merupakan pengalaman yang dalam eksistensinya selalu ada dalam aktifitas manusia yang tidak mungkin lepas darinya. Karena itu sebuah kebenaran tidak lagi ditandai dengan adanya sebuah korelasi atau kesesuaian antara teori dan realitas objektif, melainkan tersingkapnya hakikat atau esensi sesuatu.

Hermeneutik yang digagas oleh Gadamer ini termasuk hermeneutik subjektif dimana seorang penafsir tidak perlu masuk terhadap pemahaman yang ada pada pengarang teks karena dalam hal ini pengarang sudah dianggap mati dalam kepengarangannya terhadap teks. Dalam hermeneutik subjektif ini juga, teks akan disifati sebagai teks yang terbuka lebar untuk diinterpretasi oleh penafsir sehingga bukan memproduksi wacana ulang akan tetapi memproduksi wacana baru yang sesuai dengan subjektifitas sang penafsir dan konteks saat ini.

J. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut:



Bagan 1: Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, peneliti akan memaknai *hudud* dengan dua perspektif. *Pertama* menurut perspektif Ali Jum'ah dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*. Makna *hudud* akan dilihat secara konteks *historis*-nya. *Kedua*, pemaknaan *hudud* menurut konteks kultur di Indonesia dengan pendekatan filsafat hermeneutik dalam teorinya Hans Georg Gadamer. *Ketiga*, Menghubungkan pemikiran Ali Jum'ah dengan konteks negara Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Karena dengan metode inilah peneliti mampu meneliti suatu objek secara sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan sederet cara atau metode ilmiah yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data untuk melakukan sebuah penelitian.⁷⁶ Berikut adalah metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian tesis ini:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan. Artinya penelitian ini menggunakan buku/literatur sebagai sumber datanya dan meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam tesis. Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.⁷⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dimana objek kajian dalam penelitiannya berupa non-angka,⁷⁸ dan penulis berupaya untuk mendeskripsikan pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* dan implikasinya bagi negara Indonesia, kemudian penulis menelusuri landasan argumentasi yang menjadi pijakannya. Maka dalam kajian ini diupayakan mendasar dan mendalam yang berorientasi pada kajian teks atau kepustakaan.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 2.

⁷⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), h. 9

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 225-237

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat-hermeneutik dalam teorinya Hans Georg Gadamer. Karena pendekatan ini akan memaknai *hudud* dilihat secara konteks *historis*-nya menurut Ali Jum'ah, konteks kultur di Indonesia dan implikasi pandangannya bagi negara Indonesia.

B. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti sebagai sumber informasi,⁷⁹ dimana data primer dalam penelitian ini yaitu kitab karangan Syekh Ali Jum'ah yang berjudul *al-Bayan Lima Yasyghaluhu al-Adzhan, Haqaiqu al-Islam fi Muwajahati Syubhati al-Musyakkikin*, dan kitab Syekh Usamah al-Azhari yang berjudul *Asānīd al-Mishriyyin* yang berisi tentang biografi dari Syekh Ali Jum'ah, guru-gurunya, karya-karyanya, dan pemikirannya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data yang digunakan untuk penelitian ini. Baik yang berupa buku, artikel, atau yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.⁸⁰ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah, *Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'* karangan Abdurrahman al-Jazairi; *Fiqh Islām wa 'Adilatuh*, karangan Wahbah az-Zuhaili, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd dan beberapa artikel ilmiah serta makalah hasil seminar yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Selain dari karya-karya tulis, disini penulis juga akan mengambil sumber data dari media

⁷⁹ Saifudin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

⁸⁰ Saifudin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 91.

sosial seperti Youtube, berita online, dan juga dari web resmi Darul Ifta' Mesir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi/gabungan. Peneliti menganggap pengumpulan data dengan menggunakan teknik ini adalah langkah yang paling tepat karena sumber data tidak hanya satu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui bahan pustaka, yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang berkaitan dengan topik *hudud* dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian. Terkait hal ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data primer dan sekunder sebagaimana yang disebut di atas. Kemudian dilanjutkan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian dari sumber primer maupun sekunder.

D. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga hasil dari sebuah penelitian dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.⁸¹ Untuk menganalisis data, metode yang penulis lakukan adalah:

1) Reduksi Data

Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari berbagai sumber yang diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan ke dalam tiap

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 244.

permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Semakin banyak data yang penulis dapatkan, maka jumlah data akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk dan tidak mempersulit analisis selanjutnya. Pemilihan metode ini dikarenakan dalam penelitian ini data yang diambil tidak hanya dari sumber primer, tapi juga mengambil data dari sumber sekunder. Maka penggunaan reduksi data dirasa efektif untuk memverifikasi data.

2) Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Analysis Content* sebagai metode dalam menganalisis data yang diperoleh. Metode *Analysis Content* digunakan untuk menganalisis isi dari suatu wacana dan mengkaji sebuah konsep secara tidak langsung melalui media komunikasi yang mereka gunakan, seperti buku-buku dan dokumen lainnya. Dengan menggunakan metode ini, penulis diantarkan untuk membuat kesimpulan yang dapat ditiru dengan memperhatikan konteksnya.

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia yaitu dari kitab yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, yang mana di dalam prosesnya berupa membaca dan memahami isi dari kitab tersebut. Langkah selanjutnya adalah merumuskan hasil dari analisis tersebut dan menyusun data yang didapat sesuai dengan pola berfikir yang sudah ada.

3) Penyajian Data

Setelah data di reduksi dan di analisis, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada langkah ini, penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang di dapat

disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis literatur yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data:

1. Biografi Ali Jum'ah (1952 M)

Syekh Ali Jum'ah merupakan ulama yang memberikan pengaruh sangat besar di dunia Islam maupun di luar Islam. Ia tergolong ulama yang berpegang teguh dengan kitab-kitab klasik warisan dari para ulama salaf namun tidak membuat beliau menjadi orang yang kaku dalam merespon persoalan dan problematika umat yang bersifat baru yang mungkin tidak ada di zaman sebelumnya. Dengan pemikirannya yang moderat, ia mampu menarik banyak perhatian ulama-ulama dunia, para habib, cendekiawan muslim, para pemuda yang menuntut ilmu agama, bahkan non muslim sekalipun. Dari ilmu dan pengetahuannya yang sangat luas dibidang agama dan sosial, menjadikan beliau mampu berada di urutan ke 10 besar tokoh yang paling berpengaruh di dunia Islam kontemporer tepatnya pada tahun 2009 dan 2010 secara berurutan. Hasil pemikiran beliau banyak dijadikan rujukan atau referensi oleh berbagai lembaga keislaman dunia untuk dijadikan sebuah solusi dalam menyelesaikan problematika dan persoalan rumit yang mereka hadapi.⁸²

Ali Jum'ah merupakan ulama yang sangat unik dan sulit mencari bandingnya pada saat ini. Ia termasuk mujtahid zaman ini melalui fatwa-fatwanya dapat menuntaskan persoalan umat Islam. Meskipun tidak sedikit dari para ulama lain yang berseberangan dengan pandangan-pandangannya. Tapi sejauh penulis mengenal beliau melalui seringnya mengikuti kajian-kajian baik secara langsung atau youtube, mengkaji kitab-kitabnya, membuat penulis mengerti dan mengenal betul bagaimana cara berfikirnya serta kepeduliannya yang begitu besar terhadap umat Islam dan manusia pada umumnya. Beliau mendapatkan kedudukan sebagai mufti di lembaga *Dar al-*

⁸² *The Most Influential Muslim 2009 & The Most Influential Muslim 2010*, Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, cet. 1 & 2, 46 & 40. Diakses pada 17 Desember 2018

Ifta' Mesir selama 2 periode dari tahun 2003-2013 menunjukkan betapa ia mampu menjawab problematika umat dan tentu waktu yang tidak sedikit itu merupakan indikasi betapa rakyat Mesir mencintai dan mempercayainya sebagai mufti yang banyak memberikan solusi dalam masalah-masalah mereka.

Berikutnya penulis akan lampirkan tentang bagaimana perjalanan beliau dalam mencari ilmu sejak masa kecilnya, kondisi keluarganya, guru-gurunya, karya apa saja yang telah disuguhkan kepada umat Islam, sejauh mana jasa dan pengaruhnya terhadap masyarakat Islam dan dunia pada umumnya.

a) Keluarga

Ali Jum'ah memiliki nama lengkap Nur al-Din Abu Hasan 'Ali bin Jum'ah bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Salim bin Abdillah bin Sulaiman, al-Azhari al-Syarif al-Syafi'i. Beliau lahir di Bani Suwaif dari keluarga yang terhormat pada 3 Maret 1952 M/7 jumadal akhir 1371 H. Ibunya bernama Fatiya 1 Hanim binti 'Ali bin 'Id, ia merupakan wanita yang shalehah sejak kecil sudah terbiasa dengan menjaga shalat, puasa, dan berakhlak baik. Sebelum ibunya meninggal ia selalu mendoakan Ali Jum'ah dalam kebaikan dan menjadi ahli ilmu agama. Ayahnya bernama Jum'ah bin Muhammad seorang yang pakar dalam ilmu fikih sarjana dari Universitas Kairo Fakultas Hukum.⁸³

Kedua orang tuanya mendidik Ali Jum'ah dengan sangat baik. Ia mengajarkan ilmu agama, memperkenalkan dan mengajarkan kitab-kitabnya. Sejak kecil ia sudah terbiasa mengkaji kitab-kitab yang ada di perpustakaan ayahnya dan sampai sampai saat ini kitab-kitab tersebut masih tersimpan dengan baik dan tersusun rapi di perpustakaan pribadinya beliau tepatnya di daerah *Sittah Oktober* salah satu kota di negeri Mesir.

b) Pendidikan

Ali Jum'ah kecil sejak usia 5 tahun telah melakukan perjalanan intelektualnya. Tepat pada tahun 1963 M ia mendapatkan ijazah madrasah ibtidaiyahnya sedangkan pada tahun 1966 di kota Bani Suef ia mendapatkan ijazah madrasah tsanawiyahnya. Di kota Bani Suef Ali Jum'ah muda banyak belajar dan menghafal al-Qur'an kepada beberapa syekh hingga pada tahun

⁸³ Usamah Sayyid al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin* (Kairo: Dār al-Faḳīh, 2011), h. 539.

1969 ia mampu menyelesaikannya. Sebagaimana diungkapkan oleh syekh Usamah murid daripada Ali Jum'ah:

وكان من شأن الشيخ أيضا أن تفرغ في متقبل عمره لمدة سنة ، حفظ فيها القرآن الكريم، ومتن الرحبية في المواريث، ونصف ألفية ابن مالك، ثم أحضر الكتاب المقررة على المعاهد الأزهرية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع الثانوي في العلوم المختلفة، من علوم لغوية وشرعية وعقلية، فدرسها كاملة في تلك السنة، وحفظ ما فيها من قواعد علمية، وضوابط دقيقة، حتى إنه سعى في استخراج كل أوراق الامتحانات المفروضة على الصفوف الدراسية المذكورة، وانكب عليها حلها والإجابة عنها.

*Ali Jum'ah mengabdikan diri pada usia mudanya selama satu tahun dengan banyak menghafal al-Qur'an, matan al-Rahabiyah pada ilmu waris, menghafal setengah dari matan al-fiyah ibnu malik, menghafal kaidah-kaidah ilmu secara mendalam, banyak menelaah dan mengkaji kitab-kitab yang menjadi kurikulum di ma'had al-Azhar dari kelas satu ibtidaiyah sampai kelas empat tsanawiyah dari berbagai macam fan keilmuan. Termasuk diantaranya ilmu bahasa, ilmu tentang akal, ilmu syariah, semuanya ia pelajari secara sempurna selama setahun. Sampai ia mampu menjawab dan memecahkan soal-soal ujian di sekolahnya dengan sangat baik.*⁸⁴

Tamat dari madrasah tsanawiyah ia pindah bersama kakak perempuannya yang masuk ke Fakultas Arsitektur di Universitas Kairo dan menyelesaikan jenjang pendidikan madrasah 'aliyahnya pada tahun 1969. Setelah itu ia masuk ke perguruan tinggi Universitas 'Ain Syams yang berlokasi di 'Abbasiyah salah satu daerah di Kairo. Pada tahun 1973 M bulan Mei ia menyelesaikan

⁸⁴ Usamah Sayyid al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*...h.542

studinya di Universitas tersebut dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi.⁸⁵

Setelah menyelesaikan gelar sarjananya di Universitas ‘Ain Syam, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar disitulah ia bertemu dan belajar bersama para ulama. Beliau belajar kepada para ulama dengan menghafalkan ilmu-ilmu dasar seperti kitab *Tuhfatu al-Athfal* dalam ilmu tajwid, kitab *Alfiya* Ibnu Malik dalam ilmu kaidah - kaidah nahwu, kitab *al-Rahabiyah* dalam ilmu warisan, kitab *al-Gayah wa al-Taqrīb* dalam ilmu fikih, *al-Manzhumah al-Bayquniyah* dalam ilmu musthalah hadis, serta beberapa cabang dasar ilmu lainnya. Dengan ilmu dasar tersebut dapat memudahkan beliau untuk melangkah kepada tingkatan ilmu yang lebih tinggi.⁸⁶

Di Universitas al-Azhar Kairo ia mengambil Fakultas Dirasat Islamiyah wa al-Arabiyah dan menyelesaikan gelar sarjananya (License) pada tahun 1979 M. Setelah itu beliau melanjutkan ke jenjang Pendidikan pascasarjana di Universitas yang sama dengan mengambil spesialis usul fikih di Fakultas Syari’ah wa al-Qanun dan ia mendapatkan gelar masternya dengan predikat Cumlaude di tahun 1985. Pada tahun 1988 ia menyelesaikan gelar Doktornya dengan predikat Summa Cumlaude di Universitas dan Fakultas yang sama serta di bidang yang sama. Selain mendapatkan ilmu yang banyak di perkuliahan, ia senantiasa mempelajari berbagai macam cabang ilmu dengan menghadiri banyak majlis keilmuan di masjid al-Azhar.⁸⁷ Beliau juga pernah menyelesaikan program Doktor di Universitas Liverpool (Honoris Causa) dan di Universiti Malaya (Honoris Causa).⁸⁸

Dari histori pendidikannya di berbagai macam negara dan fakultas perkuliahan, ia merupakan sosok penuntut ilmu yang gigih dan mendedikasi seluruh usianya untuk ilmu pengetahuan sehingga beliau mampu menjadi ulama besar di kancah internasional dan banyak mengeluarkan karya tulis menjadi kitab-kitab yang dapat dipelajari oleh murid dan generasi setelahnya.

c) Guru-guru Ali Jum’ah

⁸⁵ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah ‘Urfi dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyyah*, h. 57

⁸⁶ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah*...h. 59

⁸⁷ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah*...h. 60

⁸⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Gomaa

Ali Jum'ah termasuk diantara para ulama yang terlahir dari didikan para masyayikh al-Azhar yang ahli dalam berbagai macam bidang keilmuan meliputi ilmu akidah, fikih, ushul fikih, hadits, bahasa, adab dan balaghoh, ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Guru-guru beliau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Guru-guru 'Ali Jum'ah

No	Ilmu	Nama Guru
1	Al-Qur'an al-Karim	Ali Jum'ah membaca dan mempelajari al-Qur'an al-Karim secara keseluruhan dan bersanad dari al-'Allamah al-Qari' asy-Syaikh Muhammad Ismail al-Hamdani, dari al-'Allamah asy-Syaikh Ahmad Abdul Aziz al-Zayyat, dari al-'Allamah asy-Syaikh Khalil al-Janayani, dan dari para asy-Syaikh Mutawalli al-Kabir dengan sanad-sanadnya yang masyhur.
2	Tafsir Ibnu Katsir	Ali Jum'ah belajar tafsir Ibnu Katsir sampai surah Maryam dari al-Mutqin al-Syaikh Abdul Hakim Abdul Lathif Abdullah al-Maliki
3	Al-Adab al-Mufrad lil Bukhari	Ali Jum'ah belajar kitab al-Adab al-Mufrad salah satu kitab hadits karangan Imam Bukhari dari al-'Allamah al-Muhaddits asy-Syaikh Abdul Fatah Abu Ghadah
4	Ushul Fikih	Ali Jum'ah mempelajari kitab ushul fikih dari al-'Allamah asy-Syaikh Muhammad

		Abu an-Nur Zahir. Beliau juga belajar kitab <i>Minhajal-Baidhawi</i> beserta syarahnya dari al-‘Allamah asy-Syaikh al-Husaini. Ia juga mempelajari kitab <i>al-Luma’</i> karangan Abu Ishaq al-Syirazi dari al-‘Allamah al-Muhaddits as-Sayyid Abdullah bin al-Shadiq al-Ghumari
5	Shahih al-Bukhari, Syamailu at-Turmudzi, al-Arba’in an-Nawawi, al-Awail as-Sunbuliyah, dan al-Muwaththaq Imam Malik	Ali Jum’ah mempelajari kitab-kitab tersebut dari al-‘Allamah al-Muhaddits as-Sayyid Abdullah bin al-Shadiq al-Ghumari.
6	Al-Asybah wa an-Nazhair al-Fiqhiyyah	Ali Jum’ah mempelajari kitab al-Asybah wa an-Nazhair al-Fiqhiyyah karangan Imam al-Suyuthi dari Jad al-Rabbi Ramadhan
7	Mughni al-Muhtaj	Ali Jum’ah mempelajari kitab Mughni al-Muhtaj karangan asy-Syarbini dari al-‘Allamah al-Qari’ al-Faqih asy-Syaikh Ahmad Abdul Aziz al-Zayyat

8	At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul	Ali Jum'ah mempelajari kitab At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul karangan al-Isnawi dari al-'Allamah al-Husaini Yusuf asy-Syaikh.
9	Syarah al-'Adhudi 'ala Mukhtashar Ibnu al-Hajib dan Ihkam al-Amadi	Ali Jum'ah mempelajari dua kitab tersebut dari al-'Allamah asy-Syaikh Abdul Jalil al-Qaransyawi al-Maliki
10	'Ilmu al-Iqtishadi al-Islami dan Usus 'Ilmi al-Iqtishadi al-Gharbi	Ali Jum'ah mempelajari ilmu ekonomi Islam dari Duktur 'Isa 'Abduh Ibrahim. Sedangkan ilmu asas ekonomi Barat ia mempelajarinya dari Duktur Yahya 'Uwais, Duktur 'Ali Luthfi dan Duktur Munis 'Abdul Malik
11	'Ilmu al-Qanun al-Wadh'i	Ali Jum'ah mempelajari ilmu hukum positif/perundang-undangan dari Duktur Sami Madkur, Hamdi 'Abdurrahman, dan Duktur Husain Nawawi.
12	'Ilmu al-Idaroh	Ali Jum'ah mempelajari ilmu manajemen dari Duktur Mahir 'Ulaissy, Duktur Ali 'Abdul Wahab, dan Duktur Sayyid al-Hiwari
13	'Ilmu al-Muhasabah	Ali Jum'ah mempelajari ilmu akuntansi dari Duktur al-Jazairi dan Duktur al-'Isymawi.

14	Ilmu al-Riyadhat al-‘Ulya	Ali Jum’ah mempelajari ilmu matematika yang tinggi dari Duktur Fathi Muhammad Ali dan Duktur Daud Munsu

Dari uraian di atas, Ali Jum’ah memiliki banyak guru yang sangat pakar di bidangnya masing-masing dan ia mengambil ilmu dari guru-gurunya dengan sangat baik. Tidak hanya berguru dengan para ulama di Mesir, ia belajar juga kepada seorang ulama Indonesia berasal dari Sumatera Barat yang tinggal di Makkah. Ia merupakan ulama yang terkenal di dunia Islam dan menjadi imam di Masjid al-Haram. Ia bernama Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Padani (1915-1990) seorang ahli dan pakar di bidang ilmu hadits dan mendapat gelar Sanad ad-Dunya.⁸⁹

d) Pujian dan Komentar Para Ulama Terhadap Ali Jum’ah

Beberapa ulama dan guru-guru Ali Jum’ah banyak memberikan pujian dan kekagumannya atas kecerdasan, kepintaran, dan kepiawaiannya dalam berfatwa. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa beliau merupakan ulama yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam menuntaskan permasalahan umat dan sebagai kiblat untuk menuntut ilmu agama Islam. Berikut penulis lampirkan:⁹⁰

1) ‘Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghumari

‘Abdullah bin al-Shiddiq al-Ghumari merupakan ulama yang sangat pakar dibidang ilmu hadits pada zamannya. Sekitar lebih dari 50.000 ribu hadits telah dihafalnya serta lengkap dengan sanad dan rawi-rawinya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Ali Jum’ah telah belajar kepadanya beberapa kitab hadits dan usul fikih dan ia memberikan Ali Jum’ah sebuah ijazah sanad sebagai legitimasi untuk meriwayatkan hadits dan berfatwa. Tidak hanya disitu ‘Abdullah al-Ghumari

⁸⁹ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah*...h. 60

⁹⁰ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah*...h. 61

menghimbau dan mendorong kepada murid-muridnya yang lain agar mengambil ilmu dari Ali Jum'ah karena ia merupakan salah satu murid yang tercerdas di Mesir

2) Abdul Fattah Abu Guddah

Ia merupakan salah satu guru Ali Jum'ah yang mempunyai keilmuan yang luas dalam ilmu hadits. Suatu Ketika Ali Jum'ah melakukan penelitian ulang terhadap kita usul fikih karangan al-Syaikh Abu an-Nur Zuhair. Dalam penelitiannya, Ali Jum'ah menuliskan sanad atau ijazah yang ia dapatkan dari Muhammad Abu an-Nur Zuhair. Ketika gurunya Abdul Fattah Abu Guddah mengetahuinya, ia lantas menginginkan sanad atau ijazah dari Ali Jum'ah pada bidang usul fikih. Seraya berkata : “Aku terima ijazah buku ini darimu”. Hal ini merupakan fenomena yang langka sekaligus menjadi kehormatan bagi Ali Jum'ah saat gurunya yang mempunyai keluasaan ilmu masih mengambil sanad dari muridnya sendiri. Hal ini tidak akan pernah terjadi jika seorang murid tidak memiliki kecerdasan dan keilmuan yang luas

3) Muḥamamd Abu an-Nur Zuhair

Ia merupakan guru Ali Jum'ah dalam bidang usul fikih sekaligus pernah menjadi Wakil Rektor Universitas al-Azhar dan anggota lembaga fatwa. Melihat muridnya yang cerdas dan memiliki kemampuan dalam berfatwa, beliau tidak ragu-ragu untuk memberikanya sebuah ijazah sebagai tanda legalitas resmi untuk mengajar dan berfatwa

4) Jad al-Rabbi Ramadhan

Ia terkenal dengan sebutan Syafi'i kecil karena penguasaannya terhadap kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i. Ia juga pernah menjadi Dekan Fakultas Syariah wa al-Qanun Universitas al-Azhar Kairo. Suatu ketika Jad al-Rabbi Ramadhan pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya tentang muridnya yaitu Ali Jum'ah bahwa ia merupakan sosok murid yang sangat pandai. Ia memberikan pujian dengan mengatakan “Penamu ini lebih baik dari penaku”

5) Syekh Usamah al-Azhari

Syekh Usaman al-Azhari merupakan salah satu murid terbaiknya Ali Jum'ah dan beliau mendapatkan pujian dari Habib Ali al-Jufri “bahwa

ilmunya melampaui umurnya”. Syekh Usamah al-Azhari sangat mengenal sosok gurunya tersebut dan menuliskan biografinya dalam kitab beliau yang berjudul “*Asanid al-Mashriyin*”. Dalam bukunya tersebut ia tuangkan kekaguman dan kecerdasan terhadap gurunya. Aku telah mengambil banyak manfaat dari keilmuannya, pemikirannya, dan karakter Ali Jum’ah sampai-sampai aku ingin mengatakan kepada beliau seperti perkataan Imam Ahmad bin Hanbal kepada gurunya Imam Syafi’i. Imam.

Diriwayatkan, suatu ketika Muhammad bin al-Fadhl al-Barraz haji bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kami shalat shubuh di suatu masjid. Setelah shalat subuh aku mendatangi majlis ilmunya Sufyan bin ‘Uyainah. Lalu aku mencari majlis yang diikuti oleh Ahmad bin Hanbal. Aku dapati ia bersama orang-orang yang sedang belajar kepada seorang guru. Aku menghampirinya dengan mengatakan: “mengapa engkau tinggalkan majlis Sufyan bin ‘Uyainah padahal yang mengikuti majlis beliau dari para ulama besar seperti al-Zuhri, ‘Amru bin Dinar, Ziyad bin ‘Alaqah, dan para tabi’in?”. Lalu Ahmad bin Hanbal menjawab: “*Diam, jika kamu melewati periwayatan hadits darinya, kamu bisa mendapatinya dari para muridnya dan itu tidak akan membuat celaka agama dan akalmu. Tetapi jika kamu melewati cara berfikirnya pemuda ini, aku khawatir kamu tak akan mendapatkannya sampai hari kiamat datang*”. Aku belum pernah melihat orang yang paling mampu untuk memahami kitab suci al-Qur’an selain pemuda ini (Imam Syafi’i)”. Begitulah yang ingin aku katakan kepada guruku Ali Jum’ah sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal kepada gurunya Imam Syafi’i.⁹¹

Suatu ketika aku menghadiri majlis Ali Jum’ah yang dihadiri oleh para ulama besar lainnya. Beliau membacakan 200 judul kitab tentang ilmu hadits secara sendiri. Sampai-sampai ada salah satu dari hadirin yang merupakan ketua divisi jurusan Hadits di Fakultas Ushuluddin. Ia menjadi saksi saat itu tentang keluasan keilmuan Ali Jum’ah. Setelah majlis usai, ia berjalan keluar bersamaku seraya berkata: “*Subhanallah Aku tidak*

⁹¹ Usamah Sayyid al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*...h.543-544

*mengetahui nama dari 200 judul kitab ilmu hadits dari mana dia dapatkan dan baca kitab-kitab itu”.*⁹²

e) Jasa-jasa Ali Jum’ah

Dibalik kecerdasan dan keluasan ilmunya tentu akan menghasilkan jasa-jasa yang dapat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat Mesir dan dunia. Pada pasal ini penulis akan menyajikan apa saja jasa-jasa beliau yang telah ia ukir untuk kemaslahatan umat Islam.

Syekh Usamah Sayyid al-Azhari murid setia Ali Juma’ah menceritakan tentang jasa-jasa beliau dalam kitabnya *Asanid al-Mashriyin* sebagai berikut:

وقد أحيا الله تعالى به العلم وحلقاته في الأزهر الشريف بعد طول
موات، فعادت تقرأ فيه عيون الكتب حديثاً، وفقهاً، وأصولاً، وعربية،
ومعقولاً على عدد من العلماء على نحو قد انقطع منذ زمن.

*“Allah SWT. telah menghidupkan keilmuan dan majlis-majlis ilmu di al-Azhar melalui tangan beliau setelah lama majlis tersebut mengalami kematian. Beliau duduk dan membacakan kitab-kitab hadits, fikih, usul fikih, bahasa Arab, dan ilmu akal kepada beberapa para ulama yang dimana momen seperti ini pernah terputus lama”.*⁹³

Syekh Ali Jum’ah pernah menjadi Mufti Dar al-Ifta’ Mesir sebuah lembaga di yang banyak mengeluarkan fatwa untuk masyarakat dan bahkan negara Mesir itu sendiri. Fatwa-fatwa tersebut sangat memberikan pengaruh positif terhadap rakyat dan negaranya. Bahkan di negara Islam lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Yaman, Suriah, negara-negara Arab lainnya tidak sedikit mengacu kepada fatwa Dar-al’Ifta’ Mesir ini. Karena dari peminta fatwa tidak terbatas hanya di Mesir saja namun diseluruh penghujung dunia ditambah lagi lembaga ini memberikan pelatihan fatwa kepada mahasiswa dari berbagai negara.

Lembaga fatwa ini menorehkan beberapa keberhasilan pada masa Ali Jum’ah menjadi mufti Dar-al-Ifta’ Mesir periode 2003-2013 seperti berhasil mengumpulkan fatwa-fatwa ulama Mesir sebelumnya seperti sahabat ‘Uqbah

⁹² Usamah Sayyid al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*...h. 548

⁹³ Usamah, *Asānid al-Miṣriyyin*,... h. 544

bin 'Amir sampai mufti Ali Jum'ah terkumpul sebanyak 22 jilid yang kemudian menjadi kitab ensiklopedi fatwa ulama Mesir. Tidak hanya itu, lembaga ini berhasil mengumpulkan fatwa yang meliputi pada masa Hasanah an-Nawawi menjadi seorang mufti pada tahun 1895 sampai masanya Ali Jum'ah berhasil disusun sampai 23 jilid. Pada pengumpulan ini tertulis didalamnya beberapa tema fatwa berjumlah 100.000 ribu fatwa.⁹⁴

Nama Ali Jum'ah pernah menjadi urutan ke-20 di antara 500 tokoh berpengaruh di dunia di bawah nama Presiden Nigeria Muhammad Buhari yang berada di posisi urutan ke-19. Tidak hanya menjadi seorang mufti, ia banyak sekali menyumbangkan kecerdasan dan pemikirannya itu di dunia internasional. Ali Jum'ah juga menjadi anggota Majma' Buhuts al-Islamiyah al-Azhar sebuah lembaga riset keagamaan dan kefatwaan tertinggi di al-Azhar sejak tahun 2004 sampai sekarang. Ia juga pernah menjadi anggota Majma' al-Fiqih dalam muktamar di Jeddah, menjadi guru besar usul fikih di Fakultas Dirasat Islamiyah wa al-'Arabiyah lil Banin Universitas al-Azhar, anggota muktamar fikih Islam di India dan menjadi Dewan Ulama Senior Universitas al-Azhar.⁹⁵

Meskipun saat ini Ali Jum'ah tidak menjadi Mufti Agung Mesir, tapi beliau masih sibuk mengajar ilmu agama di masjid al-Azhar dan Sittah Oktober (nama sebuah daerah di Mesir) kepada mahasiswa baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Ia juga banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah seputar agama Islam dan permasalahan mereka yang tidak lain hal itu juga merupakan aktifitas berfatwa.

f) Karya-karya Ali Jum'ah

Disamping kecerdasan, keluasan ilmunya, dan banyaknya jasa yang diberikan kepada umat Islam, ia juga mempunyai banyak karya yang dipersembahkan bagi para penuntut ilmu diseluruh dunia dan umumnya bagi seluruh kaum muslimin yang ingin mempelajari tentang ilmu-ilmu agama Islam melalui hasil daripada karya-karya yang beliau tulis. Beberapa kitab-kitab beliau dapat dilihat pada tabel keempat dibawah ini:⁹⁶

⁹⁴ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah...*h. 68

⁹⁵ Fajar, S.H.I, *Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Mu'amalat Maliyah Mu'ashirah*, (Tesis: 2019 Yogyakarta), h. 25

⁹⁶ Usamah Sayyid al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin...*h. 552

Tabel 4.1. Karya-karya Buku ‘Ali Jum’ah

No	Nama Kitab	Pembahasan
1	المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية	Kitab ini membahas tentang hal-hal yang harus diketahui oleh para pengkaji fikih perbandingan seperti bagaimana biografinya, ushul fikih yang mereka gunakan, metode dalam mengistimbath hukum, dan kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam setiap madzhab.
2	الطريق إلى التراث الإسلامي	Kitab ini membahas bagaimana cara untuk membaca dan berinteraksi dengan kitab-kitab turats sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya
3	سمات العصر	Kitab ini membahas tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan perubahan zaman dan tempat. Karena setiap zaman mempunyai ciri dan karakteristik sendiri. Bagi seorang muslim hendaknya mampu melihat perubahan itu agar bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak ada pada zaman sebelumnya
4	الكلم الطيب في الفتاوى العصرية	Kitab ini berisi kumpulan fatwa-fatwa atau jawaban Ali Jum’ah terhadap para penanya sejak periode 2003 sampai 2013. Tema dalamnya sangat kompleks meliputi akidah, ibadah, muamalat, tasawuf dan lain sebagainya
5	البيان لما يشغله الأذهان	Kitab ini membahas tentang permasalahan kontemporer yang banyak didiskusikan oleh para pemuda Islam dan selalu menyibukkan pikiran mereka
6	سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العالمين	Kitab ini membahas tentang keagungan Nabi SAW., kebenaran dan sucinya syariat yang dibawanya

7	المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم	Kitab ini membahas tentang adanya beberapa kalangan umat Islam yang salah dan tidak memahami istilah-istilah usul yang digunakan oleh para ulama salaf.
8	علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة	Kitab ini membahas tentang adanya hubungan era tantara ilmu usul fikih dan ilmu filsafat
9	قضية تحديد أصول الفقه	Kitab ini membahas tentang wacana untuk memperbaharui beberapa kaidah-kaidah usul fikih yang diletakkan oleh para ulama dahulu
10	أثر ذهاب المحل في الحكم	Kitab ini membahas tentang suatu syariat tidak bisa diamalkan disebabkan hilangnya unsur yang mewajibkannya. Seperti misalkan khamr ketika hilang sifat memabukkannya maka hukum haramnya menjadi hilang. Begitu juga dengan hukum wajibnya shalat menjadi hilang bagi anak kecil yang belum baligh
11	الحكم الشرعي عند الأصوليين	Kitab ini membahas seputar hukum syariat menurut para ulama ahli usul
12	آليات الاجتهاد	Kitab ini membahas tentang alat-alat apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang mujtahid sehingga ia boleh untuk berijtihad.
13	المكاييل والموازين الشرعية	Kitab ini membahas tentang berat dan ukuran dari sebuah emas dan perak yang dijadikan alat tukar beserta pembahasan epistemologi dan historinya
14	مدى حجية الرؤيا عند الأصوليين	Kitab ini membahas tentang sejauh mana suatu mimpi itu bisa dijadikan sebuah hujjah atau landasan hukum menurut para ulama usul

15	النسخ عند الأصولين	Kitab ini membahas tentang teori naskh menurut ulama usul. Apakah naskh benar-benar terjadi pada al-Qur'an atau tidak.
16	الإجماع عند الأصولين	Kitab ini membahas tentang teori ijma' menurut para ulama ushul
17	الأوامر والنواهي عند الأصولين	Kitab ini membahas tentang perintah dan larangan menurut para ulama ushul
18	قول الصحابي عند الأصولين	Kitab ini membahas tentang apakah perkataan para sahabat bisa dijadikan sebuah hujjah atau dalil untuk sebuah hukum menurut para ulama ushul
19	الكامن في الحضارة الإسلامية	Kitab ini membahas dan menyelami apa saja dibalik peradaban keislaman dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Sebuah peradaban keislaman yang sudah tersebar di seluruh dunia
20	الطريق إلى الله	Kitab ini membahas tentang bagaimana cara menuju kepada Allah dengan lebih mengenalnya dan menjadi dekat denganNya
21	المرأة في الحضارة الإسلامية	Kitab ini membahas tentang perempuan dalam sejarah peradaban Islam yang dimana Islam sangat memuliakan dan mengangkat derajatnya
22	قضايا المرأة في الفقه الإسلامي	Kitab ini membahas tentang persoalan-persoalan klasik maupun kontemporer seputar perempuan dalam fikih kesilaman
23	المرأة بين إنصاف الإسلام وشبهات الآخر	Kitab ini membahas tentang sikap Islam yang berlaku adil terhadap perempuan dan syubhat-syubhat yang mengarah kepada perempuan diperlakukan tidak adil dalam Islam

24	المساواة الإنسانية في الإسلام بين النظرية والتطبيق	Kitab ini membahas tentang Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan antar sesama manusia tidak melihat agama dan jenisnya
25	النقاب عادة وليس عبادة	Kitab ini membahas tentang cadar merupakan suatu adat di sebuah bangsa dan bukan termasuk ibadah
26	النبراس في تفسير القرآن الكريم	Kitab ini merupakan kitab tafsir Ali Jum'ah beliau menafsirkan surat al-baqarah
27	الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية	Kitab ini menjelaskan tentang biografi dan perjalanan Imam Syafi'I dalam mempelajari agama Islam sampai menjadi ulama dan mempunyai murid-murid yang banyak sertak terbentuknya madzhab Syafi'i
28	الدين والحياة الفتاوى العصرية اليومية	Kitab ini merupakan kumpulan dari fatwa-fatwa Ali Jum'ah yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang bersifat kekinian
29	الجهاد في الإسلام	Kitab ini membahas tentang bagaimana sesungguhnya praktek jihad dalam Islam.
30	صناعة الإفتاء من مجموعة سلسلة التنوير الإسلامي	Kitab ini membahas tentang bagaimana cara untuk mengeluarkan fatwa secara benar
31	فتاوى الإمام محمد عبده (اعتنى بجمعه واختياره وقدم له)	Kitab ini membahas tentang fatwa-fatwa dari Imam Muhammad 'Abduh serta tanggapan Ali Jum'ah

32	حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين	Kitab ini membahas tentang bagaimana Islam membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh musuh Islam
33	سبيل المبتدئين شرح منازل السائرين	Kitab ini membahas tentang jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada lebih dekatnya seorang hamba dengan Allah.
34	الوحي - القرآن الكريم	Kitab ini membahas tentang wahyu al-Qur'an al-Karim
35	تيسير النهج في شرح مناسك الحج	Kitab ini membahas tentang metode mudah dalam menjelaskan manasik haji
36	البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي	Kitab ini membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan dan alam semesta untuk menciptakan keseimbangan kehidupan manusia dalam perspektif Islam
37	النماذج الأربعة للتعايش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش مع الآخر	Kitab ini membahas tentang contoh-contoh bagaimana cara Rasulullah SAW. berinteraksi dengan orang lain baik yang seagama maupun yang berbeda agama
38	التربية والسلوك	Kitab ini membahas tentang tarbiyah dan pembentukan akhlak
39	المصطلح الأصولي والتطبيق على تعريف القياس	Kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah usul dan bagaimana pengaplikasiannya pada seputar teori qiyas
40	الإمام البخاري وجامعه الصحيح	Kitab ini membahas tentang biografi Imam Bukhari dan kitab-kitab haditsnya yang shahih

41	الكتب المكونة للفكر الإسلامي السني	Kitab ini membahas tentang kitab Allah yaitu kitabullah al-masthur (al-Qur'an), kitabullah al-manzhur (alam semesta), dan al-maqdur (manusia)
42	أمن المجتمع واستقراره من منظور إسلامي	Kitab ini membahas tentang menjaga keamanan dan kestabilan kehidupan masyarakat dalam perspektif Islam
43	تعارض الأقيسة عند الأصوليين	Kitab ini membahas tentang bagaimana perbedaan pendapat yang saling bertentangan pada suatu hukum menurut para ulama ushul
44	تاريخ أصول الفقه	Kitab ini membahas tentang sejarah munculnya usul fikih
45	رؤية فقهية حضارية لترتيب المقاصد الشرعية	Kitab ini membahas tentang pandangan para ulama fikih dalam menyusun maqashid asy-syar'iyah
46	مجلدات فتاوى الأستاذ الدكتور على جمعة خلال فترة توليه دار الإفتاء المصرية	Kitab ini kumpulan dari fatwa-fatwa Ali Jum'ah sejak menjadi mufti Dar al-Ifta' periode 2003-2013
47	الحج والعمرة أسرار وأحكام	Kitab ini membahas tentang haji dan umroh beserta rahasia dan hukum-hukumnya
48	مجالس الصالحين الرمضانية	Kitab ini membahas tentang kumpulan dan amalan-amalan orang-orang shaleh pada bulan Ramadhan yang perlu untuk diketahui dan permasalahan seputar bulan suci Ramadhan
49	فتاوى البيت المسلم	Kitab ini membahas tentang kumpulan fatwa-fatwa Baitul muslim

50	الفتاوى الرمضانية	Kitab ini membahas tentang fatwa-fatwa seputar Ramadhan
51	الاستعداد لرمضان	Kitab ini membahas tentang apa saja yang harus disiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan.
52	الفتاوى العصرية لمفتي الديار المصرية	Kitab ini membahas tentang kumpulan fatwa-fatwa dari ulama Dar al-Ifta' Mesir
53	خطوات الخروج من المعاصي	Kitab ini membahas tentang Langkah-langkah bagaimana seorang hamba keluar dari kemaksiatan
54	المتشددون .. منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم	Kitab ini membahas tentang bantahan Ali Jum'ah terhadap pemahaman orang-orang radikal

Itulah beberapa kitab dan karya Ali Jum'ah yang mengkaji tentang hukum-hukum Islam, kumpulan fatwa, kajian tentang perempuan, hal-hal yang berkaitan dengan sosial, dan lain sebagainya. Kitab-kitab tersebut banyak dijadikan rujukan oleh para ulama dan pelajar agama Islam bahkan penulis sendiri dalam mempelajari hukum-hukum Islam juga menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai rujukan utama. Selain kitab-kitab di atas, terdapat pula kitab-kitab lain karangan Ali Jum'ah.

2. **Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan***

Islam merupakan agama yang *shalil likulli zaman wa makan*. Ia mampu menjawab tantangan di setiap perubahan zaman dan tempat. Seiring berkembangnya zaman, tempat, teknologi, dan lain sebagainya semakin banyak pula persoalan baru yang muncul yang tidak disinggung oleh para ulama jauh sebelumnya. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah ijtihad untuk menjawab berbagai permasalahan baru dalam Islam yang bersifat kekinian.

Syekh Ali Jum'ah merupakan ulama masa sekarang yang keilmuannya bagaikan luasnya samudera. Ia tidak hanya paham tentang fikih tapi juga mengerti bagaimana berinteraksi dengan beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama, mengerti manhaj fikih yang digunakan oleh para pendiri madzhab yang empat, bahkan cerdas dalam mengkontekstualisasikan pendapat dan dalil-dalil mereka dengan persoalan-persoalan baru yang muncul pada zaman sekarang. Karena untuk menetapkan hukum dan menyelesaikan problematika kontemporer tidak hanya bermodal paham fikih saja. Oleh sebab itu pengetahuan seperti humaniora, antropologi, sosiologi, psikologi, dan pengetahuan umum lainnya sangat mendukung untuk menjawab persoalan secara tepat sasaran sehingga dapat menghasilkan produksi hukum fikih yang seirama dengan perkembangan tempat dan waktu.

Semakin luas dan dalamnya ilmu seseorang maka ia akan mudah bersikap toleran, lembut, tidak bersikap radikal, tidak fanatik terhadap madzhab dan golongannya, serta tidak merasa pendapatnya yang paling benar. Hal inilah yang akan kita dapati pada sosok Ali Jum'ah dalam kitabnya yaitu *al-Bayan Lima Yasyghaluhu al-Adzhan*. Kitab ini berisi pemikiran dan pandangan beliau yang begitu humanis dan moderat dalam menyikapi persoalan agama pada masa ini. Meskipun ia bermadzhab Syafi'i namun mampu untuk menyajikan pendapat-pendapat madzhab lain serta tidak bersikap fanatik terhadap madzhab yang ia pegang. Dalam kitab tersebut Ali Jum'ah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan umat Islam yang bersifat kekinian atau tidak disungguh pada zaman-zaman sebelumnya dan ia menjawabnya dengan jawaban yang sangat solutif yang dibutuhkan oleh umat dan sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini. Sehingga kitab ini banyak dijadikan rujukan oleh kalangan umat Islam. Kaitannya dengan penelitian ini adalah pembahasan pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dan penerapannya di era modern saat ini serta implikasinya bagi negara Indonesia.

Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* terdiri dari dua jilid. Pembahasan dalam kitab ini mencakup banyak aspek di antaranya permasalahan akidah, ibadah, *muamalah*, tasawwuf, permasalahan yang menyangkut sosial, dan permasalahan yang bersifat kontemporer lainnya

disertai jawaban dan dalil-dalil yang kuat. Mengenai isi dan kandungan kitab *al-Bayan Lima Yasyghaluhu al-Adzhan* ini terdapat 3 catatan penting yaitu *pertama*, terdapat 100 permasalahan *khilafiyyah* yang menyibukkan pemikiran kaum muslimin pada abad 14 Hijriyah. Permasalahan tersebut mengakibatkan sebagian kelompok Islam mengklasifikasi kelompok-kelompok kaum muslimin menjadi seperti kelompok Islam sunni, Islam salafi, Islam sesat, Islam radikal dan lain sebagainya. Karena jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut menentukan ia berada diposisi kelompok yang mana. Di sisi lain 100 permasalahan yang bersifat *khilafiyah* tersebut dianggap oleh sebagian kelompok sebagai permasalahan yang sifatnya *qath'i* sehingga tidak boleh berbeda pendapat. Ketika berbeda pandangan dengan kelompok tersebut maka ia akan dianggap sebagai kelompok yang sesat atau bahkan kafir. Mereka juga beranggapan bahwa manhaj merekalah yang paling sesuai dengan manhaj Nabi SAW. Melihat fenomena seperti ini menjadikan Ali Jum'ah perlu untuk menjawabnya agar tidak terjadi konflik yang lebih besar.

Kedua, manhaj dalam memahami 100 permasalahan *khilafiyah*. Dalam menghadapi 100 permasalahan *khilafiyah* tersebut Ali Jum'ah meletakkan beberapa manhaj agar menghasilkan pemahaman yang benar dan tidak terjadi perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Diantara manhaj tersebut yaitu 1) *Laanuridu linnaasi an yansyaghiluu bil khilaafiyyaat* yaitu kami tidak ingin orang-orang sibuk pada hal-hal yang bersifat *khilafiyyat* karena dengan sibuk dan fokus pada hal tersebut menjadikan pintu saling menyalahkan dan membenci sangat terbuka lebar. Persatuan kaum muslimin mudah dihihancurkan dengan memperbesar nyala api perbedaan di antara mereka. Mestinya kaum muslimin menyibukkan pada hal-hal yang bersifat *muttafaq 'alaih* yaitu fokus pada hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Karena dengan selalu mencari persamaan dan meninggalkan perbedaan di antara kaum muslimin, akan menjadikan persatuan Islam semakin kuat meskipun akan tetap ada kelompok-kelompok dalam Islam akan tetapi tidak menjadikan mereka saling berpecah belah. 2) *al-Mufti yufti bil ashlah wa laisa bil ashah* yaitu seorang mufti ketika akan memberikan fatwa dalam masalah *khilafiyyat*, maka sebaiknya ia berfatwa dengan yang paling memberikan kemaslahatan meskipun dalilnya lemah dan berbeda dengan jumhur. Artinya disini

kemaslahatan lebih diutamakan daripada dalil yang paling kuat. Karena ketika seorang mufti hanya memberikan fatwa berdasarkan dalil yang paling shahih tanpa melihat yang paling berdampak pada kemaslahatan, kemungkinan ia akan mengantarkan orang yang meminta fatwa kepada kebinasaan. Akan tetapi pada permasalahan yang sifatnya *al-muttafaq 'alaih* yaitu yang sudah menjadi kesepakatan para ulama, maka pilihlah yang paling shahih karena sudah pasti akan memberikan kemaslahatan. 3) *Kullu ro'yin lahu daliiluhu* yaitu setiap pendapat mempunyai dalil syar'i. Artinya di dalam sebuah perbedaan pendapat di antara para ulama, mereka mempunyai dalil-dalil syar'i yang mendasari pendapat mereka bukan hawa nafsu yang menjadi dasar atau pijakanya dalam mengeluarkan sebuah pendapat hukum syar'i. 4) Permasalahan dalam Islam yang disepakati jauh lebih banyak daripada permasalahan yang diperdebatkan. Sebagian ulama menghitung permasalahan fikih yang terjadi pada masa salaf mencapai lebih 1 juta masalah. Artinya jika dibandingkan dengan 100 masalah yang diperselisihkan di atas akan menjadi 1:10000. Maka apakah disebabkan satu permasalahan yang sifatnya masih diselisihkan oleh para ulama mengakibatkan munculnya sikap intoleran antar kaum muslimin dan melupakan sepuluh ribu masalah yang disepakati? Apakah hal ini juga akan menjadikan merebaknya sikap saling mencaci di antara mereka disebabkan hanya satu masalah *khilafiyah*?. Sikap seperti ini oleh Ali Jum'ah disebut dengan *al-faroghu adz-dzihni* yaitu kedangkalan dalam berfikir yang mengakibatkan bersikap keras sehingga akan mudah untuk saling menyalahkan dan menganggap pendapatnya yang paling benar sedangkan yang lain salah. Kemudian *al-faroghu al-fiqh* yaitu kedangkalan dalam aspek pemahaman fikih karena mereka tidak mempelajari fikih secara luas dan benar. Bahkan disebut dengan *al-faroghu ad-diinii* yaitu kedangkalan dalam masalah ajaran agama yang mengakibatkan pada khayalan mereka dengan menganggap dirinya adalah satu-satunya kelompok yang selamat dan masuk surga.

Ketiga, motivasi Ali Jum'ah dalam menulis kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*. Ada dua sebab yang mendasari penulisan kitab tersebut. *Pertama* apa yang disebut dengan *sababun qarib/khosh* yaitu sebab yang khusus, dimana Ali Jum'ah menulis kitab tersebut untuk menjelaskan dalil-dalil jumhur ulama fikih dalam menjawab permasalahan-permasalahan

khilafiyyah yang sering menjadi perdebatan di tengah umat. Selaiun itu beliau ingin menjelaskan pada umat islam bahwa permasalahan tersebut bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama sehingga tidak boleh permasalahan yang sifatnya *khilafiyyah* dijadikan sebagai ukuran untuk memecah belah umat dengan mengklaim dan mengklasifikasi pendapat kelompoknya yang paling benar. Tetapi yang harus dijadikan pegangan oleh umat Islam adalah cinta terhadap Allah dan Rasul-Nya karena hal ini akan memperkuat persatuan kaum muslimin. *Kedua sababun ba'iid/aam* yaitu sebab yang sifatnya umum. Pada sebab kedua ini, Ali Jum'ah menulis kitab *al-Bayan*, tujuannya untuk mempersatukan umat Islam di bawah tiga kaidah yaitu 1) *Laa yunkaru fiimaa al-mukhtalaf fihi wainnamaa yunkaru fiimaa al-muttafaq 'alaih* yaitu tidak mengingkari pendapat orang lain pada perkara yang diperdebatkan oleh para ulama tetapi yang harus diingkari adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. 2) *Laa yu'taradhu bimadzhabin 'ala madzhabin* yaitu tidak dipertentangkan antara satu madzhab dengan madzhab yang lain karena banyaknya madzhab merupakan keluasan dan kemudahan bagi umat Islam untuk memilih pendapat mana yang sesuai dengan kondisi kemaslahatannya. Ketika tumbuh sikap toleran terhadap madzhab atau kelompok lain maka tidak akan ada rasa iri dan benci sehingga muncullah rasa cinta yang akan memperkuat persatuan kaum muslim. 3) *al-Ijtihad laa yanqudhu bi al-ijtihaad* yaitu sebuah ijtihaad dari seorang ulama tidak bisa membatalkan ijtihaad ulama lain. Semua berjalan di atas ijtihaadnya masing-masing tanpa harus saling menyalahkan.

Ali Jum'ah membagi kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* menjadi dua jilid. Jilid pertama terdapat 100 permasalahan yang menyibukkan pikiran umat Islam dan tidak jarang hal itu memicu konflik internal kaum muslimin. Pada 100 permasalahan tersebut ia kelompokkan menjadi lima bab sesuai dengan topik permasalahan. Berikut rinciannya:

- a. Pada jilid pertama kitab ini terbagi menjadi 5 bab di antaranya:
 - 1) Permasalahan umum tentang Islam dan akidah. Pada bab ini dibagi menjadi 2 pasal. Pasal pertama membahas tentang pengenalan Islam dan jawaban atas kerancuan (*syubhat*) tentang Islam. Pada pasal ini terdapat 23 permasalahan. Pasal kedua

- membahas tentang akidah dan tauhid. Pada pasal ini terdapat 10 permasalahan.
- 2) Permasalahan yang berhubungan dengan Nabi SAW dan prinsip-prinsip fikih Islam. Pada bab ini dibagi menjadi 2 pasal. Pasal pertama membahas tentang apa saja yang berhubungan dengan Nabi SAW. Pada pasal ini terdapat 15 judul permasalahan. Pasal kedua membahas tentang prinsip-prinsip fikih dan perkara-perkara *khilafiyat*. Pada pasal ini mencakup 4 judul permasalahan.
 - 3) Permasalahan yang berhubungan dengan ibadah. Pada bab ini dibagi menjadi lima pasal. Pasal pertama membahas tentang dzikir. Pada pasal terdiri 6 judul permasalahan. Pasal kedua membahas tentang shalat. Pada pasal ini terdiri dari 12 judul permasalahan seputar shalat. Pasal ketiga membahas tentang zakat. Pada pasal ini terdiri dari 4 judul permasalahan tentang zakat. Pasal keempat membahas tentang puasa. Pada pasal ini terdiri dari 6 judul permasalahan. Pasal kelima membahas tentang haji dan terdiri dari 2 judul masalah.
 - 4) Permasalahan yang berhubungan dengan tasawwuf. Pada bab ini terdiri dari 7 permasalahan seputar tasawwuf
 - 5) Permasalahan yang berhubungan dengan adat. Pada bab ini terdiri dari 11 permasalahan seputar adat.
- b. Pada jilid kedua kitab ini terdapat 35 judul masalah yang beliau bagi menjadi 5 pasal yaitu:
- 1) Pembahasan tentang akidah. Pada pasal pertama ini terdapat 10 judul masalah seputar akidah. Meskipun di kitab jilid kedua ini juga membahas tentang akidah, tetapi permasalahan di dalamnya berbeda dengan permasalahan yang ada di kitab jilid pertama.
 - 2) Pembahasan tentang ushul fikih dan kaidah-kaidahnya. Pada pasal ini terdapat 5 permasalahan seputar teori usul fikih yang cukup menjadi perdebatan hangat ditengah kaum muslimin.
 - 3) Pembahasan tentang fikih ibadah. Pada pasal ini terdapat 11 judul permasalahan seputar ibadah. Meskipun di kitab jilid kedua ini

juga membahas tentang ibadah, tetapi permasalahan di dalamnya berbeda dengan permasalahan yang ada di kitab jilid pertama

- 4) Pembahasan tentang tasawwuf. Pada pasal ini terdapat 6 judul masalah yang juga cukup kuat perdebatannya dari dulu hingga sekarang.
- 5) Pembahasan tentang adat, nikah, dan hukum waris. Pada pasal ini terdapat 3 judul masalah.

Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* ini sudah diterbitkan sebanyak dua belas kali oleh Dar al-Muqaththam Kairo Mesir. Pada jilid pertama kitab ini berjumlah 400 halaman dan 185 referensi yang beliau jadikan pijakan untuk memperkuat tulisannya. Sedangkan pada jilid kedua berjumlah 291 halaman lebih sedikit dari jilid pertama dan 192 referensi yang sedikit lebih banyak dari jilid pertama. Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* ini juga dijadikan sebagai kitab pegangan oleh para guru dan syaikh al-Azhar untuk menjelaskan hakikat Islam dari hal-hal yang dapat merusak dan mengaburkannya. Seperti Duktur Mahmud ‘Abidin al-Azhari menjelaskan kitab ini kepada para jama’ahnya sebanyak 45 pertemuan di masjid Duktur Hasan ‘Abbas *rahimahullah* yang terletak di ‘Ain as-Shairoh Mesir Qadimah Kairo. Begitu juga kitab ini dibahas tuntas kepada para jama’ahnya oleh Duktur Mukhtar Muhsin sebanyak 48 pertemuan.

B. Temuan Penelitian:

Dari hasil penelitian penulis, pembahasan *hudud* pada kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* terdapat pada bab awal permasalahan umum tentang Islam dan akidah, yaitu pada pasal pertama halaman 73. Isi pada bab dan pasal tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Awalnya Ali Jum’ah mendapatkan pertanyaan bagaimana penerapan syariat Islam pada masa sekarang ini? Dan bagaimana dengan hukuman *had* dalam syariat Islam (bisakah hal itu diterapkan)?. Ali Jum’ah tidak langsung menjelaskan pertanyaan tersebut tetapi menjelaskan tentang permasalahan penerapan syariat harus dipahami secara menyeluruh seperti perkataan beliau dalam kitabnya:

قضية تطبيق الشريعة لا بد أن تفهم بصورة أوسع من قصرها على تطبيق الحدود العقابية بإزاء الجرائم، كما هو شائع في الأدبيات المعاصرة، سواء عند المسلمين أو عند غيرهم؛ حيث إن تطبيق الشريعة له جوانب مختلفة، وله درجات متباينة، وليس من العدل أن نصف واقعاً ما بأنه لا يطبق الشريعة لمجرد مخالفته لبعض أحكامها في الواقع المعيش، حيث إن هذه المخالفات قد تمت على مدى التاريخ الإسلامي وفي كل بلدان المسلمين ودولهم بدرجات مختلفة ومتنوعة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين: إن هذه البلاد قد خرجت عن ربة الإسلام أو إنها لا تطبق الشريعة، بل لا نبعد في القول إذا ادعينا أن كلمة تطبيق الشريعة كلمة حادثة.

“Permasalahan tentang penerapan syariat Islam harus dipahami secara lebih luas dari hanya sekedar memandangnya sebatas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak kriminal seperti pemahaman yang tersebar pada Pendidikan modern, baik oleh kaum muslimin ataupun yang lainnya. Sesungguhnya penerapan syariat Islam mempunyai tinjauan yang bermacam-macam. Kemudian menjadi tidak adil mengklaim sebuah realitas tidak menerapkan syariat Islam hanya karena berbeda dengan beberapa hukum syariat Islam di dalam realitas kehidupan. Perbedaan ini sebenarnya sudah terjadi sepanjang sejarah Islam, pada setiap negara kaum muslimin dengan tingkatan yang berbeda-beda dan tidak satupun dari para ulama mengatakan bahwa negara ini telah keluar dari ikatan Islam atau tidak menerapkan syariat Islam bahkan istilah penerapan syariat Islam merupakan istilah yang baru.”

Kemudian Ali Jum'ah melanjutkan penjelasannya dengan menyajikan beberapa hakikat yang harus diketahui yang terangkum dalam beberapa poin di bawah ini:

إن الشريعة تعني ما يتعلق بالعقائد والرؤية الكلية, من أن هذا الكون مخلوق لخالق, وأن الإنسان مكلف بأحكام شرعية تصف أفعاله, وأن هذا التكليف قد نشأ من قبيل الوحي وأن الله أرسل به الرسل وأنزل الكتب, وهناك يوم آخر للحساب وللثواب والعقاب, كما أنها تشتمل على الفقه الذي يضبط حركة السلوك الفردي والجماعي والاجتماعي, وتشتمل أيضا على منظومة من الأخلاق, وطرق التربية, ومناهج التفكير, والتعامل مع الوحي قرآنا وسنة, ومع الواقع مهما تغير أو تبدل أو تعقد.

Makna dari syariat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan akidah dan pandangan yang universal (kulli) bahwa alam semesta ini diciptakan oleh sang pencipta, dan manusia dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum syariat yang melekat pada perbuatannya. Tuntutan ini berdasarkan wahyu bahwa Allah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kitab yang menjelaskan adanya hari akhirat yaitu perhitungan amal baik dan buruk serta siksaannya. Kitab yang diturunkan itu juga meliputi fikih tentang aturan aktifitas baik individu, kolektif, dan social kemasyarakatan. Selain itu, kitab tersebut mencakup didalamnya aturan berakhlak yang baik, metode pendidikan, pemikiran, berinteraksi dengan al-Qur'an dan hadits, aturan berinteraksi dengan realitas yang selalu mengalami perubahan dan pergantian.

Pada poin berikutnya Ali Jum'ah lebih mengerucut pada pembahasan *hudud* seperti penjelasannya di bawah ini:

قضية الحدود تشتمل على جانبين: الجانب الأول هو الاعتقاد بأحقية هذا النظام العقابي في ردع الإجرام, وفي تأكيد إثم تلك الذنوب, ومدى فظاعتها وتأثيرها السيئ على الاجتماع البشري, ورفضها بجميع صورها نفسيا لدي البشر, وأن هذا

النظام العقابي لا يشتمل على ظلم في نفسه, ولا على عنف في ذاته. والجانب الآخر هو أن الشرع قد وضع شروطا لتطبيق هذه الحدود, كما أنه قد وضع أوصافا وأحوالا لتعليقها أو إيقافها, وعند عدم توفر تلك الشروط أو هذه الأوصاف والأحوال فإن تطبيق الحدود مع ذلك الفقد يعد خروجًا عن الشريعة.

Permasalahan hudud mencakup dua aspek: pertama, hudud harus diyakini sebagai sistem hukuman fisik yang paling utama untuk mencegah terjadinya kriminalitas, sebagai penguat bahwa perbuatan tersebut masuk dosa besar, memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan dengan syariat hudud dapat mencegah semua bentuk kriminalitas di masyarakat. Hudud juga tidak boleh dianggap sebagai hukuman yang sifatnya aniaya terhadap para pelaku kejahatan dan juga bukan sebuah hukuman yang sifatnya tidak manusiawi. Aspek kedua, syariat Islam telah menetapkan syarat-syarat dalam penerapan hudud. Sebagaimana syariat juga menetapkan kriteria dan kondisi seperti apa agar bisa diterapkan atau ditangguhkan. Ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi atau tidak masuk kriteria dan kondisi yang memungkinkan untuk diterapkan, maka hudud tidak bisa diterapkan. Jika dipaksa diterapkan maka sudah keluar dari ketentuan syariat.

Setelah Ali Jum'ah menjelaskan dua aspek tentang *hudud* yang penting untuk dipahami, lalu ia menyuruh kaum muslimin agar menggali teks-teks tentang *hudud* dimana hasil dari pencarian tersebut akan didapati *hudud* itu bukan ajang untuk balas dendam atau yang lainnya seperti penjelasannya di bawah ini:

المتأمل في نصوص الشريعة يجد أن الشرع لم يجعل الحدود لغرض الانتقام بل لردع الجريمة قبل وقوعها. ويرى أيضا أن الشرع لا يتشوف لإقامتها بقدر ما يتشوف للعفو والصفح والستر عليها. والنصوص في هذا كثيرة.

Orang yang meneliti tentang teks-teks syariat tentang hudud, maka ia akan dapati bahwa syariat tidak menjadikan penerapan hudud sebagai ajang untuk balas dendam tetapi untuk mencegah sebelum terjadinya kriminalitas. Selain itu ia akan memahami bahwa syariat lebih menginginkan untuk memaafkan dan menyembunyikan aib pelaku daripada penerapan hudud itu dilaksanakan.

Pada poin selanjutnya Ali Jum'ah membeberkan data bahwa di Mesir tidak diterapkan pelaksanaan *hudud* karena beberapa alasan seperti di bawah ini:

لمدة نحو ألف سنة لم تقم الحدود في بلد مثل مصر, وذلك لعدم توفر الشروط الشرعية التي رسمت طرقا معينة للإثبات والتي نصت على إمكانية العودة في الإقرار والتي شملت ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ادرءوا الحدود بالشبهات)), وقوله : ((ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة)).

Selama seribu tahun di negara seperti Mesir hudud tidak diterapkan disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat dan menetapkan kemungkinan untuk merujuk pengakuannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW.: “Tangguhkanlah penerapan hudud karena terdapat syubhat”. “Dalam sabdanya yang lain: Karena sesungguhnya imam salah dalam memaafkan masih lebih baik dari salah dalam menghukum”.

Ali jum'ah juga beralasan bahwa *hudud* tidak bisa diterapkan jika berada pada zaman *syubhat*, zaman fitnah, zaman darurat, dan zaman kebodohan, dimana zaman-zaman tersebut menghendaki penerapan *hudud* ditangguhkan. Seperti uraian beliau di bawah ini:

قد يوصف العصر بصفات تجعل الاستثناء مطبقا بصورة عامة في حين أن الاستثناء بطبيعته يجب أن يطبق بصورة مقصورة عليه, من ذلك وصف العصر بأنه عصر ضرورة, ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر شبهة, ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر فتنة, ومن ذلك وصف العصر بأنه عصر جهالة, وهذه الأوصاف تؤثر في الحكم الشرعي, فالضرورة تبيح المحظور حتى لو عمت واستمرت ولذلك أجاز الدفن في الفساقى المصرية مع مخالفتها الشريعة, والشريعة تجيز إيقاف الحد كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة, حيث عمت الشبهة بحيث فقد الشرط الشرعي لإقامة الحد. والإمام جعفر الصادق والكرخي من الحنفية وغيرهما أسقطوا حرمة النظر إلى النساء العاريات في بلاد ما وراء النهر لإطباقهن على عدم الحجاب حتى صار غض البصر متعذرا إن لم يكن مستحيلا. ونص الإمام الجويني في كتابه ((الغياثي)) على أحوال عصر الجهالة وفصل الأمر تفصيلا عند فقد المجتهد ثم العالم الشرعي ثم المصادر الشرعية فماذا يفعل الناس؟

Sebuah zaman memiliki karakteristik atau situasi tertentu yang menjadikan sebuah hukum pengecualian sesuai dengan kondisi umum, dimana pengecualian tersebut harus diterapkan dalam kondisi yang sempit. Ada empat zaman (dimana hal ini dapat mempengaruhi hukum syariat dan hukum pidana had tidak bisa diterapkan) di antaranya: zaman dadurat, zaman syubhat, zaman fitnah, dan zaman kebodohan. Keempat karakteristik zaman ini dapat mempengaruhi sebuah hukum syar'i. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang meskipun sesuatu itu sudah tersebar luas dan terus-menerus. Seperti para ulama membolehkan seseorang mengubur jenazah dalam sebidang tanah yang menjadi kolam air di Mesir

dimana hal itu bertentangan dengan syariat. Zaman syubhat membolehkan untuk menanggukkan penerapan hudud seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab dimana pada saat itu terjadi kerusakan dimana syubhat sudah tersebar luas sehingga tidak dapat terpenuhinya syarat-syarat penerapan hudud. Imam Ja'far as-Shadiq dan al-Karkhi dari madzhab al-Hanafi juga selain dari keduanya membolehkan melihat perempuan yang telanjang di negara-negara belakang sungai disebabkan mereka tidak memakai hijab dan sulitnya untuk menundukkan pandangan jika tidak mustahil. Imam al-Juwaini dalam kitabnya "al-Giyatsi" menjelaskan kondisi-kondisi zaman kebodohan terhadap ilmu agama dan memperinci kebodohan tersebut dengan tidak adanya mujtahid, orang yang mengerti agama, dan sumber-sumber syariat. Lalu apa yang bisa diperbuat orang-orang?

Dalam kaitannya dengan ini, kemudian Ali Jum'ah menjelaskan bahwa sebuah hukum tidak bisa terealisasi jika objek hukumnya tidak ada. Seperti uraian beliau di bawah ini:

ويتصل بهذا ما أسماء الأصوليون في كتبهم كالرازي في ((المحصول)) بالنسخ العقلي وهو أثر ذهاب المحل في الحكم وهو تعبير أدق لأن العقل لا ينسخ الأحكام المستقر وذلك بإجماع الأمة ولكن الحكم لا يطبق إذا ذهب محله. فالأمر بالوضوء جعل غسل اليد إلى المرفقين, والأحكام المترتبة على وجود الخلافة الكبرى, والأحكام المترتبة على وجود النقدين بمفهومهما الشرعي من ذهب أو فضة وغير ذلك كثير.

Berhubungan dengan ini pula, apa yang disebut oleh para ahli usul fikih dalam kitab-kitab mereka seperti ar-Razi dalam kitabnya "al-Mahshul" dengan istilah revisi akal yaitu efek dari hilangnya target hukum. Ini merupakan ungkapan atau istilah yang lebih dalam, karena menurut konsensus para ulama, akal tidak bisa merevisi atau menghapus hukum-hukum yang sudah tetap. Namun hukum tidak bisa diterapkan jika target hukumnya tidak ada. Seperti pada permasalahan wudhu', tangan sampai

siku adalah salah satu anggota badan yang wajib dicuci. Ketika tangannya tidak ada, maka menjadi sulit untuk menerapkan rukun mencuci tangan atau mustahil melakukannya. Begitu juga dengan hukum-hukum yang timbul dari adanya budak, khilafah global, dua mata uang emas dan perak dan lain sebagainya.

Seperti penjelasan sebelumnya, Ali Jum'ah mengatakan bahwa sebuah zaman dapat mempengaruhi suatu hukum dan bahkan hukum itu berubah-ubah mengikuti kondisi suatu zaman. Karena itu bagi seorang yang berakal dan berilmu sangat perlu mengerti kondisi sebuah zaman. Seperti uraian beliau di bawah ini:

من أجل الوصول إلى تنفيذ حكم الشرع ومراد الله سبحانه منه والوصول إلى طاعة الله ورسوله, يجب أن ندرك الواقع. ورد في شعب الإيمان من موعظة آل داود عليه السلام, عن وهب بن منبه يقول: ((وعلى العاقل أن يكون عالماً بزمانه, ممسكاً للسانه, مقبلاً على شأنه)). ومن هنا فإن الفقهاء نصوا على أن الأحكام تتغير بتغير الزمان إذا كانت مبنية على العرف (نص المادة ٩٠ من مجلة الأحكام العدلية), وأجاز المذهب الحنفي في جانب المعاملات الفاسدة فديار غير المسلمين. فتغيرت الأحكام يتغير المكان, وقاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات)) المأخوذة من قوله تعالى: ((فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه, إن الله غفور رحيم)). تجعل الشأن يتغير بتغير الأحوال, وكذلك تتغير هذه الأحكام بتغير الأشخاص. فأحكام الشخص الطبيعي الذي له نفس ناطقة تختلف عن الشخص الاعتباري حيث لا نفس له ناطقة. وهذه الجهات الأربع وهي الزمان, المكان, والأشخاص,

والأحوال, هي التي نص عليها القراني كجهات للتغير يجب مراعاتها عند إيقاع

الأحكام على الواقع

Untuk sampai kepada pelaksanaan hukum syariat, ketentuan Allah SWT, dan mendapatkan ketaatan pada Allah dan Rasunl-Nya, wajib bagi kita mengetahui sebuah realitas. Di dalam bab cabang-cabang iman terdapat nasehat dari keluarga Daud AS. Diriwayatkan oleh Wahhab bin Munabbih bahwa Nabi Daud AS. Berkata: “Bagi orang yang berakal harus mengerti zamannya, menahan lisannya, dan konsentrasi dengan urusannya”. Dari nasehat ini, para ulama fikih menetapkan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan zaman ketika dibangun di atas budaya masyarakat. (teks halaman 90 dari majalah hukum-hukum pengadilan). Madzhab Hanafi membolehkan transaksi akad yang rusak di negara non muslim maka hukum berubah sesuai tempatnya. Sebuah kaidah mengatakan: Darurat membolehkan hal yang dilarang. Kaidah ini terinspirasi dari ayat: “Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sessungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” Menjadikan hukum berubah sesuai kondisi. Begitu juga hukum berubah sesuai perubahan individu. Hukum bagi orang yang memiliki akal dan dapat berfikir berbeda dengan orang yang tidak dapat berfikir. Dari sini dapat disimpulkan terdapa empat aspek perubahan yaitu perubahan waktu, tempat, individu, dan kondisi, dimana hal ini telah ditetapkan oleh al-Qarafi sebagai factor pengubah hukum yang wajib diperhatikan ketika akan menetapkan hukum-hukum pada sebuah realitas.

Setelah Ali Jum’ah menjelaskan tentang hakikat *hudud*, kemungkinan penerapannya, dan argumentasinya, kemudian ia mengomentari negara-negara yang menerapkan syariat *hudud* seperi uraian beliau dibawah ini:

يمكن عرض نجارب الدول الإسلامية المعاصرة مع قضية تطبيق الحدود:

(١) فنجد أن السعودية تطبق الحدود عن طريق القضاء الشرعي مباشرة من غير نصوص قانونية مصوغة في صورة قانون للعقوبات الجنائية، والتطبيق السعودي للحدود مستقرة وليس هناك أي دعوة أو تزج مؤثر لإلغائها أو إيقافها أو تعليقها، وإن كانت هناك بعض النداءات من معارضي النظام السياسي تدعو إلى ضبط الإجراءات وتصف النظام الحالي بعدم العدالة وباعتدائه على حقوق الإنسان.

(٢) حالة باكستان، والسودان، وإحدى ولايات نيجيريا، وإحدى ولايات ماليزيا، ويران التي نصت قوانينهم على الحدود الشرعية. فتم الإيقاف الفعلي لها من ناحية الواقع في باكستان، وتم تعليقها بعد عهد النميري في السودان، وتم تعليقها أيضا في إيران وماليزيا، وطبقت في ولاية نيجيريا بصورة غاية في الجزئية ويشيع في كل هذه البلدان العمل بالتعزير بدلا من تطبيق الحد، فيما عدا الجرائم التي تستوجب الإعدام

(٣) بقية الدول الإسلامية التي يبلغ عددها ٥٦ دولة من مجموع ١٩٦ دولة في العالم سككت في قوانينها عن قضية الحدود، وكانت وجهة النظر في هذا الشأن أن عصرنا عصر الشبهة عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ادعوا الحدود بالشبهات))،

كما أن الشهود المعتبرين شرعاً لإثبات الجرائم التي تستلزم الحد قد فُقدوا من زمن بعيد؛ فيورد التنوخي في كتابه ((نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة)) في معنى غياب العدول من الشهود فيقول: ((حدثني أبو الحسين محمد بن عبيد الله المعروف بابن نصرويه، قال قبل التيمي القاضي كان قديماً عندنا بالبصرة ستة وثلاثين ألف شاهد في مدة ولايته.))

ويقول في موضع آخر: ((سمعت قاضي القضاة أبا السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى يقول: الشاهد إذا لم تكن فيه ثلاث خلال .. إلى أن قال: ثم قال: ما ظنكم ببلد فيه عشرات ألوف ناس، ليس فيهم إلا عشرة أنفس أو أقل أو أكثر، وأهل ذلك المصر كلهم يريدون الحيلة على هؤلاء العشرة، كيف يسلمون إن لم يكونوا شياطين الإنس في التيقظ والذكاء والتحرز والفهم))

Mungkin perlu untuk menganalisa di beberapa negara Islam yang berupaya menerapkan hukuman pidana had: 1) Kita dapatkan di negara Saudi Arabia menerapkan hukum pidana had secara langsung melalui pengadilan negara tanpa tertulis di undang-undang yang terwujud dalam KUHP (Kompilasi undang-undang hukum pidana). Penerapan hudud ini di Saudi sangat konsisten dan tidak menerima alasan apapun yang mempengaruhi untuk menggugurkan, menanggukkan, atau menggantungkannya. Walaupun di sana ada sebagian penggugat dari oposisi politik yang menyerukan penetapan undang-undang pidana dan menyebut aturan yang ada saat ini tidak adil dan menyalahi hak-hak manusia. 2) Kondisi di Pakistan, Sudan, salah satu wilayah di Nigeria dan Malaysia, dan Iran yang menetapkan undang-undang hukum pidana had sesuai syariat, tetapi pada realisasinya undang-undang tersebut ditanggukkan secara total di Pakistan. Digantungkan juga undang-undang tersebut di Sudan, Iran, dan Malaysia

setelah masa pemerintahan Numairi. Diterapkan di satu wilayah Nigeria tetapi sangat jarang. Justru yang terjadi adalah negara-negara tersebut sering kali menerapkan ta'zir sebagai pengganti dari hukum pidana had selain tindak kriminal yang wajib menerima hukuma mati. 3) Negara-negara Islam lainnya yang mencapai 56 negara dari total 196 negara di dunia, tidak menetapkan undang-undang hukum pidana had. Alasannya karena zaman kita ini merupakan zaman syubhat yang merajalela dan Nabi SAW. bersabda: tangguhkanlah penerapan hudud pada kondisi syubhat. Disisi lain para saksi yang dilegalkan oleh syariat untuk menetapkan tindak kriminal yang harus dihukum pidana had telah lama hilang. At-Tanukhi dalam kitabnya "nisywar al-muhadharah wa akhbar al-mudzakarah". Ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu al-Husain bin 'Ubaidillah al-Ma'ruf yang dikenal dengan sebutan Ibnu Nashrawaih ia berkata: "Sebelum at-Taimi, dulu ada seorang Qadhi kami di Bashrah mendapatkan tiga puluh enam ribu saksi selama kepemimpinannya. At-Tanukhi dalam bab lain mengatakan: Aku pernah mendengar Qadhi Abu as-Saib 'Utbah bin 'Ubaidillah bin Musa, ia berkata: Bagaimana menurut kalian jika disebuah negeri memiliki jumlah penduduk sebanyak sepuluh ribu namun saksi yang adil hanya kisaran sepuluh orang, kurang atau lebih sedikit, yang dimana semua penduduknya akan berdalih dengan sepuluh orang tersebut. Bagaimana penduduk negeri itu akan selamat jika setan-setan dari golongan manusia lebih dominan

Setelah Ali Jum'ah memaparkan kondisi negara Islam yang berusaha menerapkan hukum pidana had dan mengomentarnya, ia menjelaskan bahwa syariat sebenarnya tidak ingin menerapkan hudud sehingga tidak perlu melakukan penyelidikan seperti penjelasannya di bawah ini:

والتفتيش للوصول إلى الحقيقة التي تؤدي إلى إقامة الحد ليس من منهاج الشريعة،
 فإن ما عزا أتى يقر على نفسه، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه أربع مرات،
 ثم أحاله على أهله لعلهم يشهدون بقله عقله أو جنونه، ثم أوجد له المخارج، ولما
 جزع وفر أثناء إقامة الحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله

عنهم: ((هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه)). وأخذ العلماء من هذا جواز الرجوع عن الإقرار ما دام في حق من حقوق الله، وليس بشأن حق من حقوق البشر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن الطرف الآخر للجريمة وهي المرأة التي زنا بها، ولم يفتش عنها، حتى كنوع من أعمال استكمال التحقيق. وروى عن أبي بكر وعمر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن السارق كان يؤتى به إليهم فيقولون له: ((أسرقت؟ قل: لا))

Melakukan sebuah penyelelidikan untuk mengungkap bukti yang nyata terhadap pelaku kejahatan sehingga hukuman had itu dapat ditegakkan, hal itu bukan merupakan langkah yang dianjurkan oleh syariat. Contoh kasus seperti yang terjadi pada sahabat Ma'iz yang datang kepada Rasulullah SAW. mengaku dirinya telah berzina dengan seorang perempuan. Tetapi Nabi SAW. tidak mengindahkan dan memalingkan wajahnya sebagai tanda tidak ingin menanggapi pengakuannya. Ma'iz datang kepada Nabi SAW. sebanyak empat kali dan beliau tetap tidak menghiraukannya. Akhirnya Nabi SAW. mengkrsocek sendiri kepada keluarganya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya apakah Ma'iz ini gila. Setelah keluarganya mengatakan bahwa Ma'iz tidak gila, lalu Nabi SAW. memberikan keputusan untuk dilaksanakannya hukuman had pada diri Ma'iz. Namun di tengah berlangsungnya hukuman had, Ma'iz tidak sanggup menahan rasa sakit lalu kabur dari tempat eksekusi hukumannya. Ketika sahabat ingin mengejar Ma'iz, Nabi SAW. mencegahnya seraya mengatakan biarkanlah barangkali ia bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. Dari kisah ini para ulama menetapkan bahwa boleh hukumnya menarik pengakuannya disaat berlangsungnya hukuman selama tindakan kejahatannya hanya bersangkutan dengan hak Allah bukan yang berhubungan dengan hak manusia. Menurut Ali Jum'ah, menariknya pada kejadian tersebut, Nabi SAW. tidak menanyakan siapa wanita yang telah berzina dengannya. Dari sini menunjukkan bahwa sebenarnya syariat enggan untuk menjalankan

hukuman had. Bahkan diriwayatkan dari Abu Bakr, Umar, Abu Darda', dan Abu Hurairah, bahwasanya seorang pencuri dibawa kehadapan mereka. Lalu mereka bertanya apakah kamu mencuri? Katakan tidak.

Dibagian terakhir, Ali Jum'ah menyimpulkan dari seluruh penjelasannya di atas dengan paparan sebagai berikut:

فالنص على الحدود كما ذكرنا يفيد أساسا تعظيم الإثم الذي جعل الحد بإزائه،
وأنه من الكبائر والقبائح التي تستوجب هذا العقاب العظيم، ويؤدي ذلك إلى ردع
الناس عن هذه الجرائم، على حد قوله تعالى : ((ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ
فَاتَّقُونِ))، ويكمل الحد في هذا الشأن الضبط الاجتماعي الذي يتولد من الثقافة
السائدة لدى الكافة باستعظام هذه الآثام، ونبذ من اشتهر بها أو أعلنها أو تفاخر
بفعلها، كما أن الشرع فتح باب التوبة، وأمر بالستر في نصوص عديدة من الكتاب

السنة

Beberapa teks yang berbicara tentang hudud seperti yang disebutkan di atas, memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya perbuatan kriminal yang dikenai had termasuk dosa besar dan perbuatan keji yang perlu dihukum berat. Dengan syariat hudud dapat mencegah manusia dari perbuatan keji tersebut seperti dalam firman Allah SWT.:Demikianlah Allah menakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Wahai hamba-hamba-Ku maka bertakwalah kepada-Ku. Hukum pidana had dalam hal ini melengkapi kontrol sosial yang muncul dari budaya yang berlaku untuk semua dengan memandang beratnya dosa-dosa ini, menolak memasyhurkan tindak hukuman pidana had, mengumumkannya, dan bangga dengan pelaksanaannya. Karena syariat membuka pintu taubat secara lebar-lebar dan memerintahkan untuk menutup aibnya berdasarkan dari teks-teks al-Qur'an dan Hadits.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Ali Jum'ah Tentang *Hudud* Dalam *Kitab al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*

Pada bab ini akan dibahas bagaimana pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* di dalam kitabnya *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*. Namun sebelumnya peneliti akan menguraikan pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* secara umum di dalam kitab lainnya dimana ia menjadi salah satu penulisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat referensi peneliti dalam menganalisis pandangan Ali Jum'ah.

Di dalam kitab *haqaiqu al-Islam fi Muwajahati Syubhati al-Musyakkikin* Ali Jum'ah menyebutkan sesungguhnya orang yang mempelajari Islam dan hukum-hukumnya ia akan mengetahui dasar pensyariaan *hudud* dalam Islam secara umum. Di bawah ini pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* secara umum:⁹⁷

- 1) *Hudud* dalam Islam disyariatkan untuk mencegah manusia terjatuh dalam dosa yang keji dan agar tidak mengulangi perbuatan dosa besar yang telah dilakukannya. *Hudud* juga dipahami sebagai pencegahan bagi seseorang dari berkeinginan melakukan perbuatan keji yang sama yang telah dilakukan oleh orang lain. Maka dari itu disyariatkannya *hudud* sebagai pencegah dari melakukan kejahatan atau perbuatan dosa yang keji baik individu atau secara umum.
- 2) Tujuan dari *hudud* bukanlah untuk menurutkan hasrat dan keinginan untuk menjatuhkan manusia pada kesengsaraan, menyiksa mereka dengan memotong tangan, membunuh, dan merajamnya. Tetapi tujuan dari pada *hudud* adalah mencari keutamaan kebaikan, dan hikmah. Karena itu syariat Islam sangat memudahkan terkait permasalahan *hudud*. Ketika kondisi masyarakat dalam keadaan lapar, rasa takut, dan

⁹⁷ 'Abdu al-Shabur Marzuq, 'Abdu al-'Azhim al-Muth'ina, Ali Jum'ah, Muhammad 'Imarah, Mahmud Hamdi Zaquq, *haqaiqu al-Islam fi Muwajahati Syubhati al-Musyakkikin*, (Kairo 2002) h. 541-542

sangat membutuhkan, maka *hudud* tidak bisa diterapkan. Hal ini pernah dilakukan oleh sayyidina Umar bin al-Khattab pada masa paceklik. Bahkan terdapat sabda Nabi SAW. yang mengindikasikan bahwa Islam sangat memudahkan perkara *hudud*. Islam menyuruh untuk menyembunyikan suatu perkara sebelum perkara itu sampai kepada hakim. Rasulullah SAW. bersabda kepada laki-laki yang menjadi saksi atas perzinaan:

لو سترته بثوبك كان خيرا لك

“*Seandainya kamu sembunyikan dengan bajumu (tidak menyampaikannya) maka hal itu baik bagimu*” (HR. Abu Daud)

- 3) Syariat Islam adalah syariat yang umum yang berlaku di setiap tempat dan waktu. Sedangkan manusia berbeda-beda dalam mengontrol dirinya. Maka mestinya ada suatu hukuman sebagai penghalang bagi orang yang lemah dalam mengontrol diri atau hawa nafsunya agar tidak jatuh pada perbuatan keji, perbuatan dosa yang sampai kepada ditegakkannya *hudud*, keluar dari agama Islam atau kekacauan lain yang dapat menimpa seluruh masyarakat baik secara *zhahir* maupun *bathin*.
- 4) *Hudud* merupakan salah satu aturan di antara aturan-aturan Islam lainnya. Maka tidak mungkin bisa memahami dan menerapkan *hudud* kecuali menerapkan aturan Islam lainnya. Jika tidak, maka hal itu tidak bisa berjalan secara selaras dan tidak akan mendapati hikmah Allah dari pensyariatan *hudud*.
- 5) Para ulama mempunyai kaidah “*dar’u al-hudud bi asy-syubhat*” yaitu meninggalkan pelaksanaan *hudud* disebabkan adanya ketidakjelasan seperti kurangnya saksi, tidak jelas apakah pelaku benar-benar melakukannya, atau kondisi masyarakat saat itu tidak ada yang pantas untuk menjadi saksi.
- 6) Islam adalah agama dan syariat *hudud* ada di setiap agama bahkan di peraturan perundang-undangan. Di dalam kitab Taurat hukum pidana zina bagi anak seorang pendeta adalah dibakar. Di dalam undang-

undang sebuah negara juga diterapkan hukum bunuh bagi pelaku kriminal yang berat

- 7) *Hudud* merupakan sebuah aturan hukum yang sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan hukuman selain *hudud*, tidak mempunyai nilai-nilai dan hikmah seperti *hudud*.

Dari uraian di atas, Ali Jum'ah menjelaskan konsep *hudud* secara umum. Allah mensyariatkan *hudud* sebagai kemaslahatan untuk manusia pada umumnya dan bentuk hukuman yang sudah ditetapkan di dalam syariat *hudud* sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Syariat *hudud* juga tidak melanggar hak asasi manusia justru memenuhi hak dan menciptakan keadilan di antara manusia. Karena mustahil Allah mensyariatkan *hudud* dan memerintahkan untuk menerapkannya bertentangan dengan nilai-nilai universal kehidupan makhluk-Nya. Jika *hudud* ini diterapkan, niscaya hal itu akan menciptakan kemaslahatan baik bagi individu maupun manusia secara umum.

Ali Jum'ah pernah ditanya perihal bagaimana kaum muslimin menerapkan syariat Islam pada era modern seperti sekarang ini, khususnya penerapan syariat *hudud*. Jawaban dari pertanyaan tersebut ia jawab di dalam kitabnya *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*. Permasalahan penerapan syariat Islam harus dipahami lebih luas daripada sekedar memahaminya dengan sebatas syariat *hudud* saja yang diterapkan kepada pelaku tindak kejahatan. Karena penerapan syariat Islam mempunyai banyak tinjauan yang bermacam-macam dan penerapan *hudud* hanya bagian kecil darinya. Sikap tidak adil ketika mengklaim sebuah negara dikatakan tidak menerapkan syariat Islam disebabkan berbedanya sistem negara dengan sebagian hukum-hukum syariat Islam. Perbedaan ini sudah terjadi di sepanjang sejarah Islam di berbagai negara Islam dengan tingkatan yang berbeda-beda. Tidak satupun dari para ulama menghukumi

suatu negara dengan sebutan negara anti Islam atau anti penerapan syariat Islam hanya karena tidak menerapkan syariat *hudud*.⁹⁸

Uriain dari penjelasan Ali Jum'ah di atas menggambarkan syariat *hudud* merupakan bagian kecil di antara syariat-syariat Islam lainnya. Syariat Islam tidak hanya berbicara tentang *hudud* tetapi ia meliputi akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak. Ketika syariat Islam harus dijalankan oleh seorang muslim, maka *hudud* tidak dipahami sebagai syariat Islam yang dominan atau harus lebih awal diterapkan diantara syariat Islam lainnya atau ia dijadikan sebuah ukuran untuk mengklasifikasi suatu negara dikatakan negara Islam atau bukan. Sehingga muncul kesimpulan dalam pandangan sebagian kelompok Islam bahwa ketika ada suatu negara tidak menerapkan syariat *hudud*, dianggapnya bukan negara Islam dan telah keluar dari ikatan Islam.

Kemudian Ali Jum'ah melanjutkan penjelasan pandangannya tentang *hudud* yang lebih spesifik dalam kitab *al-Bayan* nya. Menurut Ali Jum'ah *hudud* mencakup dua aspek yang harus disadari oleh kaum muslimin. *Pertama*, *hudud* harus diyakini sebagai syariat Islam yang perannya adalah mencegah terjadinya kejahatan atau tindak kriminal. Bentuk hukuman yang ada pada *hudud* harus diyakini juga sebagai hukum pidana yang paling unggul dibanding dengan bentuk hukuman apapun selain *hudud*. Karena setiap tindak kejahatan yang masuk dalam kategori *hudud*, maka kejahatan tersebut merupakan dosa yang sangat besar dan pelakunya harus dihukum jera yang dimana perbuatan jahat tersebut berdampak pengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Bagi kaum muslimin syariat *hudud* tidak boleh dianggap sebagai hukum pidana yang tidak manusiawi yang melanggar hak-hak manusia tetapi harus diyakini sebagai hukum pidana yang sangat adil yang akan menciptakan perdamaian baik secara individu maupun secara universal kehidupan manusia. *Kedua*, penerapan *hudud* ini mempunyai syarat, karakteristik, dan kondisi yang

⁹⁸ Ali Jum'ah, *al-Bayan Lima Yasyghalu al-adzhan*, (Kairo: 2014, Dar al-Muqaththam), h. Juz 1/73

tidak boleh diabaikan. Ketika syarat dan kondisi tersebut tidak terpenuhi maka penerapan *hudud* tidak bisa diterapkan. Jika memaksakan untuk menerapkannya, hal itu telah keluar dari aturan syariat dan justru akan mendatangkan kekacauan dan kezhaliman bukan kemaslahatan.⁹⁹

Di dalam kitabnya *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan* ia juga menjelaskan bahwa term *hudud* tidak dipahami sebagai ajang untuk balas dendam terhadap pelaku kejahatan atau hasrat untuk menjatuhkannya ke dalam hukuman fisik yang menyakitkan. Tetapi disyariatkannya *hudud* sebagai upaya Islam mencegah terjadinya tindak kriminal (pra-kriminal). Begitu juga Ali Jum'ah berpandangan bahwa syariat sendiri tidak sangat menginginkan atau berhasrat untuk menerapkannya tetapi syariat justru lebih kepada sikap memaafkan, mengampuni, dan menutup aib pelaku kejahatan.¹⁰⁰

Pelaksanaan *hudud* tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Ia mempunyai syarat-syarat yang sangat ketat agar bisa diterapkan sesuai tuntunan syariat. Karena itu Mesir sejak ribuan tahun yang lalu tidak menjalankan syariat *hudud* disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syaratnya. Ketika syarat-syarat itu tidak ada, maka penerapan *hudud* harus ditangguhkan atau dihindari karena pada saat itu muncul *syubhat* (benar dan salah menjadi samar) pada pelaksanaan *hudud*.¹⁰¹ Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi SAW.:

ادْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ١٠٢ وَقَوْلُهُ: ادْرُؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ

كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي

الْعُقُوبَةِ ١٠٣

⁹⁹ Ali Jum'ah, *al-Bayan...*, h. Juz 1/74

¹⁰⁰ Ali Jum'ah, *al-Bayan...*, h. Juz 1/74

¹⁰¹ Ali Jum'ah, *al-Bayan...*, h. Juz 1/74

¹⁰² Muhammad as-Sakhawai, *Mukhtashar al-Maqashid al-Hasanah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1985), h. 71. no. 46

¹⁰³ Muhammad as-Sakhawai, *Mukhtashar...* h. 75. no. 47

Artinya: “*Tangguhlkanlah hudud jika mengandung syubhat. Hindarilah penerapan hudud untuk kaum muslimin semampu kalian. Jika menemukan jalan keluarnya maka bebaskanlah dia karena sesungguhnya kesalahan Hakim dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menerapkan hukuman*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bagaimana pandangan Ali Jum’ah tentang *hudud* di dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*. Ali Jum’ah memandang *hudud* sebagai syariat Islam yang wajib dilaksanakan dan akan memberikan dampak kehidupan yang baik antar hubungan sesama manusia karena *hudud* bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak terjatuh pada sebuah kemaksiatan atau perbuatan jahat yang keji. Bentuk hukuman yang ada pada *hudud* juga akan memberikan efek jera terhadap pelakunya sehingga pelaku akan berfikir ulang untuk melakukan perbuatan jahatnya. Namun menurut Ali Jum’ah *hudud* tidak bisa dipahami sampai disitu saja karena *hudud* mempunyai makna yang lebih luas. Pemahaman yang timpang mengenai *hudud* akan mengakibatkan kebinasaan dan konflik internal bagi kaum muslimin. Seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok Islam mengenai *hudud*, mereka memahaminya hanya sebatas syariat yang harus diterapkan dan mempunyai dampak baik bagi tatanan kehidupan sosial masyarakat setempat. Mereka mengabaikan syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga *hudud* bisa diterapkan sesuai syariat. Menurut Ali Jum’ah untuk menerapkan *hudud* tidak hanya bermodalkan semangat untuk menerapkannya tetapi juga harus dilihat adakah syarat-syaratnya terpenuhi dan adakah penghalang yang menghalangi untuk diterapkannya *hudud*. Bahkan menurutnya, syariat Islam sendiri tidak menginginkan atau enggan untuk menerapkan *hudud*. Syariat justru mengedepankan sikap memaafkan dan menyuruh untuk menutup aib perbuatan keji tersebut agar tidak sampai kepada hakim. Dari aspek bentuk hukuman yang ada pada *hudud* seperti potong tangan, cambuk, rajam, dan membunuh, ia memahaminya sebagai bentuk hukuman yang sudah final karena hal tersebut sudah jelas dalam syariat dan tidak bisa ditafsiri untuk diubah bentuk hukumannya. Hal ini berbeda dengan

kelompok lain dalam Islam yang memandang bentuk hukuman ini tidak manusiawi sehingga harus ditafsiri ulang menjadi bentuk hukuman yang lain. Ali Jum'ah menolak karena dalil-dalil yang menegaskan tentang bentuk hukuman *hudud* sudah bersifat *qath'i dalalah* yaitu maknanya sudah jelas dan tidak membutuhkan penafsiran lain. Ali Jum'ah justru lebih mengkritisi kepada epistemologi dari pensyariaan *hudud* dan aspek penerapannya. Menurutnya, Islam sendiri menyuruh untuk sebisa mungkin menghindari pelaksanaan penerapan *hudud* ini dan lebih mengedepankan kasih sayang dengan memaafkan dan menutupi aib saudaranya agar bertobat secara sembunyi.

Pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* ini, juga diperkuat oleh muridnya yaitu syekh Usamah al-Azhari bahwa syariat pada hakikatnya tidak menginginkan penerapan *hudud* itu dilaksanakan karena syariat sendiri memberikan syarat yang ketat dan sulit untuk dipenuhi. Seperti syarat saksi bagi pelaku zina terdiri dari empat orang laki-laki yang semuanya bersifat '*udul* yaitu mempunyai sifat yang takut kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan serta keempat-empatnya melihat secara langsung kemaluan laki-laki dan perempuan terjadi hubungan intim (*dukhl*). Dari sini bisa disimpulkan seakan-akan syariat memerintahkan untuk diterapkannya *hudud* tetapi pada realitanya tidak bisa diterapkan karena syarat yang ditetapkan sangat sulit. Sedangkan pelaksanaan *hudud* yang terjadi pada zaman Nabi SAW. merupakan sebagai pengajaran, contoh dan model cara Nabi SAW. dalam menerapkan *hudud* yang benar jika seandainya pelaksanaan *hudud* ini bisa diterapkan di zaman setelahnya. Seperti Nabi SAW. lupa dalam gerakan rokaat shalat ketika seharusnya duduk *tasyahhud* awal tetapi Nabi SAW. langsung berdiri. Setelah menyelesaikan shalat, Nabi SAW. melakukan sujud *sahwi* karena kesalahan pada rokaat kedua tidak melakukan duduk di antara dua sujud. Kejadian seperti ini bukan berarti Nabi SAW. benar-benar lupa karena Nabi SAW. hatinya selalu mengingat Allah bahkan saat tidurnya beliau mengatakan matakun tidur akan tetapi hatiku tidak tidur. Kejadian yang sesungguhnya adalah bentuk pengajaran Nabi SAW. kepada umatnya yaitu sebuah amalan

sunnah yang dikerjakan ketika melakukan kesalahan karena lupa dalam shalat.¹⁰⁴

Indikasi keengganan Islam untuk menerapkan *hudud* tidak hanya dilihat dari kesengajaan syariat Islam dalam merumuskan syarat-syaratnya yang sulit untuk dipenuhi seperti yang dijelaskan di atas, tetapi bisa dilihat juga bagaimana Nabi SAW. membiarkan seseorang lari dari berlangsungnya hukum rajam karena ia tidak mampu menahan rasa sakit hukuman tersebut meskipun pada saat itu para sahabat hendak mengejanya dan ingin mengembalikannya ke tempat pelaksanaan hukuman rajam akan tetapi Nabi SAW. mencegah mereka dan menganggapnya ia telah menarik pengakuannya dari melakukan zina.¹⁰⁵ Oleh karena itu para ulama menyimpulkan bolehnya seorang pelaku kejahatan untuk menarik pengakuannya pada hakim di tengah berlangsungnya hukuman tersebut. Dari sini muncullah sebuah kesimpulan bahwa ketika seseorang lari dan keluar dari berlangsungnya pelaksanaan eksekusi hukum terhadapnya maka tidak boleh mengejar dan mengembalikannya. Karena ketika seseorang yang dihukum merasakan puncak kesakitan dari eksekusi hukumannya yang menyebabkan ia lari, maka pelaksanaan *hudud* sudah dianggap selesai. Disyariatkannya *hudud* untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji tetapi jika seseorang terjatuh pada perbuatan keji itu dan akan dilaksanakan hukuman untuknya, maka terbuka banyak pintu maaf yang bisa mengeluarkannya dari pelaksanaan hukuman tersebut.

B. Dasar Argumentasi Pandangan Ali Jum'ah Tentang *Hudud* Dalam Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* yang berakhir pada kesimpulan bahwa *hudud* merupakan syariat Allah yang harus dilaksanakan agar menciptakan keadilan antar manusia dan mencegahnya dari terjatuh pada perbuatan jahat. Namun disamping penerapannya, syariat *hudud* harus dipahami lebih jauh lagi dengan melihat

¹⁰⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=8kKE6iq9VZI>

¹⁰⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=8kKE6iq9VZI>

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penerapan *hudud* bisa dilaksanakan sesuai syariat. Disamping syariat memerintahkan untuk menerapkan *hudud*, syariat juga memerintahkan untuk mengasihi, mengampuni, dan menyuruh bertaubat secara sembunyi bagi pelaku kejahatan. Perintah kedua ini lebih ditekankan dan dominan dari pada perintah yang pertama yang pada hakikatnya syariat sendiri enggan untuk melaksanakan penerapan *hudud*. Pada bab ini peneliti akan membahas apa saja argumentasi Ali Jum'ah yang mendasari pandangannya tentang *hudud* dalam kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*.

Di dalam kitabnya Ali Jum'ah menjelaskan bahwa sebuah zaman merupakan peran penting yang dapat menentukan apakah hukum pidana *had* itu dapat diterapkan atau tidak. Ada empat zaman dimana hal ini dapat mempengaruhi hukum syariat dan hukum pidana *had* tidak bisa diterapkan. *Pertama*, zaman dadurat (*'ashru dharurat*) yaitu sebuah zaman yang membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Seperti para ulama membolehkan seseorang mengubur jenazah dalam sebidang tanah yang dijadikan kolam air di Mesir. Atau dalam konteks *hudud*, seseorang terpaksa melakukan pencurian dan dipaksa untuk berzina maka pada kondisi dan waktu itu tidak ada dosa baginya sehingga hukum pidana *had* juga tidak bisa dilaksanakan. *Kedua*, zaman *syubhat* (*'ashru syubhat*) yaitu sebuah zaman yang dimana kebenaran dan kebatilan tidak bisa dibedakan. Tidak adanya saksi yang adil sehingga syarat-syarat penerapan *hudud* tidak dapat terpenuhi dan harus ditangguhkan. Seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab dimana pada saat itu terjadi masa paceklik ekonomi. *Ketiga*, zaman fitnah (*'ashru fitnah*) yaitu sebuah zaman dimana kerusakan terjadi dimana-mana termasuk kerusakan moral. Seperti Imam Ja'far as-Shadiq al-Karkhi dari madzhab al-Hanafi membolehkan melihat perempuan yang telanjang di negara-negara belakang sungai¹⁰⁶ disebabkan mereka tidak memakai hijab dan sulitnya untuk menundukkan pandangan jika tidak

¹⁰⁶ Sebuah negara yang meliputi daerah Afghanistan, Turkmenistan, Tadjikistan, Uzbekistan dan sekitarnya. Dimana negara-negara ini dijuluki dengan sebutan negara-negara belakang sungai.

mustahil. *Keempat*, zaman kebodohan (*'ashru jahalah*) yaitu sebuah zaman kebodohan yang menimpa umat Islam. Maksud kebodohan disini adalah bodoh dalam perkara-perkara agama sehingga mengakibatkan tidak adanya seorang mujtahid, ulama yang mengerti agama, dan sumber-sumber syariat. Maka pada saat kondisi itu melanda umat Islam, tentunya tidak ada yang bisa dilakukan oleh umat Islam.¹⁰⁷

Dalam kaitannya dengan ini, seorang pakar usul fikih seperti ar-Razi dalam kitabnya *al-Mahshul* dimana ia mengistilahkan dengan *an-Naskh al-'Aqli* yaitu akal tidak bisa menasakh atau merubah hukum-hukum syariat yang bersifat tetap dan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tetapi hukum-hukum syariat juga tidak dapat diterapkan jika hilangnya target atau objek hukumnya tidak ada. Seperti pada syariat wudhu' dimana tangan merupakan salah satu rukun wudhu yang harus dibasuh dengan air. Namun rukun tersebut menjadi gugur ketika seseorang tidak memiliki tangan sehingga ia terlepas dari kewajiban membasuh tangannya. Begitu juga hukum-hukum kafarat yang berkaitan dengan membebaskan seorang budak tidak bisa dilaksanakan karena budak pada zaman ini tidak ada. Hukum-hukum yang berkaitan dengan khilafah, emas dan perak juga tidak bisa diterapkan karena ketiganya tidak ada pada zaman ini.¹⁰⁸ Pada kesimpulannya, hukum-hukum syariat tidak bisa diterapkan disebabkan oleh zaman tertentu dan hilangnya objek hukum tersebut.

Menurut Ali Jum'ah untuk menerapkan syariat Allah secara benar yang sesuai dengan tuntutan syariat, maka ia harus memahami sebuah realitas yang ada. Seperti nasihat yang disampaikan oleh keluarga Daud AS. Yang diriwayatkan oleh Wahb bin Munabbih menyebutkan: "*Bagi orang yang berakal hendaknya ia mengetahui zaman dan realitas yang ada, menjaga lisannya, dan konsentrasi dengan urusannya*"¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ali Jum'ah, *al-Bayan...*, h. Juz 1/75

¹⁰⁸ Ali Jum'ah, *al-Bayan...*, h. Juz 1/75

¹⁰⁹ Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sya'bu al-Iman*, (Beirut: Dal al-Kitab al-'Ilmiyyah, 2003), juz 4/165

Dari sini kata Ali Jum'ah para ahli fikih menetapkan bahwa hukum berubah-ubah jika dibangun di atas adat dan budaya masyarakat. Maka harus diperhatikan empat hal ketika akan menetapkan suatu hukum seperti yang ditetapkan oleh al-Qarafi yaitu perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan keadaan, dan perubahan seseorang. Hukum bagi seseorang yang berakal berbeda dengan hukum bagi seseorang yang tidak berakal.¹¹⁰

Argumentasi lain menurut Ali Jum'ah mengapa *hudud* ini tidak bisa diterapkan di zaman sekarang ini disebabkan oleh sudah hilangnya saksi yang adil. Seperti yang dikatakan oleh at-Tanukhi dalam kitabnya *nisywar al-muhadharah wa akhbar al-mudzakarah*. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu al-Husain bin 'Ubaidillah al-Ma'ruf yang dikenal dengan sebutan Ibnu Nashrawaih ia berkata: "Sebelum at-Taimi, dulu ada seorang Qadhi kami di Bashrah mendapatkan tiga puluh enam ribu saksi selama kepemimpinannya"¹¹¹ At-Tanukhi dalam bab lain mengatakan: Aku pernah mendengar Qadhi Abu as-Saib 'Utbah bin 'Ubaidillah bin Musa, ia berkata: Bagaimana menurut kalian jika disebuah negeri memiliki jumlah penduduk sepuluh ribu namun saksi yang adil hanya kisaran sepuluh orang, kurang atau lebih sedikit, yang dimana semua penduduknya akan beralih dengan sepuluh orang tersebut. Bagaimana penduduk negeri itu akan selamat jika setan-setan dari golongan manusia lebih dominan.¹¹²

Menurut Ali Jum'ah melakukan sebuah penyelelidikan untuk mengungkap bukti yang nyata terhadap pelaku kejahatan sehingga hukuman *had* itu dapat ditegakkan, hal itu bukan merupakan langkah yang dianjurkan oleh syariat. Contoh kasus seperti yang terjadi pada sahabat Ma'iz yang datang kepada Rasulullah SAW. mengaku dirinya telah berzina dengan seorang perempuan. Tetapi Nabi SAW. tidak mengindahkan dan memalingkan wajahnya sebagai tanda tidak ingin menanggapi pengakuannya. Ma'iz datang kepada Nabi SAW. sebanyak empat kali dan

¹¹⁰ Ali Jum'ah, *al-Bayan...*, h. Juz 1/76

¹¹¹ Al-Muhsin bin Ali at-Tanukhi, *Nisywaru al-Muhadharah wa Akhbaru al-Mudzakarah*, (Beirut: Dar-Shadir, 1995), juz 1/140

¹¹² Al-Muhsin bin Ali at-Tanukhi, *Nisywaru al-Muhadharah...*juz 2/269

beliau tetap tidak menghiraukannya. Akhirnya Nabi SAW. mengkrsocek sendiri kepada keluarganya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarganya apakah Ma'iz ini gila. Setelah keluarganya mengatakan bahwa Ma'iz tidak gila, lalu Nabi SAW. memberikan keputusan untuk dilaksanakannya hukuman *had* pada diri Ma'iz. Namun di tengah berlangsungnya hukuman *had*, Ma'iz tidak sanggup menahan rasa sakit lalu kabur dari tempat eksekusi hukumannya. Ketika sahabat ingin mengejar Ma'iz, Nabi SAW. mencegahnya seraya mengatakan biarkanlah barangkali ia bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. Dari kisah ini para ulama menetapkan bahwa boleh hukumannya menarik pengakuannya disaat berlangsungnya hukuman selama tindakan kejahatannya hanya bersangkutan dengan hak Allah bukan yang berhubungan dengan hak manusia. Menurut Ali Jum'ah, menariknya pada kejadian tersebut, Nabi SAW. tidak menanyakan siapa wanita yang telah berzina dengannya. Dari sini menunjukkan bahwa sebenarnya syariat enggan untuk menjalankan hukuman *had*. Bahkan diriwayatkan dari Abu Bakr, Umar, Abu Darda', dan Abu Hurairah, bahwasanya seorang pencuri dibawa kehadapan mereka. Lalu mereka bertanya apakah kamu mencuri? Katakan tidak.¹¹³

Syekh Ali Jum'ah dalam sebuah wawancaranya juga pernah ditanya mengapa negara Mesir tidak menegakkan syariat Islam seperti menerapkan *hudud* potong tangan dan rajam. Beliau menjawab Mesir sudah menerapkan syariat Islam dan syariat Islam tidak hanya terbatas pada potong tangan dan rajam. Pensyariatan *hudud* hanya untuk menakut-nakuti hambanya dan syariat Islam sendiri tidak ingin menunaikannya. Mengapa demikian, karena syarat yang ditentukan oleh Islam sangat berat untuk memenuhinya. Seperti syarat saksi orang yang menuduh berzina sebanyak 4 orang laki-laki, berperilaku baik dengan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah ('*adil*), dan keempat-empatnya melihat secara langsung kemaluan laki-laki dan perempuan terjadi hubungan intim (*dukhl*). Syarat seperti ini sangat sulit

¹¹³ Ali Jum'ah, *al-Bayan...*, h. Juz 1/78

untuk dipenuhi karena itu sepanjang sejarah Islam tidak pernah tersingkap permasalahan seperti ini.¹¹⁴

Pernah pada zaman Umar terjadi pengaduan empat orang kepada Umar tentang Mughirah Ibnu Syu'bah telah melakukan zina. Mereka adalah Abu Bakrah, Syibl bin Ma'bad, Abu 'Abdillah Nafi', dan Ziyad berkata: kami berada di atas dan Mughirah berada di bawah. Lalu Umar bertanya satu persatu, apakah kamu melihatnya? pertanyaan itu mereka menjawab: iya kami melihatnya. Pertanyaan itu sampai ketiga orang tersebut. Tetapi ketika orang keempat ditanya apakah kamu melihatnya, ia menarik persaksiannya dengan mengatakan aku tidak melihatnya. Maka dihukumlah cambuk terhadap tiga orang tersebut karena tidak cukup syarat persaksiannya. Salah satu dari mereka Abu Bakrah al-Saqafi bertanya kepada Umar kenapa kami dihukum begini? Umar menjawab: kamu telah menuduh seorang berzina dengan tidak dapat mengemukakan empat orang saksi. Lalu mereka bersumpah bahwa telah melihat Mughirah berzina namun Umar tetap menghukum mereka. Abu Bakrah berkata: Padahal kami empat orang sama-sama melihat kejadian zina itu hanya saja seseorang dari kami menarik balik persaksiannya. Wahai Umar, adakah kamu sebenarnya tidak mau melaksanakan hukuman rajam? Umar menjawab: iya. Abu Bakrah bertanya lalu apa faedah Allah menurunkan hukum *hudud* ini? Umar menjawab Allah menurunkannya hanya untuk menakuti kamu saja supaya tidak melakukan perbuatan zina yang keji.¹¹⁵

Pernah juga terjadi di zaman Abu Bakar ra. dan khalifah yang lain bahwa uang satu khas kecurian. Orang yang dituduh mencuri itu disuruh oleh khalifah supaya tidak mengaku perbuatan mencuri. Lalu pencuri itupun tidak mengakui perbuatannya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Syaibah. Dari kisah ini dapat disimpulkan adakah khalifah menyuruh pencuri untuk berbohong? Sebenarnya bukan berbohong tetapi untuk mengelakkan dan agar tidak dilaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri itu.¹¹⁶

¹¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=U118jHNLfno&feature=youtu.be>

¹¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=U118jHNLfno&feature=youtu.be>

¹¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=U118jHNLfno&feature=youtu.be>

Beliau melanjutkan dengan memberikan sebuah pertanyaan bahwa apakah pada *hudud* ini ketika dilaksanakan hanya terlintas dipikiran seseorang hawa nafsu untuk menghukum manusia dengan memotong tangan atau bahkan merajam orang yang berzina sampai mati? Apakah hanya ini saja yang dimaksud dengan syariat Allah. Syariat Allah itu yang paling utama ialah menyempurnakan akhlak dan syariat itu juga adalah menegakkan shalat, puasa, zakat, dan *hudud* juga merupakan syariat dari Allah dan ini harus diyakini tidak boleh diingkari. Pada zaman Umar juga pernah tidak melaksanakan *hudud* pada tahun ramada, lalu apakah tidak melaksanakan *hudud* dikatakan mengingkari hukum Allah? Tidak. Maksud tidak melaksanakan adalah menghentikan sementara disebabkan paceklik saat itu. al-Tanukhi dalam kitabnya *nisywaru al-muhadharah wa akhbaru al-mudzakarah* menyebutkan: “*dizaman dahulu seorang hakim turun ke kota ia akan menjumpai 40 orang saksi yang ‘adil yaitu orang terpercaya dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Sekarang tahun 300 H. hanya akan mendapatkan 2 atau 3 orang saja*”. Apalagi di zaman kita sekarang adakah orang yang terpercaya? Dimana saksi yang dapat dipercaya di zaman modern ini jawabannya tidak ada saksi yang ‘adil di zaman ini. Justru kita sekarang berada di zaman kegelapan dan saya berdoa agar Allah menerangkan zaman ini dan menjaga presiden kita.¹¹⁷

Uraian di atas merupakan argumentasi Ali Jum’ah yang mendasari pandangannya bahwa *hudud* pada zaman sekarang ini tidak bisa diterapkan dan syariat sendiri enggan untuk melaksanakannya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW. eksekusi hukum *had*, tidak lain hanya untuk menjelaskan bagaimana cara menerapkannya. Tetapi sebelum hukum *had* dijalankan, Nabi SAW. enggan untuk menerapkannya. Syarat yang ditetapkan pun sangat sulit dan hampir mustahil untuk memenuhinya. Ketika seandainya hukum pidana *had* syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan harus dilaksanakan maka disitu terbuka beberapa pintu maaf untuk pelaku kejahatan agar tidak mengakui perbuatannya dan agar orang lain menutup aibnya sehingga

¹¹⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=U1l8jHNLfno&feature=youtu.be>

perkara itu tidak sampai pada hakim. Ketika seandainya perkara sudah sampai hakim dan dilangsungkan hukuman *had* untuknya, kemudian pelaku merasakan kesakitan yang luar biasa, maka eksekusi hukuman *had* sudah dianggap selesai dan tidak perlu untuk dilanjutkan.

Zaman yang sesuai dengan saat ini adalah zaman syubhat dan kebodohan dimana para hakim dan saksi tidak sampai kepada derajat mujtahid yang benar-benar paham tentang agama dan hukum-hukum syariatnya, begtu juga dengan para saksi yang ada tidak memenuhi kriteria adil yang menjaga diri mereka dari perbuatan maksiat yang dapat menjauhkan diri dari rahmat Allah. Bahkan saksi zaman sekarang dapat direkayasa sesuai dengan keinginan pelakunya.

Lalu apa gambaran *hudud Islamiyah* yang sebenarnya? Jawabannya gambaran *hudud* yang sebenarnya adalah kasih sayang dan pemaaf. Maka adakah dizaman ini para hakimnya memiliki sifat-sifat terpuji seperti itu? dan adakah dizaman ini mereka yang menjadi saksi juga memiliki sifat terpuji? jika tidak ada semua akhlak itu, maka penerapan *hudud* tidak bisa diterapkan.

C. Implikasi Pandangan Ali Jum'ah Tentang *Hudud* Dalam Konteks Negara Indonesia

Melihat penjelasan Ali Jum'ah di atas yang berkesimpulan bahwa syariat *hudud* pada zaman sekarang ini tidak bisa diterapkan karena sulitnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam seperti sulitnya mendatangkan saksi-saksi yang adil untuk membuktikan pelaku kejahatan zina, pencurian, dan lain sebagainya yang dimana seorang saksi harus melihat perbuatan tersebut secara langsung. Saksi yang melihatpun disyaratkan memiliki sifat adil dan bukan saksi yang memilii sifat fasik. Pada hari ini menurut Ali Jum'ah, saksi yang masuk klasifikasi adil bisa dikatakan tidak ada. Bahkan dalam pandangan peneliti, saksi-saksi di Indonesia jauh daripada kriteria yang telah ditentukan oleh syariat. Lebih mirisnya lagi, saksi dapat diperjual belikan atau dapat direkayasa dan pandai memanipulasi fakta. Para pengacara yang menjadi pembela pelaku atau tersangka kejahatan, akan mengikuti kemauan klaiennya dan membela mati-

matian tidak peduli benar atau salah karena ia sudah dibayar mahal. Selain saksi tidak memiliki sifat adil ditambah masyarakat Indonesia masih minim akan pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu syariat sehingga objek atau target hukum dari penerapan *hudud* ini tidak bisa dilaksanakan.

Berbicara implikasi pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dengan konteks negara Indonesia, memiliki beberapa sumbangsih penting dari pandangannya. *Pertama*, pandangan Ali Jum'ah secara tidak langsung dapat melegitimasi dan mendukung bentuk hukum pidana di Indonesia berdasarkan KUHP yang dimana menurut sebagian kelompok Islam hukum pidana di Indonesia dianggap tidak sesuai dengan Islam karena tidak menerapkan hukum rajam dan potong tangan. Hal ini berbeda dengan pandangan Ali Jum'ah bahwa *hudud* yang di dalamnya terdapat hukuman seperti rajam dan potong tangan pada zaman sekarang ini tidak bisa ditegakkan karena harus mendatangkan saksi yang adil dan pada zaman sekarang saksi yang adil tidak ada. Namun meskipun *hudud* tidak bisa diterapkan, bukan berarti membiarkan terjadinya tindak kriminal merajalela. Tetapi penerapan hukum pidana Islam harus diganti dengan bentuk hukuman lain yang sesuai dengan kondisi dan kultur sebuah negara. Hal itulah yang disebut dengan hukuman *ta'zir* yaitu bentuk hukuman dan kadarnya tidak ditentukan secara spesifik dalam Islam. Ketika di Indonesia menerapkan hukuman penjara dan denda bagi pelaku kejahatan zina dan pencurian yang dicantumkan dalam KUHP pada saat itulah sebenarnya negara Indonesia sudah menerapkan hukum pidana sesuai dengan syariat Islam hanya saja bukan dengan jalan *hudud* tetapi dengan *ta'zir* meskipun negara Indonesia tidak menyebutnya dengan istilah *ta'zir*. *Kedua*, Pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dapat dijadikan sebagai dalil syar'i untuk memberhentikan atau mengganti penerapan *hudud* di bagian wilayah Indonesia dengan hukum pidana sesuai dengan KUHP. Karena menurut Ali Jum'ah jika syarat-syarat pelaksanaan *hudud* tidak terpenuhi maka syariat *hudud* tidak bisa ditegakka. Jika dilihat di wilayah yang menerapkan *hudud*, pada faktanya tidak sesuai dengan syariat dan jauh daripada keadilan

sehingga penerapannya hanya bersifat formalisasi dan jauh daripada keadilan.

Contoh kasus dibagian wilayah Indonesia seperti Ambon yang pernah menerapkan hukum pidana *had* dan Aceh yang sampai saat ini menerapkan syariat *hudud*, perlu dianalisa kembali apakah dalam prosesnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak. Contoh kasus seperti yang terjadi di Ambon pada awal abad ke-21, pemimpin dari Laskar Jihad yang bernama Ja'far Umar Thalib telah menerapkan hukuman rajam terhadap Abdullah yang mengaku dirinya telah memperkosa seorang wanita. Tidak jelas bagaimana prosedur dan prosesnya yang jelas hal itu bertentangan dengan hukum positif dan dianggap sebagai pembunuhan. Ia melanggar pasal 359 KUHP tentang penganiayaan sampai mati dan pasal 156 KUHP tentang penyebaran rasa permusuhan.¹¹⁸ Seharusnya jikapun ingin melaksanakan hukum rajam, yang menjadi pelaksana adalah pemimpin tertinggi seperti Presiden atau Perdana Menteri bukan suatu kelompok atau oknum.

Jika dilihat pada pelaksanaan *hudud* di salah satu wilayah Aceh seperti di Tapaktuan, mengalami beberapa kendala dan penerapan yang tidak sesuai dengan syariat. Kendala yang menghambat penerapan *hudud* adalah seperti ketidak pahaman masyarakat setempat dengan hukum pidana *had*, keutamaan dan syarat-syaratnya. Kendala dari segi finansial juga mempengaruhi sebab dalam pelaksanaan *hudud* perlu biaya yang tidak sedikit. Setiap pengeksekusian hukum pidana *had* membutuhkan biaya sekitar 10 juta. Dana tersebut diperuntukkan untuk membayar semua operasional mulai dari pembuatan berita acara sampai pada proses sidang mahkamah syar'iiyyah. Setiap kali melakukan razia ke berbagai macam tempat, membutuhkan biaya paling sedikit 3 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk para penyidik, transportasi, dan konsumsi. Kendala finansial tersebut mempengaruhi pelaksanaan *hudud* karena terkadang pelaksanaan *hudud* tidak bisa dilanjutkan disebabkan kurangnya dana meskipun pelaku sudah tertangkap dan masih dalam proses penyelidikan,

¹¹⁸ <https://www.quareta.com/post/mungkinkah-syariat-islam-diterapkan-di-indonesia>

akhirnya menghendaki pelaku tersebut dilepas begitu saja. Kendala yang lain kurangnya personel penyidik dibanding jumlah penduduknya.¹¹⁹ Kendala-kendala seperti ini menunjukkan ketidaksiapan wilayah tersebut untuk menerapkan *hudud* dan tampak hanya formalisasi yang dipaksakan.

Dilihat dari efek jeranyapun tidak mengalami perubahan yang signifikan dari awal tahun pertama kali diterapkannya sampai pada tahun ketiga. Dalam hal ini ambil contoh pada hukuman cambuk, dimana kasus perjudian meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2006 terdapat 7 orang sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 7 orang dan pada tahun 2013 menjadi 15 orang. Sedangkan pada kasus *khalwat* tidak mengalami peningkatan.¹²⁰ Menurut pandangan penulis, bisa saja hal tersebut lebih banyak kasus lagi hanya saja para penyidik mampu mendapatkan sebatas itu disebabkan beberapa kendala yang telah disebutkan di atas. Lebih mirisnya lagi, penerapan *hudud* di daerah tersebut bertentangan dengan syariat *hudud* yang sebenarnya. Pada kasus *khalwat* dalam fikih pidana Islam dikenai 100 cambukan bagi yang belum menikah sedangkan pada *qanun* no 14 tahun 2003 hanya dicambuk 9 dan paling sedikit hanya 3 kali cambukan. Di sisi lain pelaku bisa bebas dari hukuman cambuk dengan membayar denda paling tinggi sebanyak 10 juta dan paling sedikitnya 2,5 juta dan biasanya yang diputuskan yang paling sedikit.¹²¹ Alternatif seperti denda ini selain bertentangan, membuat kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Si kaya akan selalu lepas dari hukuman cambuk dengan hanya membayar denda saja.

Dari uraian di atas tergambar bagaimana daerah-daerah yang menjalankan penerapan *hudud* ini mengalami banyak problem dan ketidaksesuaiannya dengan syariat. Sehingga pada kesimpulannya seperti dalam pandangan Ali Jum'ah *hudud* di zaman sekarang ini tidak bisa diterapkan dan harus diganti dengan *ta'zir* atau bentuk hukuman lain yang tidak

¹¹⁹ Mihfa Rizkiya, *Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan Menurut Perspektif Fiqih Jinayah (Tahun 2002-2003)*, h. 74-75

¹²⁰ Mihfa Rizkiya, *Pelaksanaan Hukuman...*, h. 80

¹²¹ Mihfa Rizkiya, *Pelaksanaan Hukuman...*, h. 71 dan 82

ditentukan oleh syariat yang dalam hal ini diserahkan kepada pemerintah yang mempunyai wewenang penuh. Pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* ini sangat relevan diterapkan di Indonesia. Jadi penerapan *hudud* dalam konteks negara Indonesia tidak bisa ditegakkan dan negara Indonesia berhak menentukan hukuman bagi para pelaku kejahatan sesuai dengan kultur budaya Indonesia serta tercapai tujuan-tujuan syariat yaitu kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, Ali Jum'ah memandang *hudud* merupakan syariat Allah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan setiap kejahatan yang masuk dalam kategori hukum pidana *had*, menunjukkan perbuatan tersebut ialah perbuatan yang sangat keji dan termasuk dosa besar yang dapat memberikan kerusakan di tengah masyarakat. Selain itu, *hudud* menurut Ali Jum'ah mempunyai syarat-syarat yang ketat yang menentukan apakah *hudud* itu dapat diterapkan atau tidak. Jika syarat itu tidak ada maka *hudud* tidak bisa diterapkan dan harus ditanggihkan karena adanya *syubhat*. Pada zaman sekarang ini menurut beliau, *hudud* tidak dapat diterapkan karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya seperti saksi yang bersifat adil. Di sisi lain syariat *hudud* tidak bisa dipahami secara tekstual saja dan dengan makna yang sempit. Karena *hudud* disyariatkan bukan sebagai ajang balas dendam dan bernafsu untuk segera mengeksekusinya. Syariat sendiri sebetulnya lebih mengedepankan pengampunan, pemaafan, dan menutup aib seseorang dibanding semangat dalam penerapan *hudud*. Menurut Ali Jum'ah bukanlah metode yang dianjurkan syariat ketika sangat berantusias dalam melakukan penyelidikan agar cepat ditegakkannya pelaksanaan *hudud*. Bahkan menurut Ali Jum'ah sebenarnya syariat sendiri enggan untuk menerapkan *hudud* dan hal ini terbukti di beberapa teks, riwayat, dan sikap Nabi Muhammad SAW.

Kedua, argumentasi Ali Jum'ah yang melandasi pandangannya tentang *hudud* diantaranya karena *hudud* tidak bisa diterapkan tanpa memiliki saks-saksi yang adil. Sedangkan zaman sekarang hampir mustahil mendapatkan saksi yang adil dimana saat ini penuh dengan *syubhat-syubhat*, zaman fitnah, dan zaman yang penuh kebodohan akan pengetahuan

masyarakat tentang syariat Islam yang hanya mampu memahaminya pada kulitnya saja. Selain itu kasus yang menimpa Ma'iz mengindikasikan Nabi SAW. enggan melaksanakan hukuman terhadapnya. Hal itu dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan beliau yang tidak mengindahkan pengakuan Ma'iz beberapa kali meskipun pada akhirnya dengan terpaksa Nabi SAW. menerima pengakuannya. Di saat pelaksanaan eksekusi hukumannya pun yang membuat Maiz tidak kuat menahan rasa sakit membuat ia melarikan diri dan Nabi SAW sengaja membiarkannya lari tidak menangkapnya bahkan beliau melarang para sahabat mengejanya. Dari sini menunjukkan bahwa jika seseorang sudah merasakan sakitnya eksekusi hukum pidana *had* dan ia tidak mampu melanjutkannya maka pelaksanaan hukuman tersebut dianggap selesai. Bahkan Nabi SAW. tidak mencari siapa wanita yang telah dizinainya. Hal ini menunjukkan suri tauladan beliau bahwa mencari-cari demi dapat menjatuhkan si pelaku ke dalam hukuman bukanlah manhaj syariat yang benar. Bahkan para sahabat seperti Abu Bakr, Umar, Abu Darda' juga menyuruh pelaku pencuri untuk tidak mengakui perbuatannya di hadapan *qadhi*. Semua ini menunjukkan bahwa syariat Islam sesungguhnya bukanlah bernafsu untuk menerapkan *hudud* melainkan rasa pemaaf dan pengampunan. Argumentasi lainnya Ali Jum'ah berlandaskan dengan riwayat Abu Bakrah bersama sahabat-sahabatnya seperti Syibil bin Ma'bad, Abu 'Abdillah Nafi', dan Ziyad yang mengadu kepada Umar bahwa Mughirah bin Syu'bah telah melakukan zina. Semuanya benar-benar telah melihat kejadian tersebut namun ketika menjadi saksi dihadapan Umar, salah satu dari mereka yaitu Ziyad menarik kesaksiannya sehingga mereka dihukum cambuk oleh Umar karena tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Namun Abu Bakrah penasaran dengan sikap Umar dengan menanyakan adakah engkau enggan untuk melaksanakan hukuman rajam wahai Umar? Umar menjawab: iya. Lalu apa hikmah Allah menurunkan syariat *hudud*? Umar menjawab: Allah menurunkannya hanya untuk menakuti kamu saja supaya tidak melakukan perbuatan keji.

Ketiga, implikasi pandangan Ali Jum'ah dengan konteks negara Indonesia paling tidak memiliki dua dampak yang sangat penting. 1)

pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* yang menyatakan bahwa *hudud* tidak bisa diterapkan pada zaman ini, secara tidak langsung melegitimasi dan mendukung hukum pidana di Indonesia yang berdasarkan KUHP. Menurut Ali Jum'ah *hudud* tidak bisa diterapkan disebabkan tiadanya saksi yang adil sehingga harus diganti dengan hukuman lain yang bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah negara masing-masing. 2) Pandangan Ali Jum'ah tentang *hudud* dapat dijadikan sebagai dalil syar'i untuk memberhentikan atau mengganti penerapan *hudud* di bagian wilayah Indonesia dengan hukum pidana sesuai dengan KUHP. Karena menurut Ali Jum'ah jika syarat-syarat pelaksanaan *hudud* tidak terpenuhi maka syariat *hudud* tidak bisa ditegakkan. Jika dilihat di wilayah yang menerapkan *hudud*, pada faktanya tidak sesuai dengan syariat dan jauh daripada keadilan sehingga penerapannya hanya bersifat formalisasi dan jauh daripada keadilan.

B. Implikasi

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah membantah pemahaman tentang *hudud* secara tekstualis dan yang menganggap teks-teks tentang *hudud* tidak bersifat final atau *qath'i* yang perlu direinterpretasi ulang, serta sebagai referensi untuk memahami konsep *hudud* yang sebenarnya.

C. Saran-saran

Dari penelitian ini, peneliti menyarankan agar siapapun yang mengkaji tentang hukum pidana Islam atau permasalahan Islam lainnya yang sifatnya kontemporer agar mengkaji pemikiran Ali Jum'ah. Karena Ali Jum'ah mampu menggabungkan pemikiran para ulama klasik beserta kitab *turats*-nya dengan konteks permasalahan masa kini yang melahirkan pemahaman baru dan segar sehingga dapat menuntaskan problematika modern. Pandangan-pandangannya yang unik tentu didasari dengan dalil-dalil yang kuat dan tidak sembarangan dalam mengkajinya. Kepiawaiannya dalam berfatwa dan kehati-hatiannya tidak perlu diragukan lagi. Karena permasalahan kontemporer harus didekati dengan pemikiran kontemporer juga agar menghasilkan jawaban yang tepat dengan zamannya dan hal ini ada dalam diri Ali Jum'ah

Penelitian ini diharapkan mampu membuka khazanah dan cakrawala keilmuan yang lebih luas lagi terutama bagi para pengkaji hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia* dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam”, Vol. 10 No. 1, 2017
- Abdillah, Junaidi. “*Diskursus Hudud dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudud)*”, Jurnal al-Hikam Vol.13 No.2 Desember 2018
- Abdillah, Junaidi. “*Reformulasi Nalar Hudud di Indonesia Menuju Terbentuknya Hukum Pidana Nasional*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 1, No. 1, 2018
- Abadi, Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Azhim ‘*Awn al-Ma’bûd Syarh Sunan Abû Dâwûd*, Tahqiq ‘Abd al-Rahman Muhammad ‘Utsman (Madinah Munawwarah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968
- Akbar, Khairil. “*Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan yang Maha Esa*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017
- al-Azhari, Usamah Sayyid. *Asanid al-Miṣriyyin*, Kairo: Dār al-Faqīh, 2011
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali. *Sya’bu al-Iman*, Beirut: Dal al-Kitab al-‘Ilmiyyah
- al-Bustani, Butrus. *Muhith al-Muhith; Qamus Mutawwal li al-'Arabiyyah*, Lebanon: Maktabah Lubnah, 1983
- al-Syaukani, Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad. *Nayl al-Authâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhabâr*, Juz 7, Damaskus: Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyyah, 1966
- al-Syafi’i, Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husayni al-Hashna al-Dimasqi. *Kifâyah al-Akhyâr fî Hill Ghâyah al-Ikhtishâr*, Juz II, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah
- al-Syarbini, Muhammad Khathib. *Mughni al-Muhtāj ilā Ma’rifati Ma’āni al-Alfāz al- Minhāj*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr

- al-Qusyairi, Muslim Ibn al-Hajjaj Abu al-Husain. *Shahih Muslim*, tahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Juz 3, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi
- al-Jazairi, Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh. *al-Fiqihu 'ala al-madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *al-Musnad asShahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi
- Al-Bassam, *Taysîr 'ala Allāh min Syarh 'Umdah al-Ahkâm*, Beirut: Mathba'ah li Nasr wa al-Dakwah
- al-Sajastani, Abu Dawud Sulayman Ibn al-Asy'ats *Sunan Abû Dawûd*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi
- as-Sakhawai, Muhammad. *Mukhtashar al-Maqashid al-Hasanah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1985
- al-Manawi, Abd al-Ra'uf. *Faydl al-Qadîr Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*, Mesir: Makatabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1356 H
- al-Silmi, Muhammad Ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzî. *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan al-Turmudzî*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dkk Beirut: Dar Ihya alTurats al-'Arabi.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan.
- asy-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad. *Nayl al-Authâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhabâr*, Damaskus: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, 1966
- al-Luhaibi, Muthi'ullah Dakhilullah Sulaiman al-Shurhaidi. *al-'Uqubat al-Muqaddarah wa Hikmatu Tasyri'ihâ fî Dlawi al-Kitab wa as-Sunnah* Jeddah: Tihama, 1983
- Anas, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* New York: Syracuse University Press, 1996

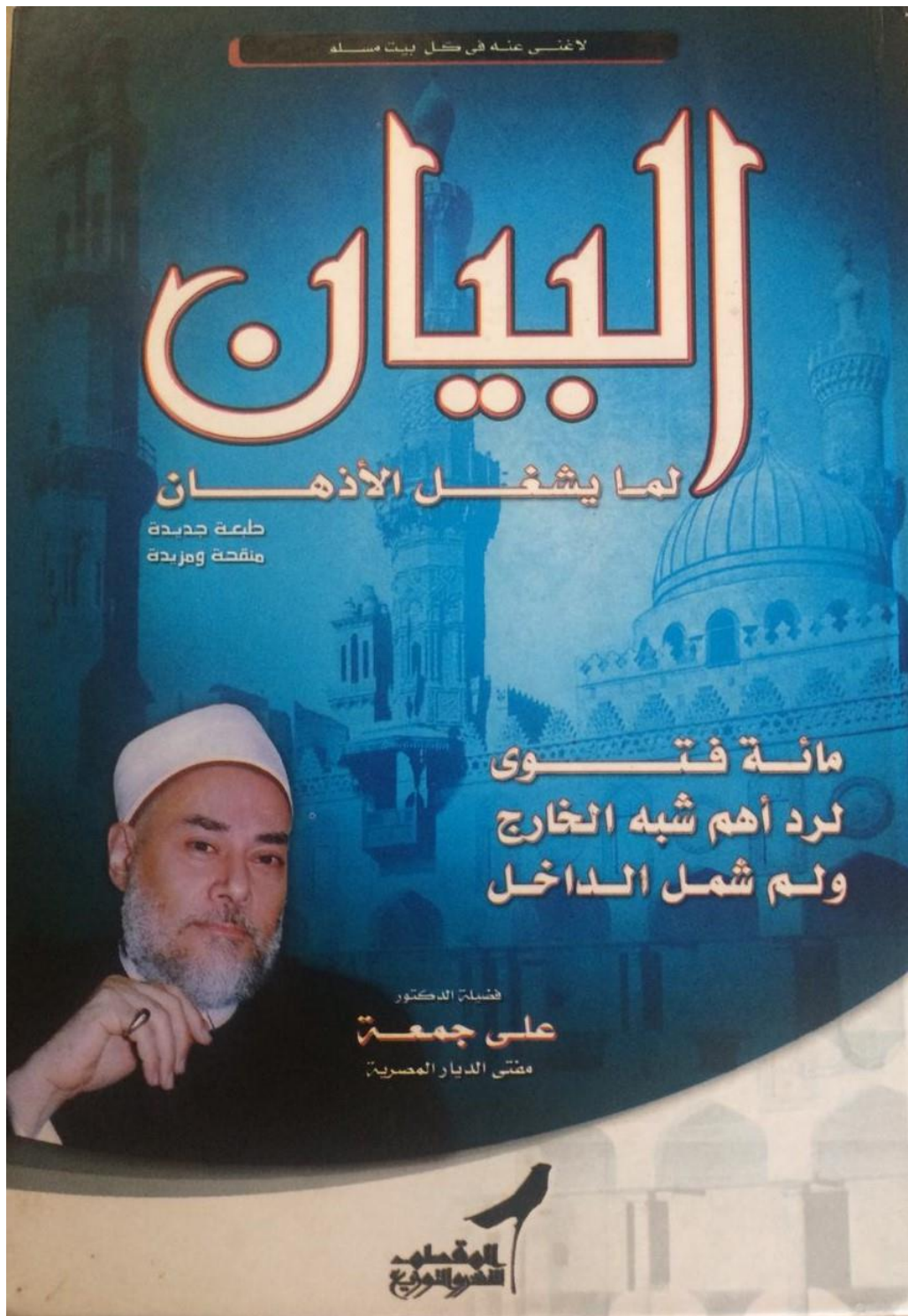
- An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler; Menegosiasikan Masa Depan Syari‘ah*, terj. Sri Murniati Bandung: Mizan, 1997
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- at-Tanukhi, Al-Muhsin bin Ali. *Nisywaru al-Muhadharah wa Akhbaru al-Mudzakarah*, Beirut: Dar-Shadir, 1995
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tasyri al-Jina‘i Muqaranan bi al-Qanun al-Wadl’i*, Juz I, Beirut: Dar al-Risalah al-Mu’assasah, 1996
- AZ, Nairazi. “Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqih Kontemporer)” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016
- az-Zuhaili, Wahbah *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
- Fajar, S.H.I, “*Metode Ijtihad Ali Jum’ah (1951-2018) dalam Masalah-masalah Mu’amalat Maliyah Mu’ashirah*”, Tesis Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2019
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories* (Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar Untuk Ushul al-Fiqh Madzhab Sunni) terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Hashim, Kamali Muhammad. *Principle of Islamic Jurisprudence*. Diterjemahkan oleh Noorhaidi dengan judul “*Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*” Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Hendra, Dede MR. “*eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*”, Tesis Fakultas Hukum Program Magister Pascasarjana Sistem Peradilan pidana Universitas Islam Indonesia Jakarta 2012
- Hosen, Ibrahim. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Harapan, 1990
- Jum’ah, Ali. *al-Bayan Lima Yasyghalu al-adzhan*, (Kairo: Dar al-Muqaththam, 2014

- Mushthafa, Ibrahim. *Mu'jam al-Wasith*, Jilid I, Teheran: Maktabah al-Ilmiyah
- Nasukha, S.H.I, “*Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Pane, Ulya Hikmah Sitorus. “*Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*”, Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Sistem Peradilan Pidana Jakarta 2012
- Rahman, Fazlur. “*The Concept of Hadd in Islamic Law*” dalam *Islamic Studies Journal*, Vol. IV, No. 3 September 1965
- Rahman, Fazlur. “*Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives*” dalam *International Journals of Middle East Studies*, Vol. I, tahun 1970
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sumaryono, E. *Hermeneutik (Sebuah Metode Filsafat)*, Yogyakarta:Kasinus,1999
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa Alqur'an; Qira'ah Mu'asharah* Damaskus: al-Ahali, 1990
- Thalib, Abdullah A. *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika*, Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi, 2018
- Toha Andiko, “*Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML)*”, *Jurnal Madania*, Vol. 18, No. 2, 2014
- Zahrah, Muhammad Abu *al-Jarimah wa al-'Uqubat fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998

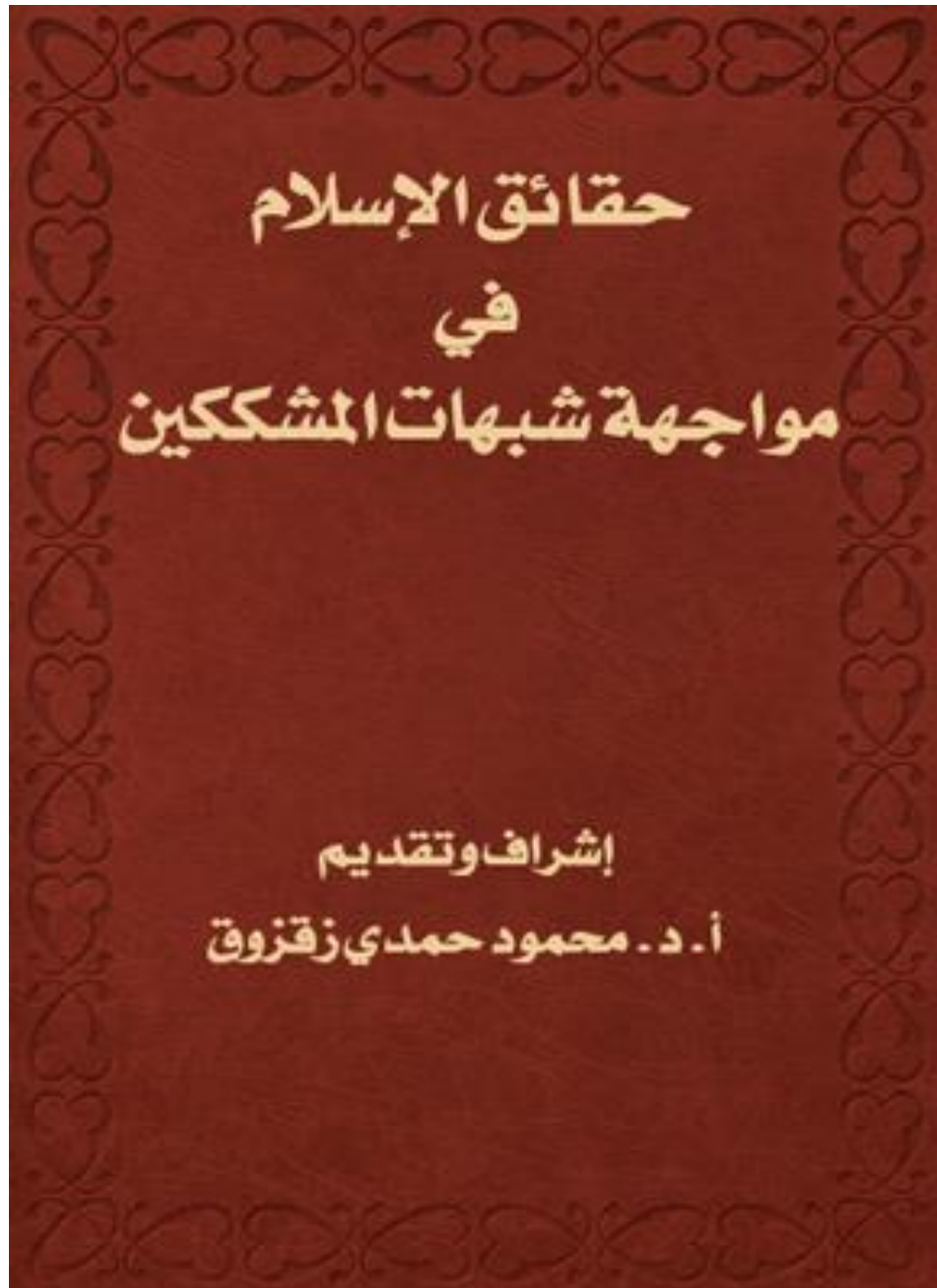
- Zakaria, Soni. “*Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Konsep Hudud dalam Perspektif Teori Maslaha*”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang 2003
- Zakir, Muhammad. “*Ijtihad Ali Jum’ah dalam Masalah-masalah Kontemporer dalam Bukunya al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyyah*”, Tesis Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2014
- Zakariya, Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Jilid 2, Beirut: Dar-al-Fikr, 1979 M

LAMPIRAN**Lampiran 1 Foto Ali Jum'ah**

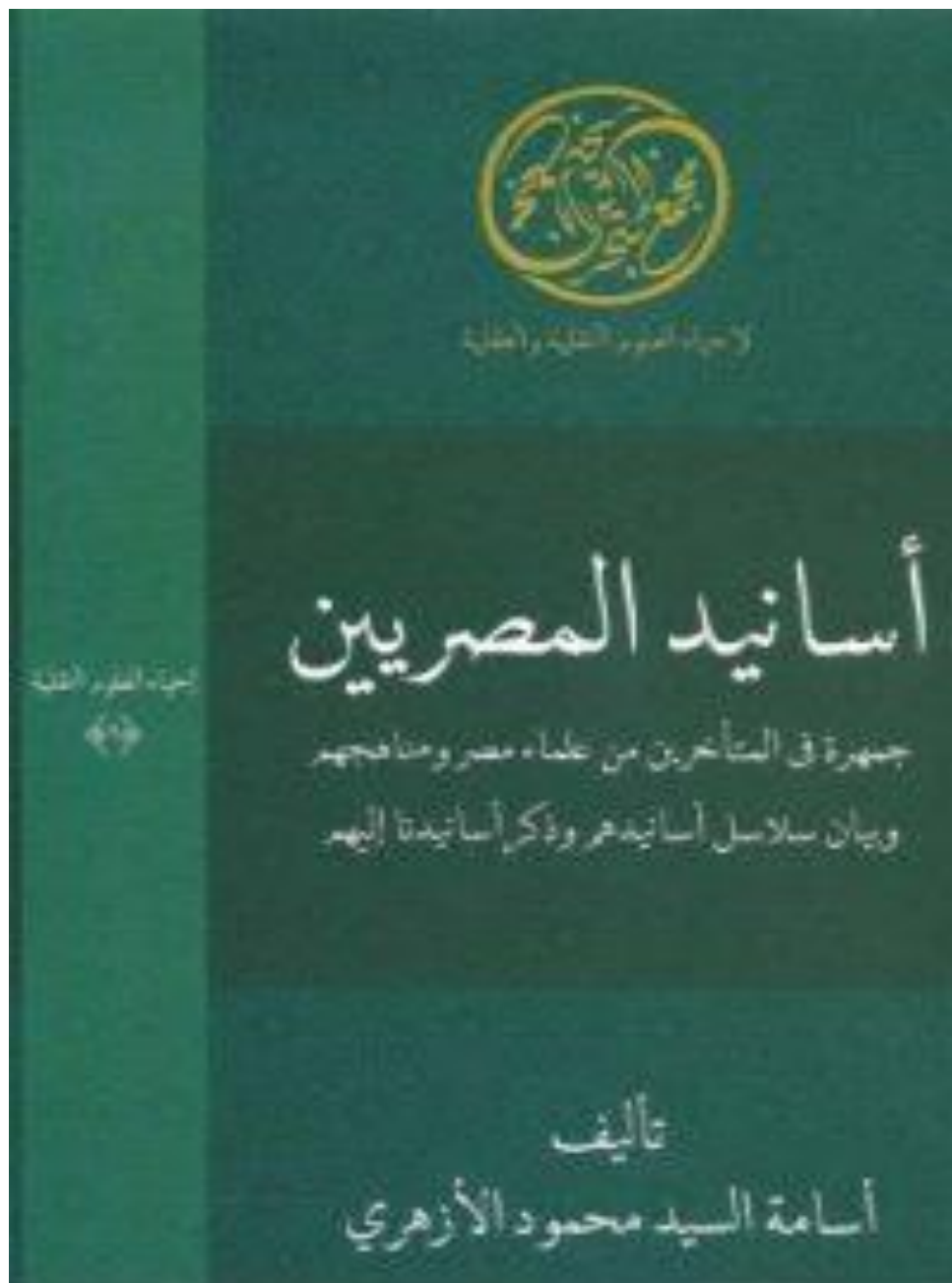
Lampiran 2 Foto Kitab *al-Bayan Lima Yasyghalu al-Adzhan*



Lampiran 3 Foto Kitab *Haqaiq al-Islam fi Muwajahati Syubhat al-Musyakkikin*



Lampiran 4 Foto Kitab *Asanid al-Mashriyyiin*



Riwayat Hidup

Najib Amrullah lahir di Sumenep, 14 Juli 1991. Pada tahun 1998 penulis memulai sekolah dasar selama 6 tahun di SDN Induk Desa Kebun Dadap Timur. Kemudian pada tahun 2003 melanjutkan studinya ke pesantren al-Ittihad al-Islami Camplong Madura. Di pesantren tersebut, penulis belajar agama selama 6 tahun. Di tahun 2009 penulis dipercaya menjadi Da'i dan imam selama bulan suci Ramadhan di Kalimantan Timur sebagai perwakilan dari pesantren. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar. Di Mesir pada tahun 2013 penulis pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan selama satu minggu di organisasi PWK PII (Perwakilan Pelajar Islam Indonesia). Pada tahun 2014-2016 penulis menjadi guru ilmu mawarits di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) cabang Kairo. Pada tahun 2016 penulis juga menjadi guru ilmu mawarits bagi mahasiswa Malaysia semester 5 di organisasi al-Hamidy Center. Di tahun yang sama penulis juga menjadi Direktur Hotel Wisma Nusantara Kairo. Lulus S-1 dari Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Qur'an Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 2016. Tahun 2017 sampai sekarang menjadi guru Qur'an di Pondok Pesantren Thursina Internasional Islamic Boarding School Malang.